



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM ANGKA 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH
DALAM ANGKA 2024**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM ANGKA 2024

Penulis:

Tim Penyusun Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Data

Penerbit:

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta, 10110, Telp. (021) 23529000

Hak Cipta ©2025 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Heru Setiawan

Koordinator:

Nanang Subekti

Pengolah Data:

Adam Ilyas

Adam Waluyo

Debby Yelviona

Melati Kusuma Wardani

Parikhin

Siti Rosmalina Nurhayati

Yahya Amarullah

Rico Setyawan

Romi Sundara

Penulis Naskah:

Budi Hari Wibowo

Perancang Infografis dan Penyunting Naskah:

Retno Palupi

Thessa Fauziah Pambudi



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga publikasi yang berjudul "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 merupakan salah satu peristiwa demokrasi yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak terlepas dari dinamika dan tantangan, termasuk timbulnya perselisihan hasil pemilihan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai jumlah dan karakteristik penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Data disajikan dalam bentuk tabel, ulasan, diagram, dan infografis. Analisis ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat luas, dalam memahami proses penyelesaian sengketa Pilkada yang berlangsung secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data, masukan, maupun diskusi selama proses penyusunan publikasi ini. Semoga kehadiran publikasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan demokrasi dan supremasi hukum di tanah air.

Jakarta, Juli 2025
Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk215747155250714062210](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I INFORMASI UMUM	3
1.1 Pendahuluan	3
1.2 Daerah Penyelenggara Pemilihan	4
1.3 Peserta Pemilihan	7
BAB II PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024	15
2.1 Klasifikasi Permohonan	16
2.1.1. Klasifikasi Permohonan berdasarkan Daerah Pemilihan	16
2.1.2. Klasifikasi Permohonan berdasarkan Pemohon	19
2.1.3. Klasifikasi Permohonan berdasarkan Prosedur Pengajuan	19
2.2 Materi Permohonan	20
2.2.1 Permohonan yang Memenuhi Persyaratan Formal	20
2.2.2 Permohonan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal	22
2.2.2.1 Permohonan yang Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara tetapi Melewati Tenggang Waktu Pengajuan	22
2.2.2.2 Permohonan yang Diajukan oleh Pemantau atau Bukan Pasangan Calon Pemilu	22
2.2.2.3 Permohonan yang Memenuhi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tetapi Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara	23
2.2.2.4 Permohonan yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara dan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan	23
2.2.3 Permohonan Menurut Status Registrasi	23
2.2.4 Dalil Permohonan	24
BAB III PENANGANAN PERKARA	29
3.1 Registrasi Permohonan	29
3.2 Pemeriksaan Dan Persidangan Perkara	29



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

3.2.1	Panel Pemeriksaan dan Persidangan	29
3.2.2	Alat Bukti	33
3.2.3	Sidang Pendahuluan	33
3.2.4	Pemeriksaan Persidangan Tahap 1	34
3.2.5	Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1	35
3.2.6	Pemeriksaan Persidangan Tahap 2	36
3.2.7	Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2	37
BAB IV PUTUSAN DAN KETETAPAN.....		41
4.1	Putusan Tahap 1 (pada 4 – 5 Februari 2025)	43
4.1.1	Pertimbangan Hukum dan Pendapat Mahkamah	43
4.1.2	Amar Putusan	47
4.2	Ketetapan.....	50
4.2.1	Mahkamah Tidak Berwenang	50
4.2.2	Permohonan Ditarik Kembali.....	51
4.2.3	Pemohonan Gugur.....	51
4.3	Putusan Tahap 2 (pada 24 Februari 2025).....	51
BAB V PUTUSAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG.....		55
5.1	Registrasi Permohonan.....	56
5.2	Pemeriksaan Dan Persidangan Perkara.....	57
5.2.1	Panel Pemeriksaan dan Persidangan	57
5.2.2	Alat Bukti	58
5.2.3	Sidang Pendahuluan	58
5.2.4	Pemeriksaan Persidangan Tahap 1	59
5.2.5	Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1	59
5.2.6	Pemeriksaan Persidangan Tahap 2	60
5.2.7	Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2	60
5.3	Putusan.....	61
BAB VI PENUTUP		65
LAMPIRAN		69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Daerah Pemilihan dan Provinsi	16
Tabel 2. Jumlah Daerah yang Mengajukan Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Daerah Pemilihan dan Banyak Permohonan	18
Tabel 3. Jumlah Dalil Permohonan Mengenai Tindak Pidana Pemilihan.....	25
Tabel 4. Komposisi Hakim dan Panitera Pengganti Menurut Panel Sidang	29
Tabel 5. Jumlah Daerah yang Mengajukan Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Daerah Pemilihan dan Banyak Permohonan.....	55



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Menurut Klasifikasi Kepala Daerah	4
Gambar 2. Jumlah Provinsi Penyelenggara Pilkada Gubernur Menurut Status Penyelenggaraan	5
Gambar 3. Jumlah Kabupaten Penyelenggara Pilkada Bupati Menurut Provinsi	6
Gambar 4. Jumlah Kota Penyelenggara Pilkada Walikota Menurut Provinsi	7
Gambar 5. Jumlah Pasangan Calon Pilkada Gubernur Menurut Provinsi	8
Gambar 6. Jumlah Pasangan Calon Pilkada Bupati Menurut Provinsi	9
Gambar 7. Penyelenggaraan Pilkada Bupati di Indonesia	10
Gambar 8. Jumlah Pasangan Calon Pilkada Walikota Menurut Provinsi.....	11
Gambar 9. Penyelenggaraan Pilkada Walikota di Indonesia.....	12
Gambar 10. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Klasifikasi Kepala Daerah	15
Gambar 11. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Menurut Daerah Pemilihan dan Status Pengajuan Permohonan Perkara PHPUKADA	18
Gambar 12. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Jenis Pemohon	19
Gambar 13. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Prosedur Pengajuan Permohonan dan Jenis Pemohon.....	20
Gambar 14. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Status Registrasi	24
Gambar 15. Jumlah Dalil Permohonan Mengenai Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu.....	24
Gambar 16. Jumlah Dalil Permohonan Mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu	25
Gambar 17. Jumlah Perkara PHPUKADA Panel I Menurut Klasifikasi Kepala Daerah	31
Gambar 18. Jumlah Perkara PHPUKADA Panel II Menurut Klasifikasi Kepala Daerah	32
Gambar 19. Jumlah Perkara PHPUKADA Panel III Menurut Klasifikasi Kepala Daerah	32
Gambar 20. Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Menurut Panel Sidang dan Klasifikasi Para Pihak ...	33
Gambar 21. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pendahuluan Menurut Klasifikasi Para Pihak	34
Gambar 22. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak	35
Gambar 23. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak.....	36
Gambar 24. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak	37
Gambar 25. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak.....	38



Gambar 26. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Tahap 1 Menurut Amar Putusan	41
Gambar 27. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Tahap 2 Menurut Amar Putusan	42
Gambar 28. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Menurut Amar Putusan.....	43
Gambar 29. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Tahap 1 Menurut Alasan Tidak Dapat Diterima	47
Gambar 30. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Jenis Pemohon dan Prosedur Pengajuan Permohonan.....	56
Gambar 31. Jumlah Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Panel dan Klasifikasi Kepala Daerah	57
Gambar 32. Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Panel Sidang dan Klasifikasi Para Pihak	58
Gambar 33. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Amar Putusan	62



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan yang Memenuhi Persyaratan Formal.....	69
Lampiran 2	Permohonan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.....	71
Lampiran 3	Permohonan yang Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara tetapi Melewati Tenggang Waktu Pengajuan.....	93
Lampiran 4	Permohonan yang Diajukan oleh Pemantau atau Bukan Pasangan Calon Pemilu	94
Lampiran 5	Permohonan yang Memenuhi Tenggang Waktu Pengajuan tetapi Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.....	95
Lampiran 6	Permohonan yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara dan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan	111
Lampiran 7	Permohonan Perkara PHPUKADA yang Tidak Diregistrasi dalam e-BRPK	114
Lampiran 8	Perkara PHPUKADA yang Diregistrasi dalam e-BRPK	115
Lampiran 9	Perkara PHPUKADA yang Ditangani di Panel I.....	129
Lampiran 10	Perkara PHPUKADA yang Ditangani di Panel II.....	132
Lampiran 11	Perkara PHPUKADA yang Ditangani di Panel III.....	135
Lampiran 12	Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pendahuluan Menurut Klasifikasi Para Pihak ...	138
Lampiran 13	Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak	147
Lampiran 14	Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak.....	157
Lampiran 15	Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak	167
Lampiran 16	Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak (Lanjutan).....	169
Lampiran 17	Perkara yang Dilanjutkan ke Sidang Pembuktian	171
Lampiran 18	Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak.....	173
Lampiran 19	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Melewati Tenggang Waktu Pengajuan.....	175
Lampiran 20	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Diajukan oleh Pemantau atau Bukan Pasangan Calon.....	176
Lampiran 21	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Permohonan Kabur ...	177
Lampiran 22	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Permohonan Tidak Memenuhi Ambang Batas Pasal 158	180

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 23	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Obyek Permohonannya Bukan Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi	184
Lampiran 24	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Ditarik Kembali oleh Pemohon	185
Lampiran 25	Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Dinyatakan Gugur.....	187
Lampiran 26	Perkara PHPUKADA Tahap 2 yang Dikabulkan	188
Lampiran 27	Perkara PHPUKADA Tahap 2 yang Ditolak	189
Lampiran 28	Perkara PHPUKADA Tahap 2 yang Tidak Dapat Diterima	190
Lampiran 29	Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi	191
Lampiran 30	Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi dalam e-BRPK pada 21 April 2025 ..	192
Lampiran 31	Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi dalam e-BRPK pada 7 Mei 2025	193
Lampiran 32	Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi dalam e-BRPK pada 11 Juni 2025 ..	194
Lampiran 33	Amar Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU.....	195



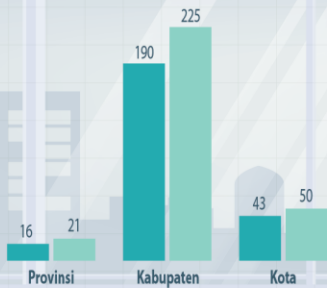
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PHPUKADA) 2024

Permohonan Perkara PHPUKADA

Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada

Menurut Daerah Pemilihan dan Status Pengajuan Permohonan Perkara PHPUKADA



● Mengajukan
● Tidak Mengajukan

Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA

Menurut Klasifikasi Kepala Daerah



Penanganan Perkara PHPUKADA

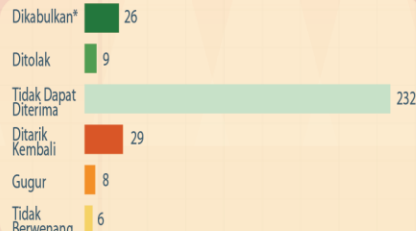
Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA

Menurut Amar Putusan

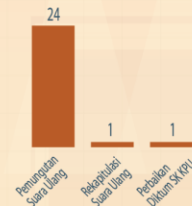
Jumlah Perkara PHPUKADA

310 perkara

Terdapat sebanyak 4 permohonan perkara tidak diregistrasi dalam e-BRPK



*Dikabulkan sebagian



Dari 26 perkara dengan amar "Dikabulkan", terdapat sebanyak 24 putusan yang memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), 1 putusan memerintahkan untuk Rekapitulasi Suara Ulang, dan 1 putusan memerintahkan untuk Perbaikan Diklum SK KPU.

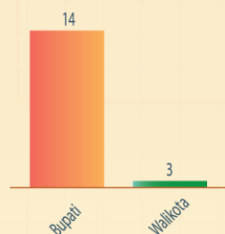
Penanganan Perkara PHPUKADA Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Jumlah Perkara PHPUKADA Pasca PSU

Menurut Klasifikasi Kepala Daerah

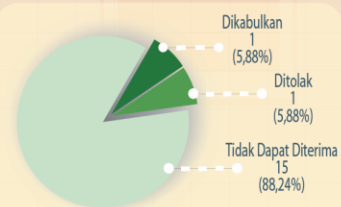
Jumlah Perkara PHPUKADA Pasca PSU

17 perkara



Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU

Menurut Amar Putusan



Sumber: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



BAB I
INFORMASI UMUM



BAB I INFORMASI UMUM

1.1 Pendahuluan

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

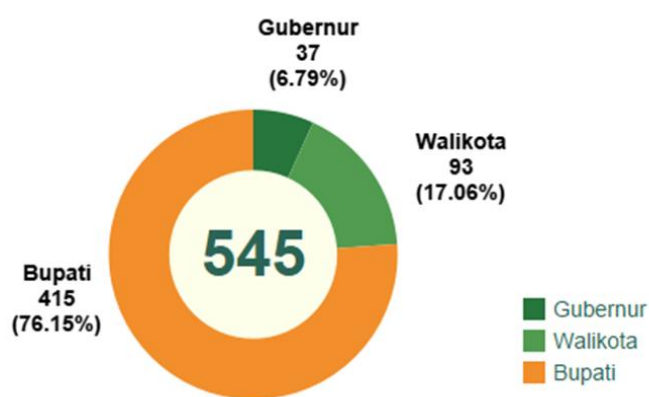
Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para stakeholder, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

MK menyadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu agenda ketatanegaraan penting yang terkait dengan implementasi sistem demokrasi. Di sisi lain, proses penegakkan hukum yang berkeadilan dalam menyelesaikan setiap perselisihan dan sengketa

yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, termasuk perselisihan hasil pemilihan, sangat menentukan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi secara serius menangani perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah ini, sesuai kewenangan yang ditentukan undang-undang, tanpa memandang bahwa kewenangan ini bersifat sementara.

1.2 Daerah Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 telah diselenggarakan di 545 daerah (37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) dengan aman dan kondusif walaupun masih terdapat beberapa catatan seperti penundaan pemungutan di sejumlah TPS, tingkat partisipasi, dan masih terdapat petugas penyelenggara yang wafat dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui dari total keseluruhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat 37 Pilkada Gubernur (6,8%), 415 Pilkada Bupati (76,1%), dan 93 Pilkada Walikota (17,1%).

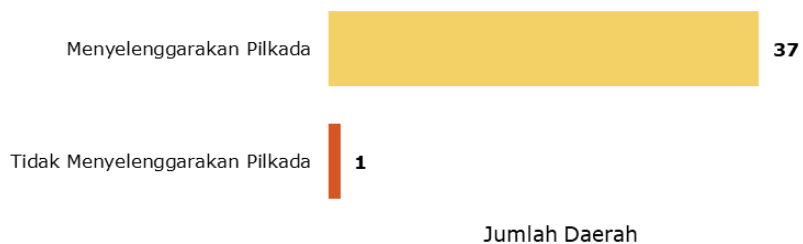


Gambar 1. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Menurut Klasifikasi Kepala Daerah

Jumlah provinsi penyelenggara Pilkada Gubernur menurut status penyelenggaraannya ditunjukkan pada Gambar 2. Dari total 38 provinsi, terdapat 37 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan 1 provinsi yang tidak menyelenggarakan Pilkada Gubernur. Provinsi yang tidak menyelenggarakan Pilkada Gubernur adalah Provinsi DI Yogyakarta.



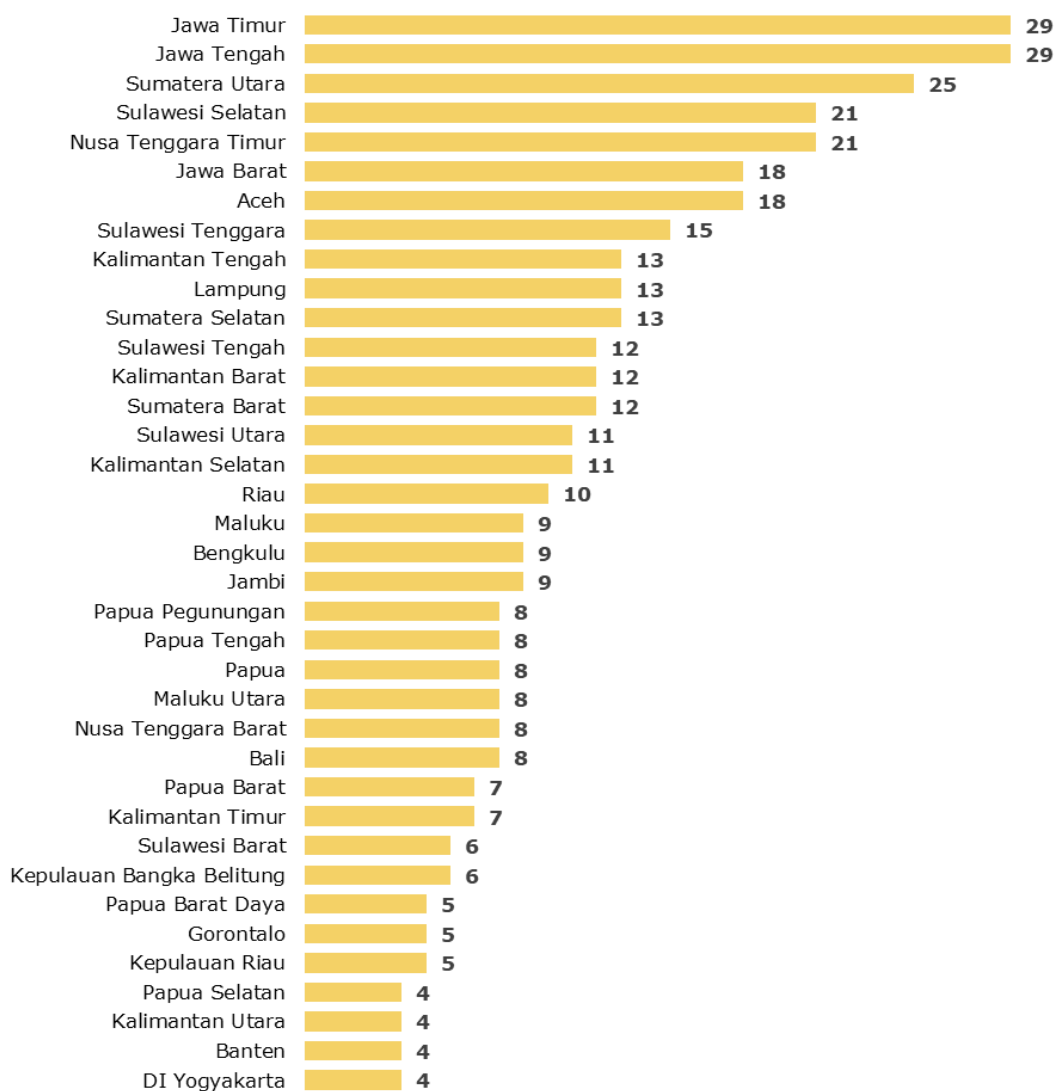
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Gambar 2. Jumlah Provinsi Penyelenggara Pilkada Gubernur Menurut Status Penyelenggaraan

Pada penyelenggaraan Pilkada di tingkat kabupaten, berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa provinsi dengan jumlah kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Bupati terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 29 Pilkada Bupati. Sedangkan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Bupati paling sedikit yaitu di Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Utara, Banten, dan DI Yogyakarta, masing-masing sebanyak 4 Pilkada Bupati.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



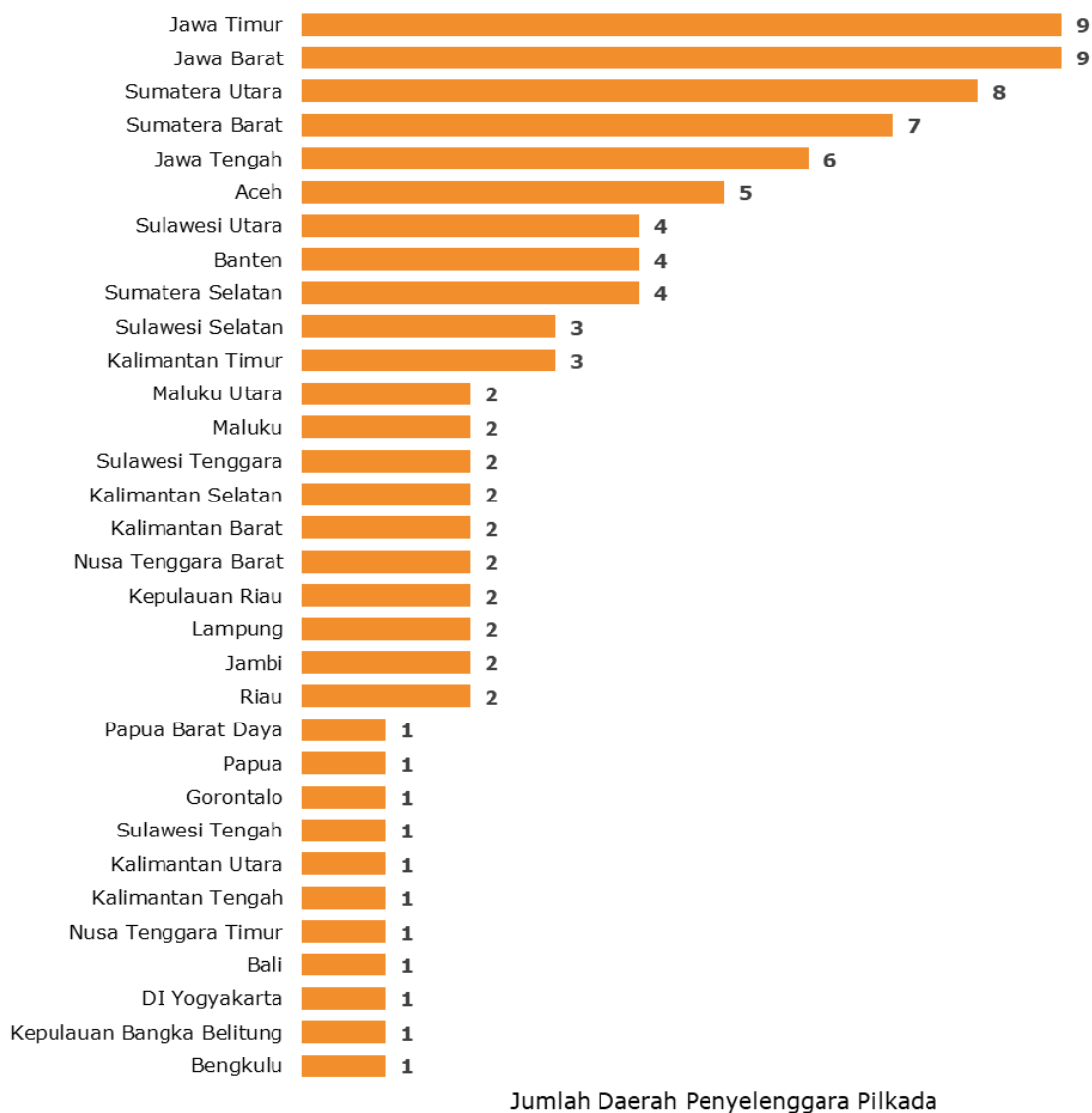
Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada

Gambar 3. Jumlah Kabupaten Penyelenggara Pilkada Bupati Menurut Provinsi

Pada penyelenggaraan Pilkada di tingkat kota, terdapat 93 Pilkada Walikota yang diselenggarakan. Provinsi dengan jumlah kota yang menyelenggarakan Pilkada Walikota terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing dengan 9 Pilkada Walikota. Sementara itu, provinsi dengan jumlah kota paling sedikit menyelenggarakan Pilkada Walikota mencakup 11 Provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Papua, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu.



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



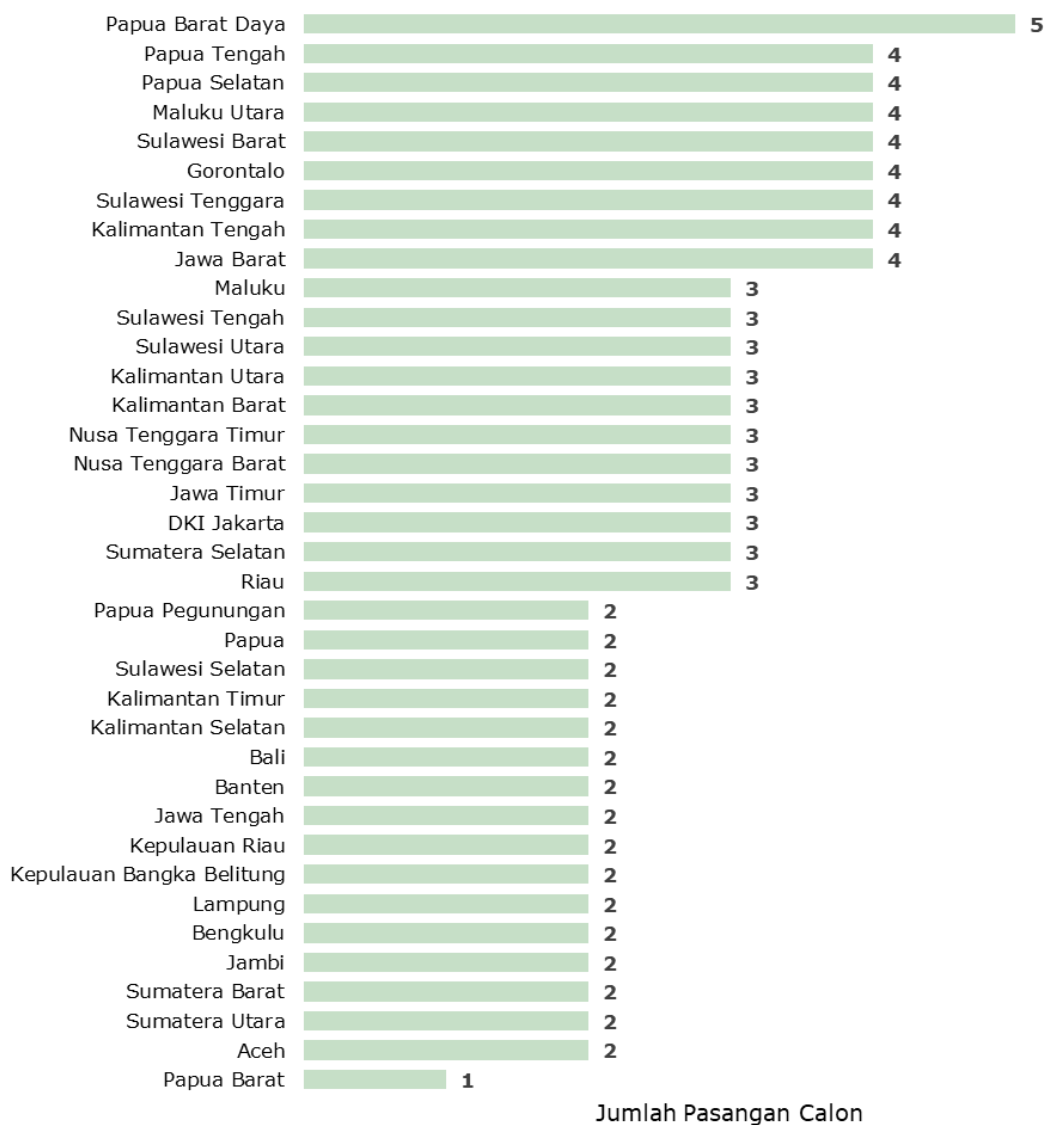
Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada

Gambar 4. Jumlah Kota Penyelenggara Pilkada Walikota Menurut Provinsi

1.3 Peserta Pemilihan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di 545 daerah pemilihan diikuti oleh 1.557 pasangan calon (paslon) kepala daerah, yang terdiri dari 103 pasangan (6,7%) calon gubernur dan wakil gubernur, 1.169 pasangan (75%) calon bupati dan wakil bupati, dan 285 pasangan (18,3%) calon walikota dan wakil walikota.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

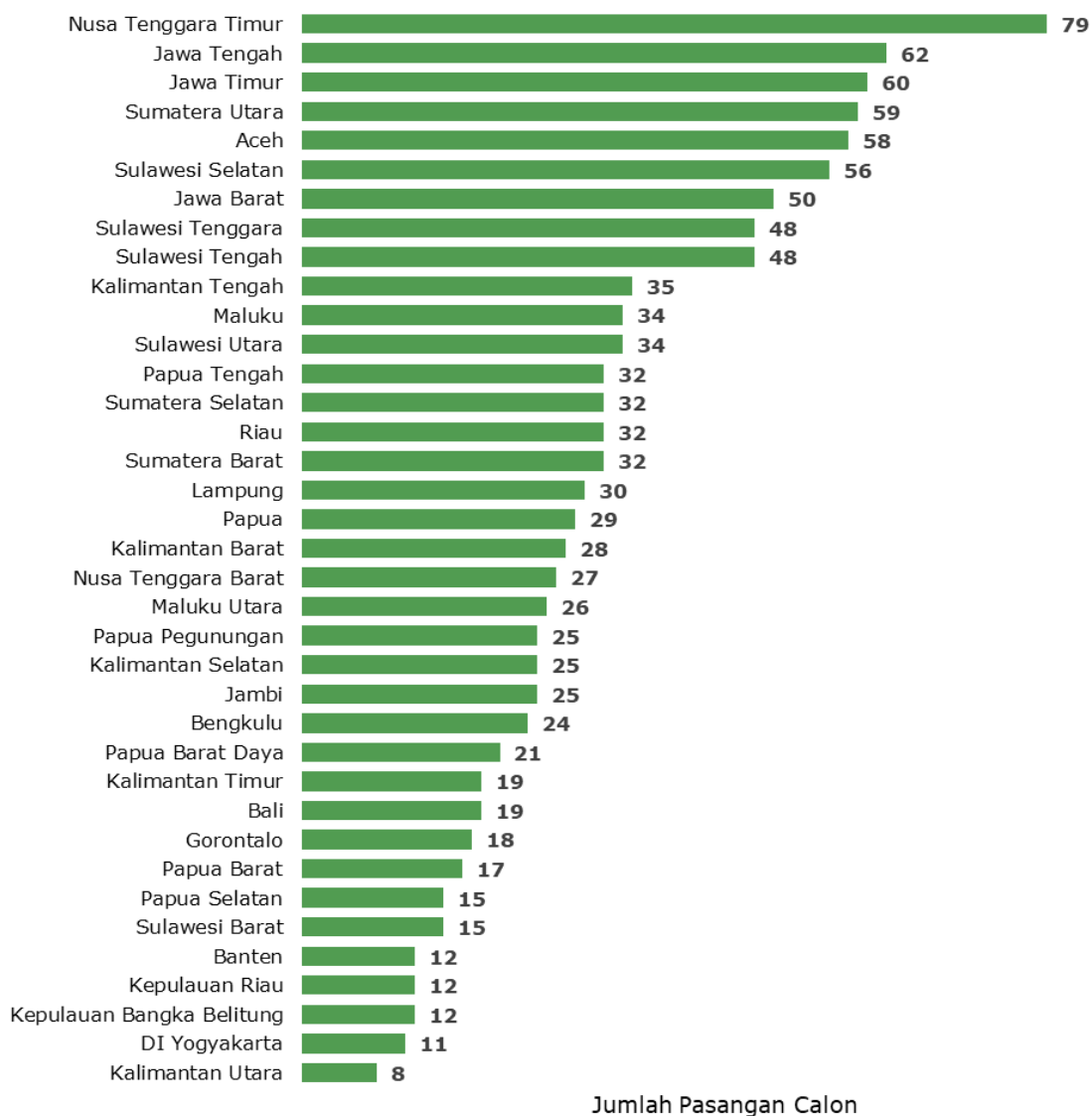


Gambar 5. Jumlah Pasangan Calon Pilkada Gubernur Menurut Provinsi

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa provinsi dengan paslon terbanyak yang ikut serta pada Pilkada Gubernur adalah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu sebanyak 5 (lima) paslon atau 4,85% dari total paslon gubernur. Sedangkan untuk daerah dengan 4 (empat) paslon terdapat di 8 (delapan) provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Sementara itu, Pilkada Gubernur yang hanya diikuti oleh 1 (satu) paslon terdapat di Provinsi Papua Barat.



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Gambar 6. Jumlah Pasangan Calon Pilkada Bupati Menurut Provinsi

Gambar 6 menunjukkan bahwa Pilkada Bupati pada tahun 2024 diikuti oleh 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Provinsi yang memiliki pasangan calon bupati dan wakil bupati terbanyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 79 paslon (6,8%), kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 62 paslon (5,3%), dan Provinsi Jawa Timur dengan diikuti oleh 60 paslon (5,1%). Sedangkan untuk provinsi yang memiliki paling sedikit paslon bupati dan wakil bupati adalah Provinsi DI

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Yogyakarta dengan 11 Paslon (0,9%) dan Provinsi Kalimantan Utara dengan 8 paslon (0,7%) bupati dan wakil bupati.



Gambar 7. Penyelenggaraan Pilkada Bupati di Indonesia

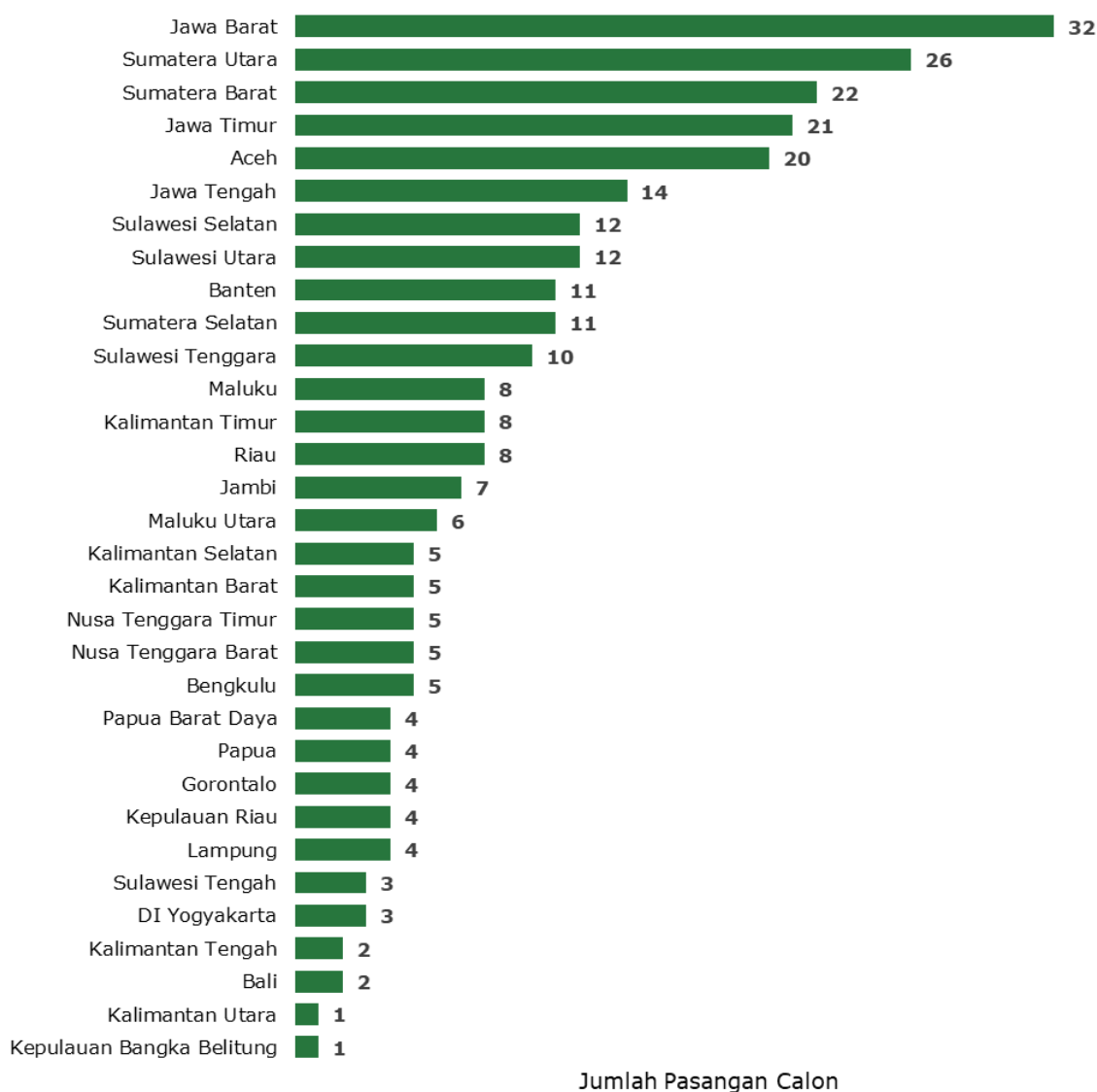
Sebagaimana gambar di atas, dari 415 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Rata-rata jumlah paslon bupati dan wakil bupati pada setiap kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Bupati adalah sebanyak 2,8 atau 3 paslon. Jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati paling banyak adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebanyak 79 paslon atau 6,8% dari total paslon bupati di seluruh kabupaten. Dengan jumlah kabupaten sebanyak 21 kabupaten di NTT, rata-rata jumlah paslon bupati di tiap kabupaten pada provinsi tersebut adalah 3,76 atau 4 paslon. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah paslon bupati pada seluruh kabupaten penyelenggara Pilkada Bupati yang hanya memiliki sekitar 3 paslon.

Selanjutnya, grafik di bawah ini menunjukkan jumlah pasangan calon walikota dan wakil walikota yang menjadi peserta Pilkada pada provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Walikota. Terdapat 285 pasangan calon walikota dan wakil walikota, di mana jumlah pasangan calon walikota dan wakil walikota paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 32 paslon (11,2%), kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara dengan 26 paslon (9,1%), dan Provinsi Sumatera Barat dengan 22 paslon



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

(7,7%). Sementara itu, provinsi dengan keikutsertaan paslon walikota paling sedikit adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Utara, dengan masing-masing diikuti oleh 1 (satu) paslon.



Gambar 8. Jumlah Pasangan Calon Pilkada Walikota Menurut Provinsi

Berdasarkan Gambar 9, pada 93 kota yang menyelenggarakan Pilkada Walikota, terdapat 285 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut serta dalam Pilkada tersebut. Artinya, rata-rata jumlah

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

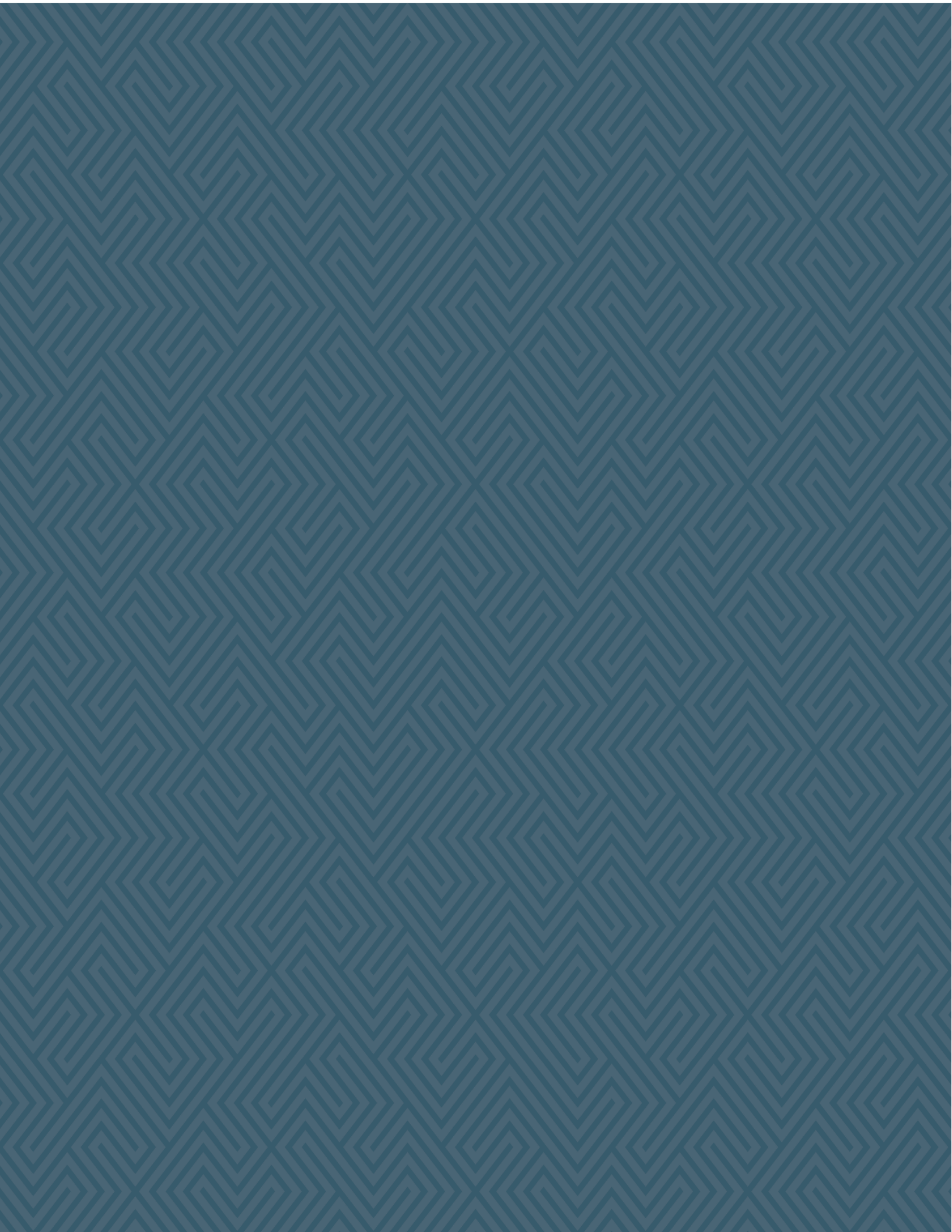


paslon walikota dan wakil walikota pada setiap kota yang menyelenggarakan Pilkada Walikota adalah sebanyak 3,06 atau 3 paslon. Sementara itu, jumlah paslon walikota dan wakil walikota paling banyak ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu 32 paslon, dengan jumlah kota yang menyelenggarakan pemilihan sebanyak 9 kota. Maka, rata-rata jumlah paslon walikota di tiap kota pada provinsi tersebut adalah 3,55 atau 4 paslon. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah paslon walikota pada seluruh kota penyelenggara Pilkada Walikota yang hanya memiliki sekitar 3 paslon.



Gambar 9. Penyelenggaraan Pilkada Walikota di Indonesia

BAB II
PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

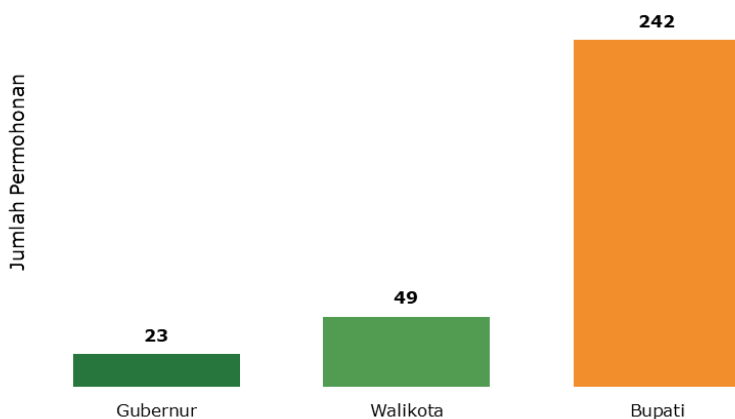




BAB II PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Setelah hari pencoblosan dalam Pilkada Serentak tahun 2024 pada 27 November 2024, selanjutnya proses rekapitulasi oleh KPUD dan dilanjutkan dengan proses penetapan dan pengumuman hasil pemilihan. Pasca penetapan hasil oleh masing-masing KPUD di daerah, selanjutnya para calon kepala daerah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke MK. Sesuai dengan catatan dari gugus tugas bidang teknologi informasi komunikasi dan data, permohonan pertama kali diajukan ke MK yaitu pada tanggal 3 Desember 2024.

Tercatat permohonan penanganan perselisihan hasil Pilkada yang masuk ke MK adalah sebanyak 314 permohonan. Adapun untuk jumlah Daerah Pemilihan yang mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi yaitu sebanyak 249 Daerah Pemilihan yang diajukan oleh 314 Pemohon, baik oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, maupun yang diajukan oleh Pemohon lainnya. Dari jumlah tersebut terdiri dari 23 permohonan untuk pemilihan gubernur, 49 permohonan untuk pemilihan walikota, dan 242 permohonan untuk pemilihan bupati.



Gambar 10. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Klasifikasi Kepala Daerah

2.1 Klasifikasi Permohonan

2.1.1. Klasifikasi Permohonan berdasarkan Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan yang mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut provinsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Daerah Pemilihan dan Provinsi

No.	Provinsi	Daerah Pemilihan			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
1	Aceh	0	2	4	6
2	Sumatera Utara	1	12	3	16
3	Sumatera Barat	0	8	5	13
4	Riau	0	5	2	7
5	Jambi	0	7	1	8
6	Sumatera Selatan	0	8	3	11
7	Bengkulu	0	2	1	3
8	Lampung	0	5	0	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	2	0	3
10	Kepulauan Riau	0	2	1	3
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	10	2	12
13	Jawa Tengah	1	2	1	4
14	Jawa Timur	1	13	3	17
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0
16	Banten	0	2	1	3
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	11	0	11
20	Kalimantan Barat	0	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	1	8	1	10
22	Kalimantan Selatan	0	1	4	5
23	Kalimantan Timur	1	4	0	5
24	Kalimantan Utara	0	2	1	3
25	Sulawesi Utara	1	8	2	11
26	Sulawesi Tengah	1	9	1	11



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

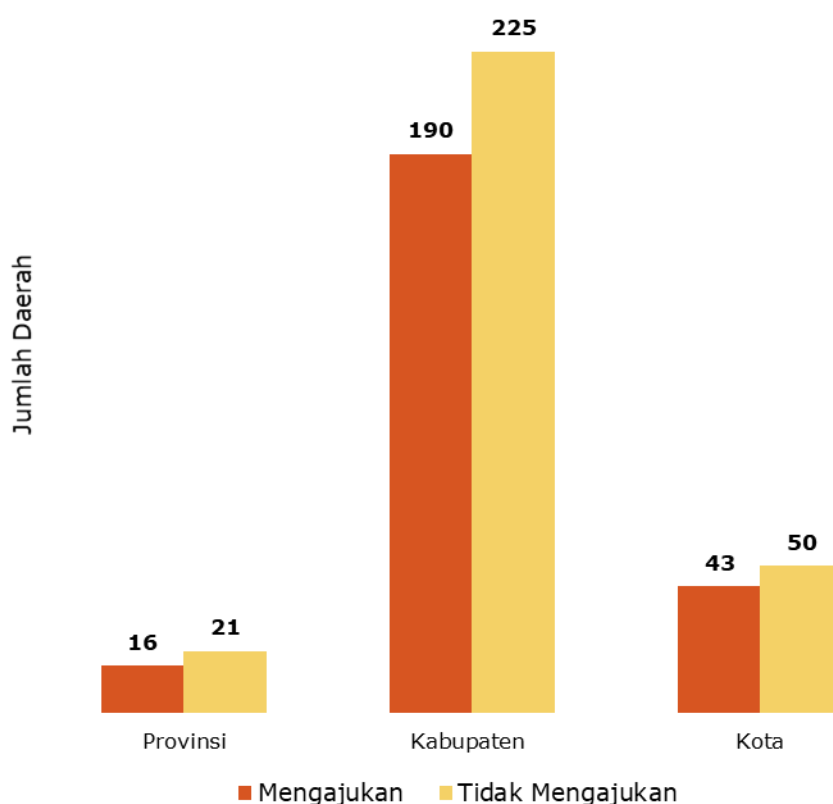
No.	Provinsi	Daerah Pemilihan			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
27	Sulawesi Selatan	1	7	3	11
28	Sulawesi Tenggara	1	11	3	15
29	Gorontalo	0	4	1	5
30	Sulawesi Barat	0	3	0	3
31	Maluku	0	11	1	12
32	Maluku Utara	3	14	2	19
33	Papua	1	12	1	14
34	Papua Barat	0	7	0	7
35	Papua Selatan	3	6	0	9
36	Papua Tengah	3	20	0	23
37	Papua Pegunungan	2	13	0	15
38	Papua Barat Daya	1	10	1	12
Jumlah		23	242	49	314

Dari 314 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, terdiri dari 23 dari Provinsi (7,3%), dan 242 dari Kabupaten (77,1%), serta 49 dari Kota (15,6%). Terdapat daerah provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2024 tetapi tidak mengajukan permohonan perselisihannya, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun walikota dan wakil walikota adalah sebanyak 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.

Jika dilihat dari daerah pemilihan, terdapat 249 daerah pemilihan (provinsi, kabupaten, dan kota) yang mengajukan permohonan dari 545 daerah atau 45,7% yang menyelenggarakan pemilihan. Adapun rincian daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berasal dari 16 Daerah Pemilihan Provinsi atau 43,2% dari 37 Provinsi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berasal dari 190 Daerah Pemilihan Kabupaten atau 45,8% dari 415 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- c. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berasal dari 43 Daerah Pemilihan Kota atau 46,2% dari 93 Kota Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.



Gambar 11. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Menurut Daerah Pemilihan dan Status Pengajuan Permohonan Perkara PHPUKADA

Dari 249 Daerah Pemilihan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, akan dirinci berdasarkan banyaknya permohonan yang diajukan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Daerah yang Mengajukan Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Daerah Pemilihan dan Banyak Permohonan

No.	Jumlah Permohonan	Daerah Pemilihan			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
1	1 Permohonan	12	154	39	205
2	2 Permohonan	1	26	3	30

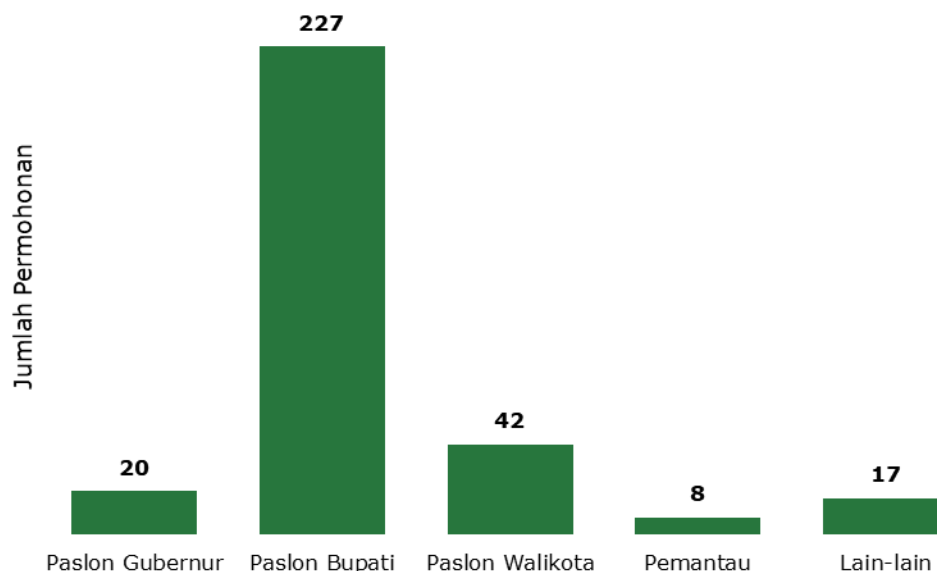


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Jumlah Permohonan	Daerah Pemilihan			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
3	3 Permohonan	3	8	0	11
4	4 Permohonan	0	2	1	3
Jumlah		16	190	43	249

2.1.2. Klasifikasi Permohonan berdasarkan Pemohon

Dilihat berdasarkan latar belakang pemohon, dari 314 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, 20 permohonan (6,4%) diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 227 permohonan (72,3%) diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, 42 permohonan (13,4%) diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, 8 permohonan (2,5%) diajukan oleh Pemantau, dan 17 permohonan (5,4%) oleh lain-lain (termasuk bukan calon dan juga hanya salah satu calon dari pasangan calon).

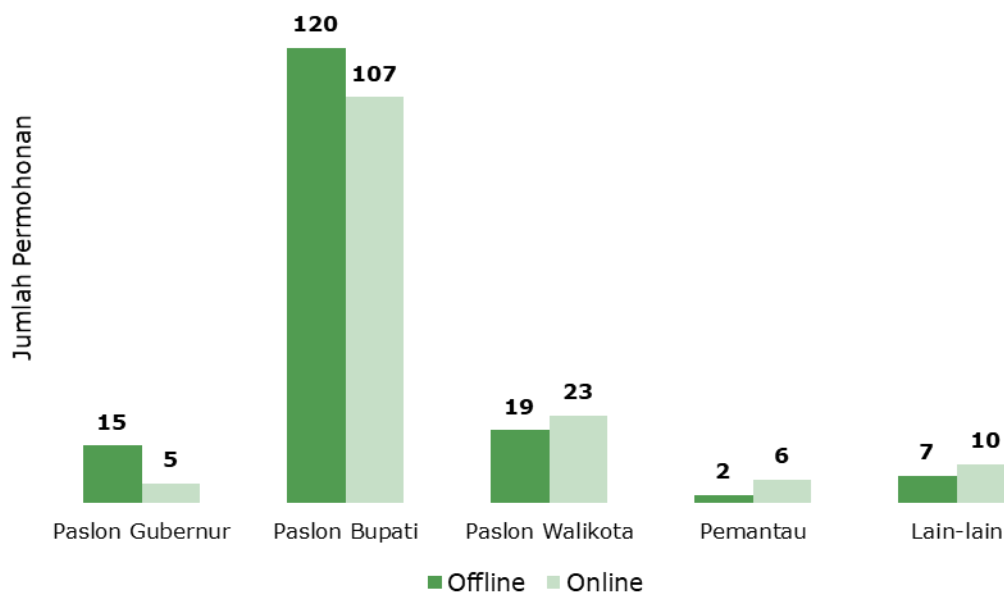


Gambar 12. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Jenis Pemohon

2.1.3. Klasifikasi Permohonan berdasarkan Prosedur Pengajuan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi baik secara langsung ke Petugas Penerimaan Permohonan di Mahkamah Konstitusi (offline) ataupun secara online melalui Sistem Informasi Permohonan Elektronik (Simpel).



Gambar 13. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Prosedur Pengajuan Permohonan dan Jenis Pemohon

Dari 314 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2024 yang diajukan secara *offline* sebanyak 163 permohonan atau 51,9%, sedangkan permohonan yang pengajuannya dilakukan secara *online* ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 151 permohonan atau 48,1% dengan rincian sebagaimana tertuang dalam grafik di atas.

2.2 Materi Permohonan

2.2.1 Permohonan yang Memenuhi Persyaratan Formal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Gubernur, Bupati, dan Walikota, terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yaitu:

- a. Obyek perkara adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [*vide* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
- b. Permohonan diajukan oleh :
 - 1) Pasangan Calon Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) peserta pemilihan [*vide* Pasal 157 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016], atau
 - 2) Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon [*vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017];
- c. Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [*vide* Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
- d. Permohonan memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota [*vide* Pasal 158 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016].

Berdasarkan data yang ada, dari 314 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, terdapat sebanyak 28 Permohonan (8,9%) yang secara kumulatif memenuhi persyaratan formal, sebanyak 282 permohonan lainnya (89,8%) tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, serta terdapat 4 permohonan yang tidak diregistrasi (1,3%).

Dari 28 permohonan yang memenuhi syarat formal tersebut terdiri dari 2 permohonan (7%) diajukan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur, 24 permohonan (86%) yang diajukan oleh paslon bupati dan wakil bupati, dan 2 permohonan (7%) diajukan oleh paslon walikota dan wakil walikota.

2.2.2 Permohonan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

Dari 314 permohonan yang ada, terdapat 282 permohonan yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat formal. Dari 282 permohonan yang tidak memenuhi syarat formal tersebut terdiri dari 21 permohonan (7,45%) diajukan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur, 214 permohonan (75,89%) yang diajukan oleh paslon bupati dan wakil bupati, dan 47 permohonan (16,67%) diajukan oleh paslon walikota dan wakil walikota.

Berdasarkan permohonan yang tidak memenuhi syarat formal, terdapat 2 Permohonan (0,8%) yang memenuhi ambang batas selisih perolehan suara tetapi melewati tenggang waktu pengajuan, 26 Permohonan (9,2%) yang diajukan oleh pemantau atau bukan pasangan calon, 220 permohonan (78%) yang memenuhi tenggang waktu pengajuan tetapi tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara; dan 34 Permohonan (12%) yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suaran dan melewati tenggang waktu pengajuan.

2.2.2.1 Permohonan yang Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara tetapi Melewati Tenggang Waktu Pengajuan

Dalam hal permohonan yang sebetulnya memenuhi ambang batas selisih perolehan suara akan tetapi melewati tenggang waktu pengajuan terdapat 2 (dua) permohonan, yakni permohonan nomor 278/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan 131/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

2.2.2.2 Permohonan yang Diajukan oleh Pemantau atau Bukan Pasangan Calon Pemilu

Permohonan diajukan oleh pihak-pihak tertentu. Jenis pemohon yang mengajukan permohonan antara lain Pasangan Calon, Bukan Pasangan Calon, Bukan Calon, dan Pemantau. Permohonan yang diajukan oleh pemantau yang tidak terakreditasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon, maka permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Dalam hal ini, permohonan yang diajukan oleh pemantau atau bukan paslon pemilu terdapat 26 permohonan atau 9,2% dari 282 permohonan.



2.2.2.3 Permohonan yang Memenuhi Tenggang Waktu Pengajuan Permohon tetapi Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara

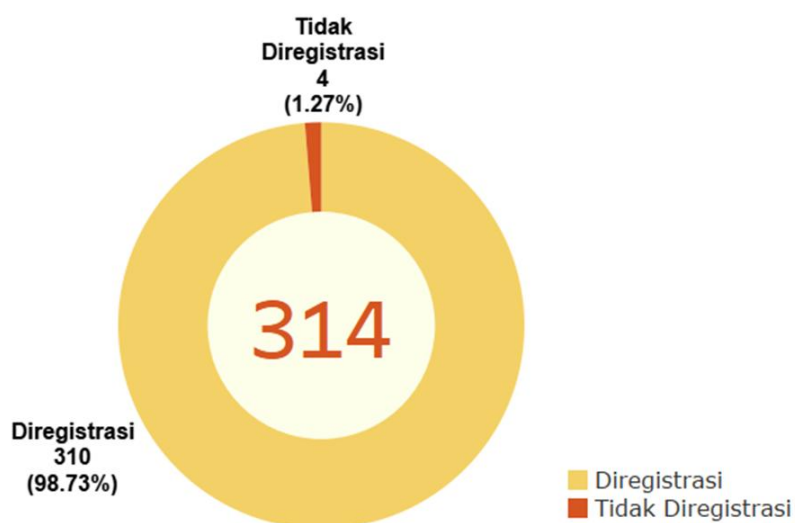
Terdapat permohonan yang diajukan oleh 220 Pemohon atau 78% dari 282 permohonan yang diajukan yang memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara. Di antara 220 permohonan tersebut terdapat 171 permohonan (77,7%) yang diajukan oleh paslon bupati dan wakil bupati, 31 permohonan (14,1%) yang diajukan oleh paslon walikota dan wakil walikota, dan 18 permohonan (8,2%) yang diajukan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur.

2.2.2.4 Permohonan yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara dan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan

Terdapat 34 permohonan (12%) dari 220 permohonan yang tidak memenuhi syarat formal karena tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara dan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dari 34 permohonan tersebut, 26 permohonan (76,5%) diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 8 permohonan (23,5%) diajukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota.

2.2.3 Permohonan Menurut Status Registrasi

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2024 terdiri dari 314 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat sebanyak 4 permohonan yang tidak diregistrasi dan sebanyak 310 permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.



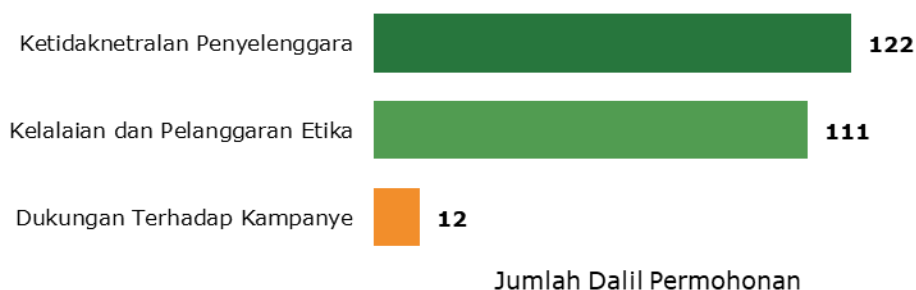
Gambar 14. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Status Registrasi

2.2.4 Dalil Permohonan

Dari 310 permohonan PHPUKADA yang diregistrasi, terdapat berbagai dalil yang dapat dirinci sebagai berikut.

a. Dalil Mengenai Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam permohonan para pemohon PHPUKADA terdapat 245 dalil yang terkait dengan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu (anggota KPU, Bawaslu, atau jajaran di bawahnya), yaitu ketidak-netralan penyelenggara sebanyak 122 dalil (49,8%), kelalaian dan pelanggaran etika sebanyak 111 dalil (45,3%), dan dukungan terhadap kampanye sebanyak 12 dalil (4,9%).



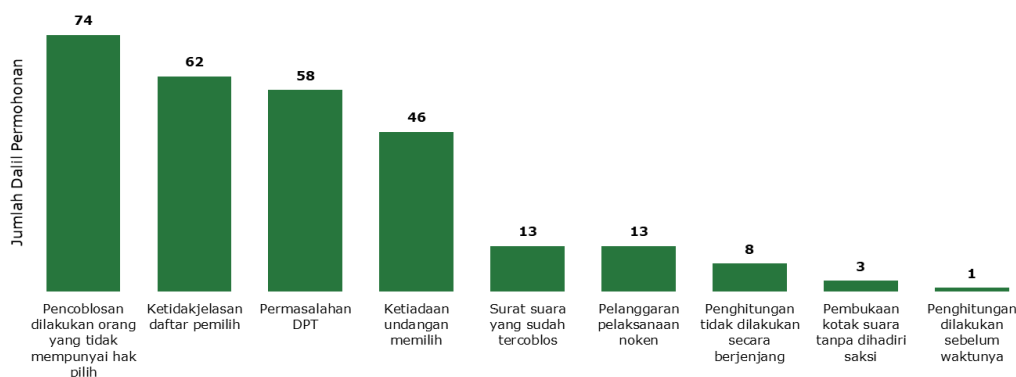
Gambar 15. Jumlah Dalil Permohonan Mengenai Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

b. Dalil Mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dalil mengenai pelanggaran administrasi pemilu terdapat sebanyak 278 dalil yang terdiri dari: 1. Pencoblosan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak pilih sebanyak 74 dalil; 2. Ketidakjelasan daftar pemilih sebanyak 62 dalil; 3. Permasalahan DPT sebanyak 58 dalil; 4. Ketidak-undangan pemilih sebanyak 46 dalil; 5. surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 13 dalil; 6. Pelanggaran pelaksanaan noken sebanyak 13 dalil; 7. penghitungan tidak dilakukan secara berjenjang sebanyak 8 dalil; 8. pembukaan kotak suara tanpa dihadiri saksi sebanyak 3 dalil; dan 9. Penghitungan dilakukan sebelum waktunya sebanyak 1 dalil.



Gambar 16. Jumlah Dalil Permohonan Mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu

c. Dalil Berdasarkan Tindak Pidana Pemilu

Untuk dalil berdasarkan tindak pidana pemilu, terdapat 516 dalil di antaranya seperti, pelibatan aparat negara, money politics, penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah, mobilisasi pemilih, black campaign. Dalil berdasarkan tindak pidana pemilu secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Dalil Permohonan Mengenai Tindak Pidana Pemilihan

No.	Tindak Pidana Pemilihan	Jumlah Dalil Permohonan
1	Penerimaan dana kampanye dari negara asing, tidak jelas identitasnya, pemerintah/pemda, dan BUMN/BUMD	7
2	Black campaign	14

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Tindak Pidana Pemilihan	Jumlah Dalil Permohonan
3	Calon Petahanan menggunakan program dan kegiatan Pemda untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir	33
4	Calon Petahanan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir	33
5	Mobilisasi pemilih	74
6	Penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah	87
7	Money politics oleh tim kampanye	133
8	Pelibatan aparat negara dalam bentuk tindakan ataupun	135



BAB III
PENANGANAN PERKARA





BAB III PENANGANAN PERKARA

3.1 Registrasi Permohonan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, setelah melalui tahapan penelitian kelengkapan berkas dan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (HPKP3), pada 3 Januari 2025 dari 314 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebanyak 310 permohonan yang secara serentak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) oleh Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, terdapat sebanyak 4 permohonan yang tidak dapat diregistrasi.

3.2 Pemeriksaan Dan Persidangan Perkara

3.2.1 Panel Pemeriksaan dan Persidangan

Dalam menangani 310 perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak tahun 2024, Hakim Konstitusi membagi diri ke dalam 3 (tiga) Panel Sidang, yang masing-masing panelnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi (1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota). Setiap Panel Sidang dibantu oleh Koordinator, Panitera Pengganti, dan Pendamping Panitera Pengganti di setiap panel. Adapun untuk komposisi Hakim dan Panitera Pengganti pada setiap Panel Sidang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Komposisi Hakim dan Panitera Pengganti Menurut Panel Sidang

No.	Panel	Hakim Panel	Koordinator dan Panitera Pengganti
1	I	Ketua Anggota Anggota Dr. Suhartoyo Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Prof. Dr. M. Guntur Hamzah	1. Ida Ria Tambunan 2. Syukri Asy'ari 3. Ria Indriyani 4. Wilma Silalahi 5. A.A. Dian Onita 6. Fransisca

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Panel	Hakim Panel	Koordinator dan Panitera Pengganti	
			7. Rahardian Prima N. 8. Agusniwan Etra 9. Alifah Rahmawati 10. Indah Karmadaniah 11. Helmi Kasim 12. Abdul Ghoftar 13. Alboin Pasaribu 14. Zaka Firma A. 15. Suryo Gilang R. 16. Anathia Ayu D. 17. Paulus Rudy C. S. 18. Erlina Maria C. S. 19. Mery Christian P. 20. Rio Tri Juli P. 21. Haifa Arief Lubis	
2	II	Ketua Anggota Anggota	Prof. Dr. Saldi Isra Dr. Ridwan Mansyur Dr. Asrul Sani	1. Wiryanto 2. Saiful Anwar 3. Mardian Wibowo 4. Achmad Edi Subianto 5. Dian Chusnul Chatimah 6. Yunita Rhamadani 7. Jefri Porkonanta Tarigan 8. Muchtar Hadi Saputra 9. Rahmadiani Putri N. 10. Aqmarina Rasika 11. Anna Triningsih 12. Bisariyadi 13. Oly Viana Agustine 14. Winda Wijayanti 15. Rima Yuwana Y. 16. M. Reza Winata 17. Abdul Basid Fuadi 18. Andriani Wahyunigtyas N. 19. Titits Anindyajati 20. Achmad Dodi H. 21. Hersinta Setiarini
	III	Ketua Anggota Anggota	Prof. Dr. Arief Hidayat Prof. Dr. Anwar Usman Prof. Dr. Enny Nurbaningsih	1. Triyono Edy Budhiarto 2. Rizki Amalia 3. Ery Satria Pamungkas 4. Hani Adhani 5. Dewi Nurul Savitri 6. Nurlidya Stephanny H. 7. Siska Yosephin Sirait 8. I Made Gede Wiya T. K. 9. Fenny Tri Purnamasari



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Panel	Hakim Panel	Koordinator dan Panitera Pengganti
			10. Yunita Nurwulantari 11. Nallom Kurniawan 12. Irfan Nur Rachman 13. M. Mahrus Ali 14. M. Lutfi Chakim 15. Rosalia Agustin Shella H. 16. Sharfina Sabila 17. Rizkysyabana Yulistyaputri 18. Intan Permata Putri 19. Luthfi Widagdo Eddyono 20. Supriyanto 21. Aditya Yuniarti

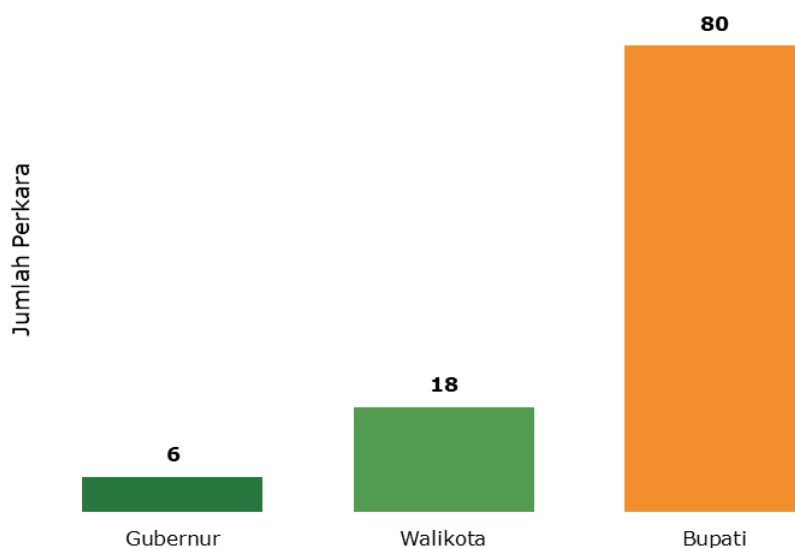
Perkara yang dialokasikan untuk Panel I sebanyak 103 perkara yang terdiri dari 8 perkara PHP Gubernur, 14 perkara PHP Walikota, dan 81 perkara PHP Bupati.



Gambar 17. Jumlah Perkara PHPUKADA Panel I Menurut Klasifikasi Kepala Daerah

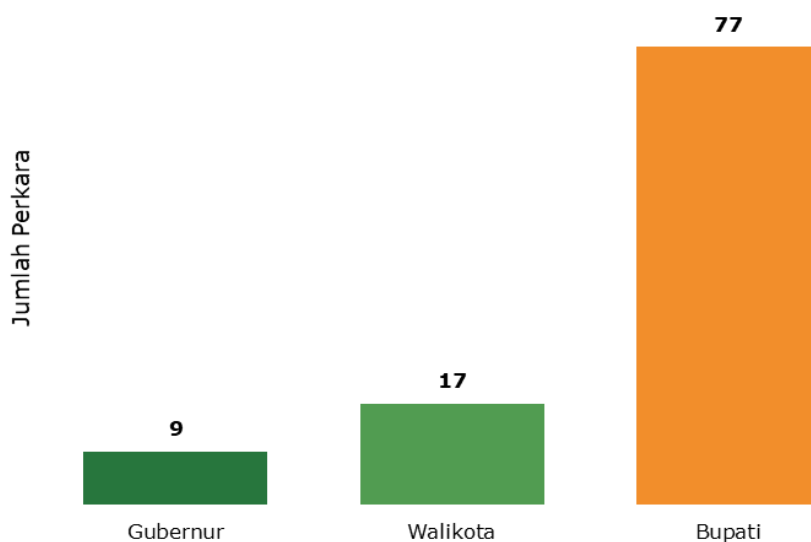
Perkara yang dialokasikan untuk Panel II sebanyak 104 perkara yang terdiri dari 6 perkara PHP Gubernur, 18 perkara PHP Walikota, dan 80 perkara PHP Bupati.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Gambar 18. Jumlah Perkara PHPUKADA Panel II Menurut Klasifikasi Kepala Daerah

Perkara yang dialokasikan untuk Panel III sebanyak 103 perkara yang terdiri dari 9 perkara PHP Gubernur, 17 perkara PHP Walikota, dan 77 perkara PHP Bupati.

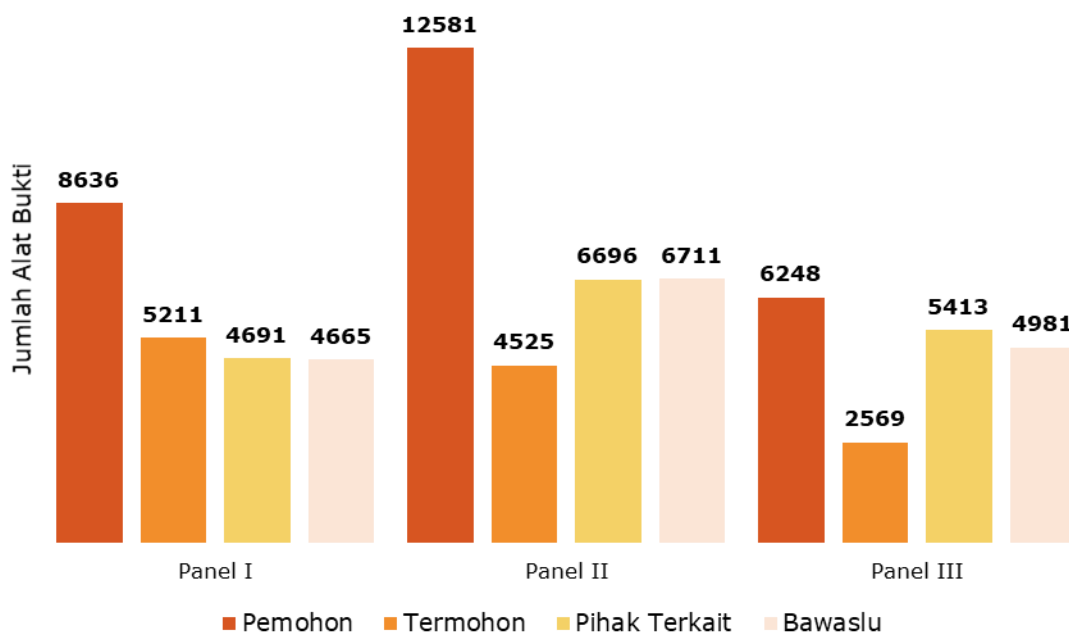


Gambar 19. Jumlah Perkara PHPUKADA Panel III Menurut Klasifikasi Kepala Daerah



3.2.2 Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah alat bukti yang bersumber dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu. Secara total terdapat 72.927 alat bukti yang terdiri dari 23.203 alat bukti untuk Panel I, 30.513 alat bukti untuk Panel II, dan 19.211 alat bukti untuk Panel III. Rincian alat bukti pada masing-masing panel dapat dilihat pada Gambar 20. Pada Panel I terdapat 8.636 alat bukti dari Pemohon, 5.211 alat bukti dari Termohon, 4.691 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 4.665 alat bukti dari Bawaslu. Sedangkan pada Panel II terdapat 12.581 alat bukti dari Pemohon, 4.525 alat bukti dari Termohon, 6.696 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 6.711 alat bukti dari Bawaslu. Sementara itu, pada Panel III terdapat 6.248 alat bukti dari Pemohon, 2.569 alat bukti dari Termohon, 5.413 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 4.981 alat bukti dari Bawaslu.



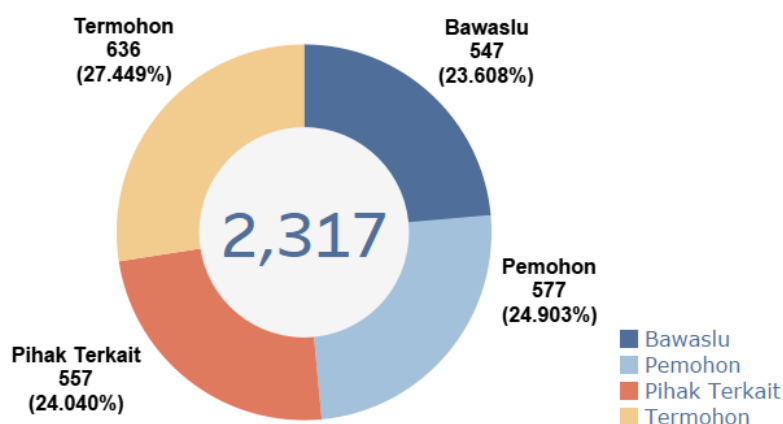
Gambar 20. Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Menurut Panel Sidang dan Klasifikasi Para Pihak

3.2.3 Sidang Pendahuluan

Masing-masing Panel Sidang melaksanakan sidang pendahuluan pada 8 Januari 2025 sampai dengan 16 Januari 2025 di Ruang Sidang Pleno (Panel 1) dan Ruang Sidang Panel I

(Panel 2) serta di Ruang Sidang Panel II (Panel 3) yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon (KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Pihak Terkait (Pasangan Calon dengan Perolehan Suara Terbanyak) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Agenda Sidang Panel Pendahuluan adalah mendengarkan penjelasan permohonan pemohon dan perbaikannya serta pengesahan alat bukti dari pemohon.

Pihak yang hadir dalam sidang pendahuluan ini sebanyak 2.317 orang yang terdiri dari 577 orang Pemohon dan kuasa hukumnya (24,90%), 636 orang Termohon dan kuasa hukumnya (27,45%), 557 orang Pihak Terkait dan kuasa hukumnya (24,04%), serta 547 orang dari Bawaslu (23,61%). Meskipun demikian, terdapat 14 pemohon maupun kuasanya yang tidak hadir dalam persidangan. Adapun rincian kehadiran para pihak di setiap perkara disajikan dalam Lampiran.



Gambar 21. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pendahuluan Menurut Klasifikasi Para Pihak

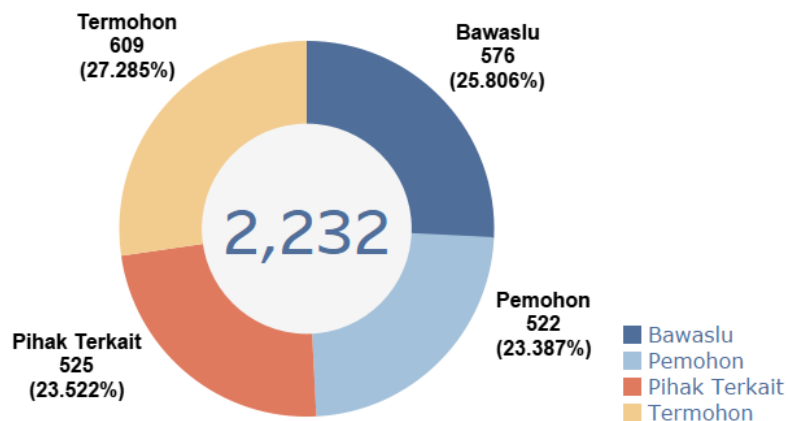
3.2.4 Pemeriksaan Persidangan Tahap 1

Sidang Panel Pemeriksaan Persidangan Tahap 1 dilaksanakan oleh masing-masing panel pada 17 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025 dengan agenda (1) mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, dan perbaikan jawaban/keterangannya (2) pengesahan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota serta tambahan alat bukti dari Pemohon. Persidangan dihadiri oleh para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau kuasa hukumnya.



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Pihak yang hadir dalam pemeriksaan persidangan tahap 1 ini sebanyak 2.232 orang yang terdiri dari 522 orang Pemohon dan kuasa hukumnya (23,39%), 609 orang Termohon dan kuasa hukumnya (27,28%), 525 orang Pihak Terkait dan kuasa hukumnya (23,52%), serta 576 orang dari Bawaslu (25,81%). Adapun rincian kehadiran para pihak di setiap perkara disajikan dalam Lampiran.



Gambar 22. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak

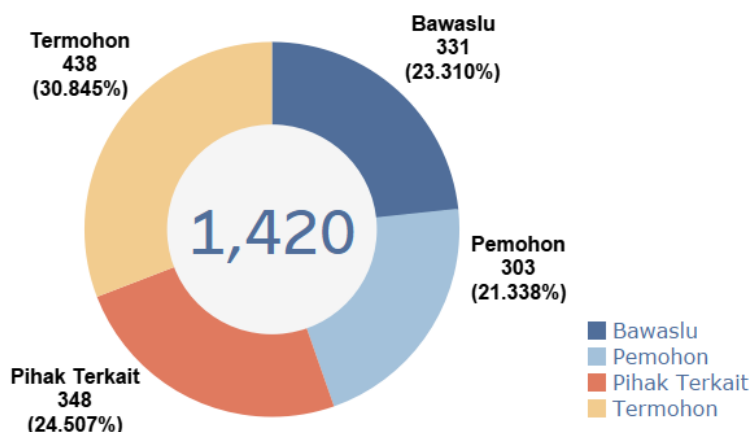
Setelah menyelesaikan sidang pendahuluan dan pemeriksaan persidangan tahap 1, masing-masing Hakim Panel menyelenggarakan rapat hakim panel untuk membahas perkara-perkara yang ditangani masing-masing panel hakim sebelum dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

3.2.5 Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1

Pada 4 dan 5 Februari 2025, bertempat di ruangan sidang pleno Mahkamah Konstitusi, diselenggarakan Sidang Pleno Hakim Konstitusi Tahap 1, dengan agenda pengucapan putusan atau penetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Sidang pleno ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau kuasa hukumnya.

Pihak yang hadir dalam sidang pleno pengucapan putusan tahap 1 ini sebanyak 1.420 orang yang terdiri dari 303 orang Pemohon dan kuasa hukumnya (21,39%), 438 orang Termohon dan kuasa hukumnya (30,84%), 348 orang Pihak Terkait dan kuasa hukumnya (24,51%), serta 331 orang

dari Bawaslu (23,31%). Adapun rincian kehadiran para pihak di setiap perkara disajikan dalam Lampiran.



Gambar 23. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak

Dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum ini, telah diucapkan putusan atas 227 perkara dan ketetapan atas 43 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024. Putusan dan ketetapan dimaksud, selengkapnya dapat dilihat pada BAB IV.

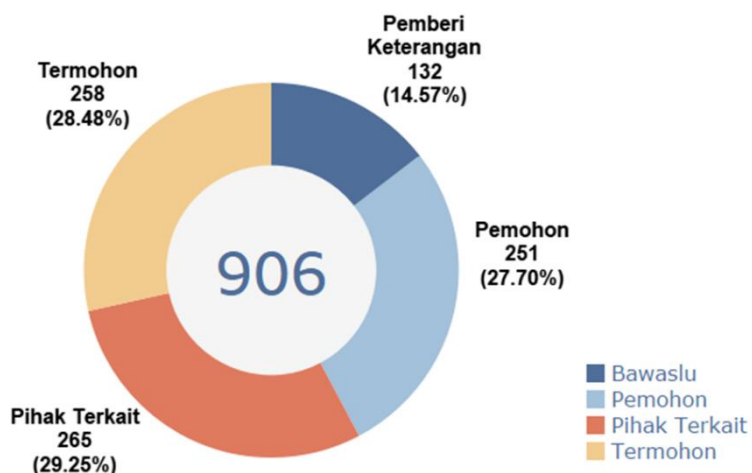
3.2.6 Pemeriksaan Persidangan Tahap 2

Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 dilaksanakan pada 7 Februari 2025 sampai dengan 17 Februari 2025 dengan agenda pembuktian oleh para pihak, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli, atas 40 perkara yang menurut Mahkamah Konstitusi, secara kumulatif memenuhi seluruh persyaratan formal dan/atau terdapat pertimbangan lain dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya.

Pihak yang hadir dalam pemeriksaan persidangan tahap 2 ini sebanyak 906 orang yang terdiri dari 251 orang Pemohon beserta saksi/ahli dan kuasa hukumnya (27,70%), 258 orang Termohon beserta saksi/ahli dan kuasa hukumnya (28,48%), 265 orang Pihak Terkait beserta saksi/ahli dan kuasa hukumnya (29,25%), serta 132 orang dari Pemberi Keterangan yaitu Bawaslu dan Non Bawaslu (14,57%). Adapun rincian kehadiran para pihak di setiap perkara disajikan dalam Lampiran.



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

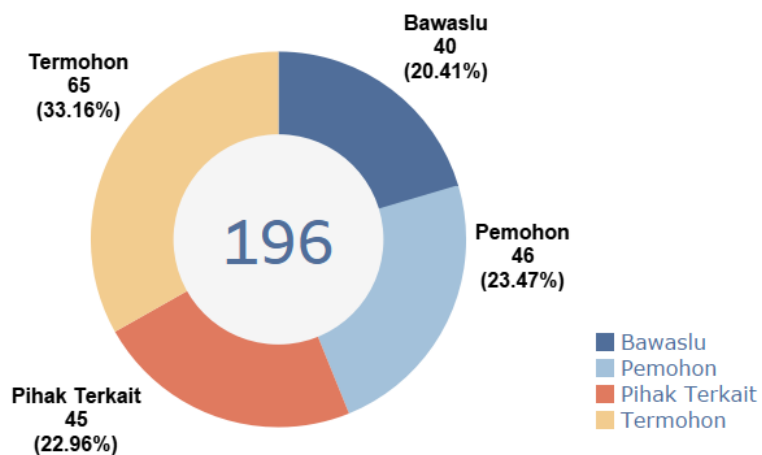


Gambar 24. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak

3.2.7 Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2

Pada 24 Februari 2025, bertempat di ruangan sidang pleno Mahkamah Konstitusi, diselenggarakan Sidang Pleno Hakim Konstitusi Tahap 2, dengan agenda pengucapan putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Sidang pleno ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau kuasa hukumnya.

Pihak yang hadir dalam sidang pleno pengucapan putusan tahap 2 ini sebanyak 196 orang yang terdiri dari 46 orang Pemohon dan kuasa hukumnya (23,47%), 65 orang Termohon dan kuasa hukumnya (33,16%), 45 orang Pihak Terkait dan kuasa hukumnya (22,96%), serta 40 orang dari Bawaslu (20,41%). Adapun rincian kehadiran para pihak di setiap perkara disajikan dalam Lampiran.



Gambar 25. Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak

Dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum ini, telah diucapkan putusan atas 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024. Putusan selengkapnya dapat dilihat pada BAB IV.



BAB IV
PUTUSAN DAN KETETAPAN

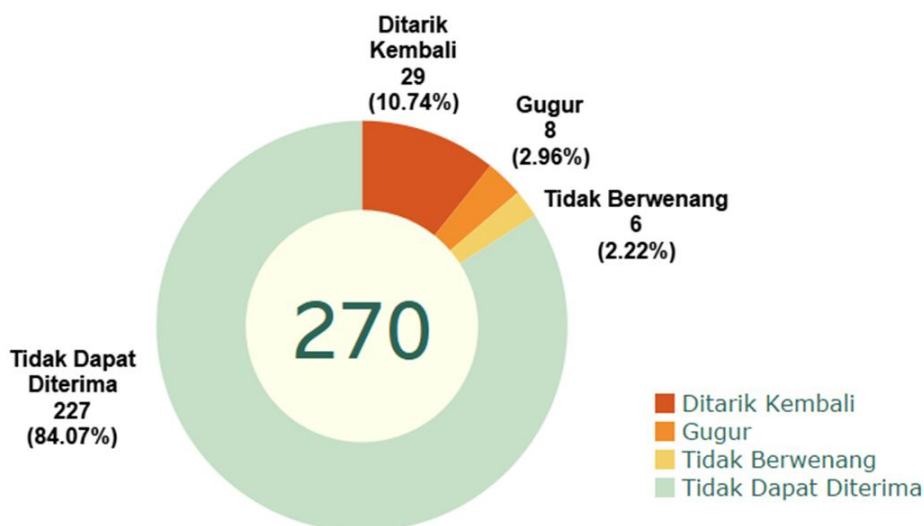




BAB IV PUTUSAN DAN KETETAPAN

Pada 4 dan 5 Februari 2025 melalui sidang pleno yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Tahap 1, dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum ini, telah diputus sebanyak 270 perkara dengan rincian 227 putusan dan 43 ketetapan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024.

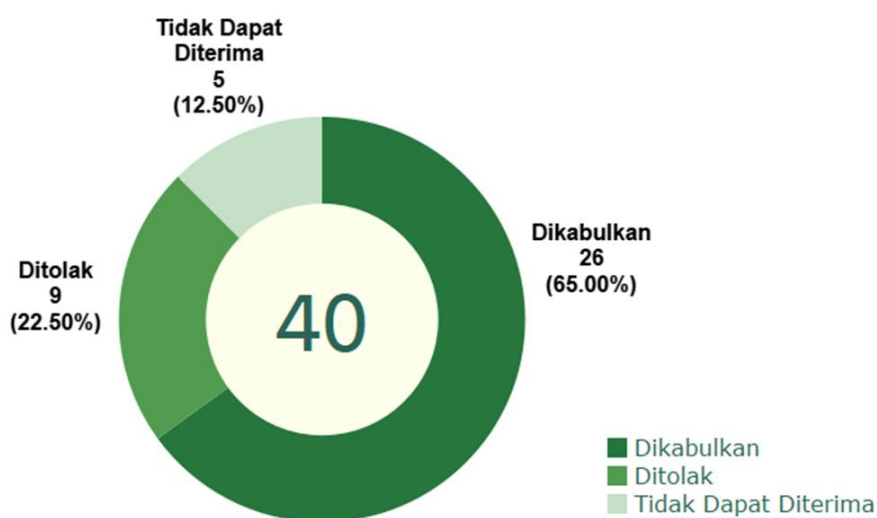
Berdasarkan putusan dan ketetapan Mahkamah Konstitusi, dari 270 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebanyak 227 perkara (84,07%) tidak dapat diterima, 29 perkara (10,74%) ditarik kembali oleh Pemohon, 6 perkara (2,22%) tidak berwenang, dan 8 perkara (2,96%) gugur.



Gambar 26. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Tahap 1 Menurut Amar Putusan

Selanjutnya, pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pleno pembacaan putusan Tahap 2, dengan agenda pengucapan putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, diputus sebanyak

40 perkara atas Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dari 40 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebanyak 26 Perkara (65%) dikabulkan, 9 perkara (22%) ditolak, dan tidak dapat diterima sebanyak 5 perkara (13%). Adapun dari putusan tersebut untuk perkara yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian terdapat perintah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang untuk 13 perkara, penghitungan suara ulang 1 perkara, perbaikan Keputusan KPUD 1 perkara, serta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang 11 perkara.

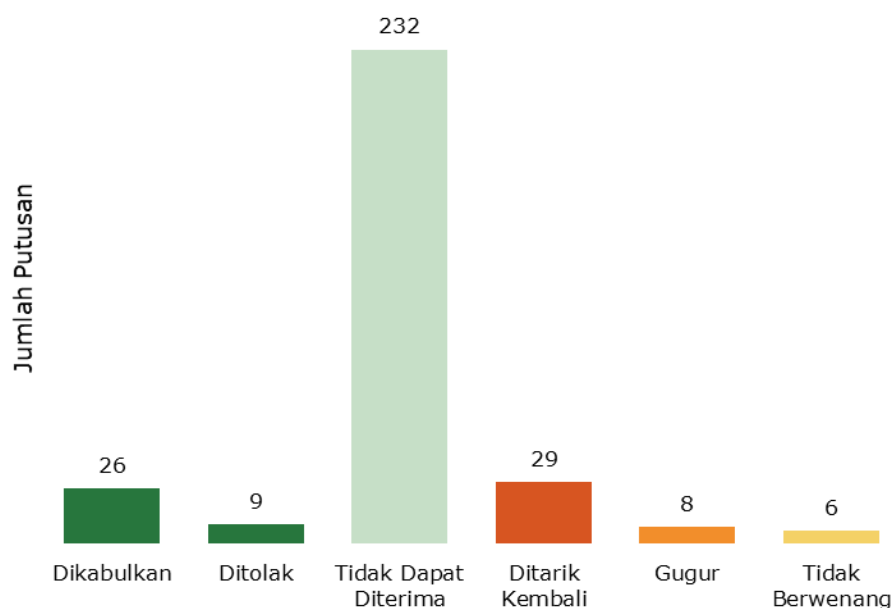


Gambar 27. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Tahap 2 Menurut Amar Putusan

Berdasarkan Gambar 28, putusan pada 4-5 Februari dan 24 Februari 2025 untuk keseluruhan perkara PHPUKADA yang telah diputus adalah sebanyak 310 putusan. Sebanyak 26 perkara (8,4%) yang diputus dikabulkan, 9 perkara (2,9%) ditolak, 232 perkara (74,8%) tidak dapat diterima, 29 perkara (9,4%) ditarik kembali, 8 perkara (2,8%) gugur, dan 6 perkara (1,9%) tidak berwenang.



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Gambar 28. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Menurut Amar Putusan

1.1 Putusan Tahap 1 (pada 4 – 5 Februari 2025)

1.1.1 Pertimbangan Hukum dan Pendapat Mahkamah

Terdapat dua hal penting sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan fundamental dalam pengambilan putusan terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2024.

Pertama, perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024, *kedua*, perihal keberlakuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan



mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.” Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan.

Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir.

Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

b. Keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016

Menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan bagi peserta pemilihan untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Pembatasan dimaksud logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon serta untuk mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan membuat rumusan norma undang-undang dimana seseorang yang ikut serta dalam kontenstasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Tanpa mengenyampingkan hal tersebut, Mahkamah Konsitusi mencermati secara saksama setiap dalil permohonan terhadap kondisi/keadaan yang bersifat spesifik dan khusus yang dalam penalaran wajar dapat memengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2021 telah berpendirian dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, bahkan dapat pula menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, perihal Perselihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021].

Dalam konteks terdapatnya kondisi/keadaan yang bersifat spesifik dan khusus, misalkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *in casu* pemenuhan persyaratan Calon. Penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kondisi/keadaan yang bersifat spesifik dan khusus tersebut dapat menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (5) termasuk Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap

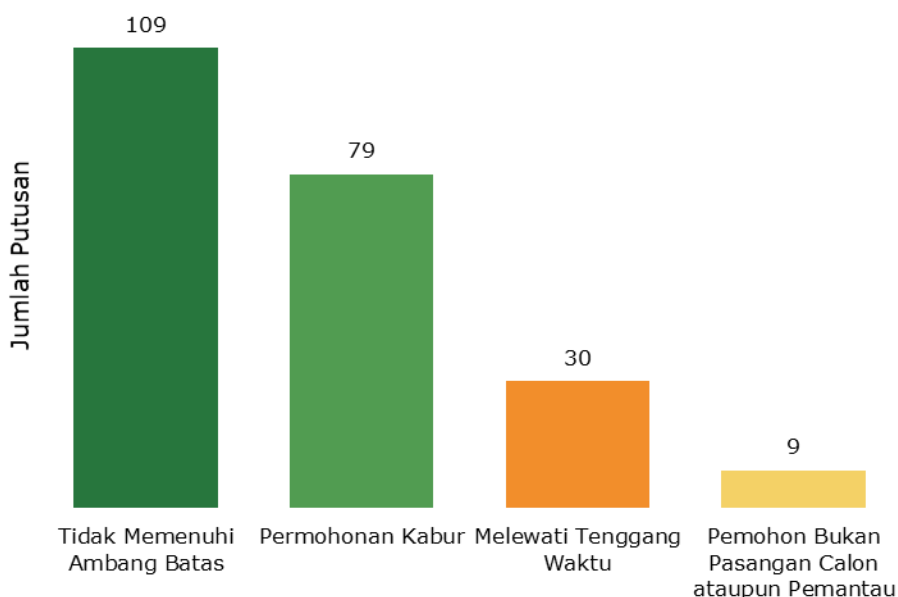


perkara yang ditangani dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

1.1.2 Amar Putusan

a. Permohonan Tidak Dapat Diterima

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan terhadap 227 perkara PemiluKada secara serentak tahun 2024 dengan amar putusan “Permohonan Tidak Dapat Diterima”, dengan rincian, 30 perkara yang permohonannya melewati tenggang waktu pengajuan, 9 perkara yang permohonannya bukan dari pasangan calon atau bukan pemantau, 79 perkara yang permohonannya kabur, dan 109 perkara yang tidak memenuhi ambang batas Pasal 158.



Gambar 29. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Tahap 1 Menurut Alasan Tidak Dapat Diterima

Apabila data permohonan awal (telah registrasi) dengan data setelah putusan dibandingkan, terdapat beberapa perbedaan yang mungkin terjadi. Misalnya, permohonan yang pada saat registrasi termasuk sebagai permohonan yang memenuhi tenggang waktu pengajuan, hal ini dapat mengalami perubahan menjadi melewati tenggang waktu pengajuan berdasarkan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan atau

peninjauan pada dokumen putusan apabila terjadi kemungkinan perubahan selama masa persidangan.

a.1. Permohonan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan

Mahkamah Konstitusi telah memutus 30 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024 dengan amar putusan “Tidak Dapat Diterima” yang berdasarkan pertimbangan dan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, pengajuan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak KPUD mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Pada saat data permohonan awal (telah registrasi) dengan data setelah putusan dibandingkan, terdapat perbedaan yang terjadi pada perkara nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Kabupaten Sumenep dalam hal pemenuhan persyaratan formal tenggang waktu pengajuan permohonan perkara. Berdasarkan pada data yang tercatat pada saat registrasi perkara, perkara tersebut tercatat dengan SK KPUD Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada 10 Desember 2024. Pemohon beranggapan bahwa penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627 adalah 6 Desember 2024. Akan tetapi, hal tersebut dibuktikan pada persidangan oleh termohon bahwa termohon telah menetapkan dan sekaligus mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, yakni pada tanggal 5 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat adalah tanggal 9 Desember 2024. Dengan ini, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan perkara nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Kabupaten Sumenep diajukan telah melewati tenggang waktu.



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

a.2. Permohonan Bukan dari Paslon Kepala Daerah atau Bukan Pemantau

Terdapat 9 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024 dari daerah pemilihan dengan pasangan calon tunggal (1 pasangan calon) yang menurut pertimbangan dan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, diajukan oleh Pemohon yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena pemohon Bukan Pasangan Calon Peserta Pemilihan ataupun Bukan Pemantau Pemilihan yang Terdaftar dan Terakreditasi di KPU.

Pada saat data permohonan awal (telah registrasi) dengan data setelah putusan dibandingkan, terdapat perbedaan yang terjadi pada perkara nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Kabupaten Bogor dan 122/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Kabupaten Halmahera Utara dalam hal pemenuhan persyaratan formal pengajuan permohonan perkara oleh Pasangan Calon Kepala Daerah. Perkara nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 semula diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Akan tetapi, telah dikonfirmasi dalam persidangan bahwa terdapat penarikan permohonan yang dilakukan oleh calon bupati, sehingga secara formal permohonan hanya diajukan oleh calon wakil bupati. Dengan demikian, tidak memenuhi syarat formal permohonan sesuai PMK 3 tahun 2024 pasal 22. Sementara itu, perkara nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025 semula diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Namun, sampai dengan digelarnya persidangan, pemohon tidak menyerahkan alat bukti yang sah dan daftar alat bukti. Dengan demikian, hal ini tidak memenuhi ketentuan PMK 3 tahun 2024 terutama asas *actori incumbit onus probandi*, yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”.

a.3. Permohonan Kabur

Terdapat 79 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak tahun 2024 yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi permohonannya kabur. Secara rinci untuk permohonan kabur berdasarkan panel adalah untuk Panel I sebanyak 16 perkara, Panel II sebanyak 37 perkara, dan Panel III sebanyak 26 perkara.

a.4. Permohonan Tidak Memenuhi Ambang Batas Pasal 158

Terdapat 109 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024, yang menurut pertimbangan dan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, diajukan oleh Pemohon yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) melampaui ambang batas selisih perolehan suara.

1.2 Ketetapan

1.2.1 Mahkamah Tidak Berwenang

Terdapat 6 (enam) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024 yang menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, obyek permohonannya bukan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga obyek permohonannya salah (*error in objecto*) dan/atau obyek permohonan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk perkara Nomor 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025, obyek yang dimohonkan bukan Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Langsa tetapi terkait Keputusan KIP Kota Langsa soal penetapan pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Langsa. Begitu juga untuk perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim, obyek yang disengketakan bukan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat melainkan Keputusan KPU Nomor 1311 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Hal senada juga terjadi pada perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025, obyek yang disengketakan terkait dengan pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

Pada perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Mohamad Lutfi dan Dia Ramayana, obyek yang dimohonkan juga bukan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tetapi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024. Begitu pula pada perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan menjadi obyek sengketa adalah Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 00.10 WIT.

1.2.2 Permohonan Ditarik Kembali

Terdapat 29 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024 yang ditarik kembali oleh Pemohonnya dan menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi penarikan kembali permohonan dimaksud beralasan hukum. Dari 29 perkara tersebut, 19 perkara pemilihan bupati/wakil bupati, 6 perkara walikota/wakil walikota, dan 4 perkara gubernur/wakil gubernur.

1.2.3 Pemohonan Gugur

Terdapat 8 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2024 yang Pemohonnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan setelah dipanggil secara sah oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengajukan permohonannya sehingga permohonan dinyatakan “Gugur”.

1.3 Putusan Tahap 2 (pada 24 Februari 2025)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dari 40 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebanyak 26 Perkara (65%) dikabulkan, 9 perkara (22%) ditolak, dan tidak dapat diterima



sebanyak 5 perkara (13%). Adapun dari putusan tersebut untuk perkara yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian terdapat perintah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang untuk 13 perkara, penghitungan suara ulang 1 perkara, perbaikan Keputusan KPUD 1 perkara, dan diskualifikasi dan pemungutan suara ulang 11 perkara.

BAB V
PUTUSAN PASCA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG



BAB V PUTUSAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2025, 24 dari 26 perkara yang dikabulkan mendapat perintah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Sementara itu, 2 perkara lainnya terdiri dari 1 putusan yang memerintahkan untuk menyelenggarakan rekapitulasi suara ulang dan 1 putusan lainnya memerintahkan untuk melakukan perbaikan diktum SK KPU. Setelah berlangsungnya pemungutan suara ulang pada 24 daerah dan rekapitulasi suara ulang pada 1 daerah tersebut, sebanyak 15 daerah mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Pemungutan Suara Ulang ke Mahkamah Konstitusi.

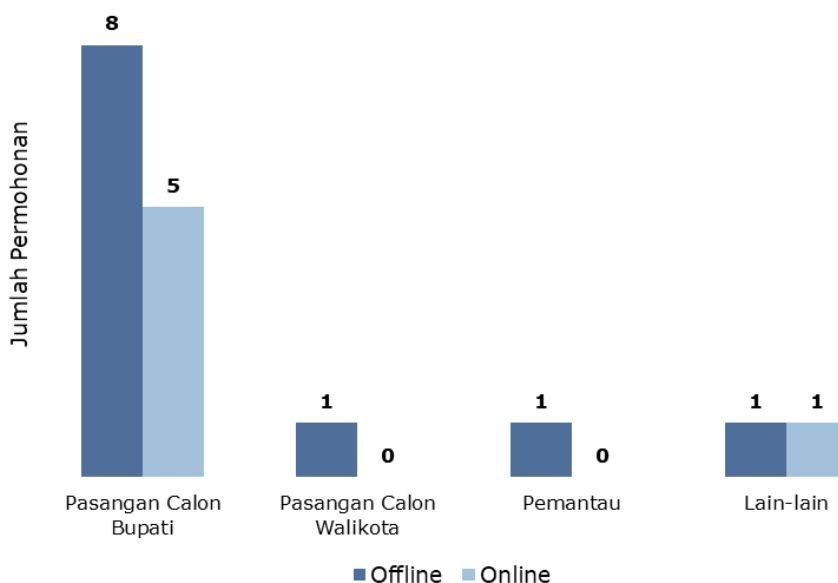
Dari 15 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, terdapat 14 permohonan untuk 13 daerah pemilihan kabupaten dan 3 permohonan untuk 2 daerah pemilihan kota. Dengan demikian, total permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Pemungutan Suara Ulang yang tercatat sebanyak 17 permohonan.

Tabel 5. Jumlah Daerah yang Mengajukan Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Daerah Pemilihan dan Banyak Permohonan

No.	Jumlah Permohonan	Daerah Pemilihan			Jumlah
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
1	1 Permohonan	0	12	1	13
2	2 Permohonan	0	1	1	2
Jumlah		0	13	2	15

Dilihat berdasarkan latar belakang pemohon, dari 17 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, 8 permohonan (47,06%) diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara *offline*, 5 permohonan (29,41%) diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara *online*, 1 permohonan (5,88%) diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara *offline*, 1 permohonan (5,88%) diajukan oleh Pemantau secara *offline*, 1 permohonan (5,88%) diajukan oleh lain-lain

(bukan calon) secara *offline*, dan 1 permohonan (5,88%) diajukan oleh lain-lain (bukan pasangan calon) secara *online*.



Gambar 30. Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Jenis Pemohon dan Prosedur Pengajuan Permohonan

5.1 Registrasi Permohonan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, setelah melalui tahapan penelitian kelengkapan berkas dan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (HPKP3), pada 21 April 2025 dari 7 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terdapat sebanyak 7 permohonan yang secara serentak diregistrasi dalam e-BRPK oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada 7 Mei 2025 kembali dilakukan registrasi secara serentak dalam e-BRPK sebanyak 7 permohonan dari 7 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian,



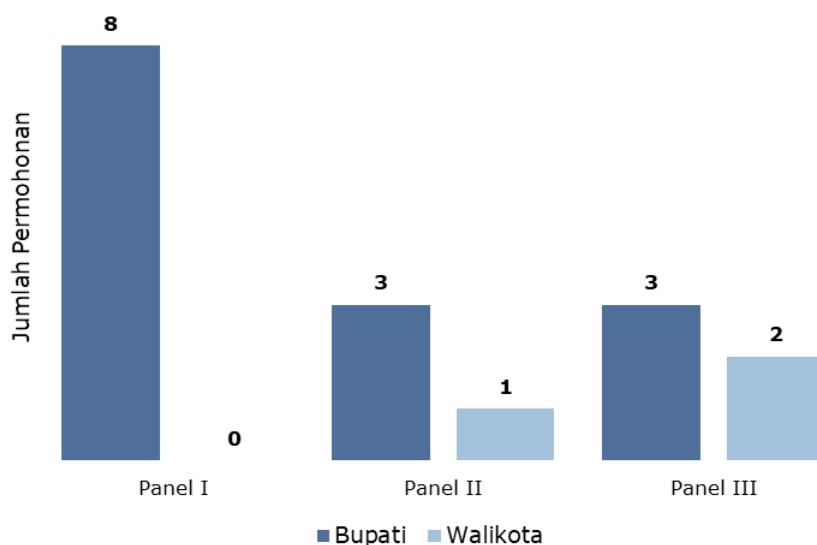
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada 11 Juni 2025 kembali dilakukan registrasi secara serentak dalam e-BRPK sebanyak 3 permohonan dari 3 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan ini, total perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah sebanyak 17 perkara.

5.2 Pemeriksaan Dan Persidangan Perkara

5.2.1 Panel Pemeriksaan dan Persidangan

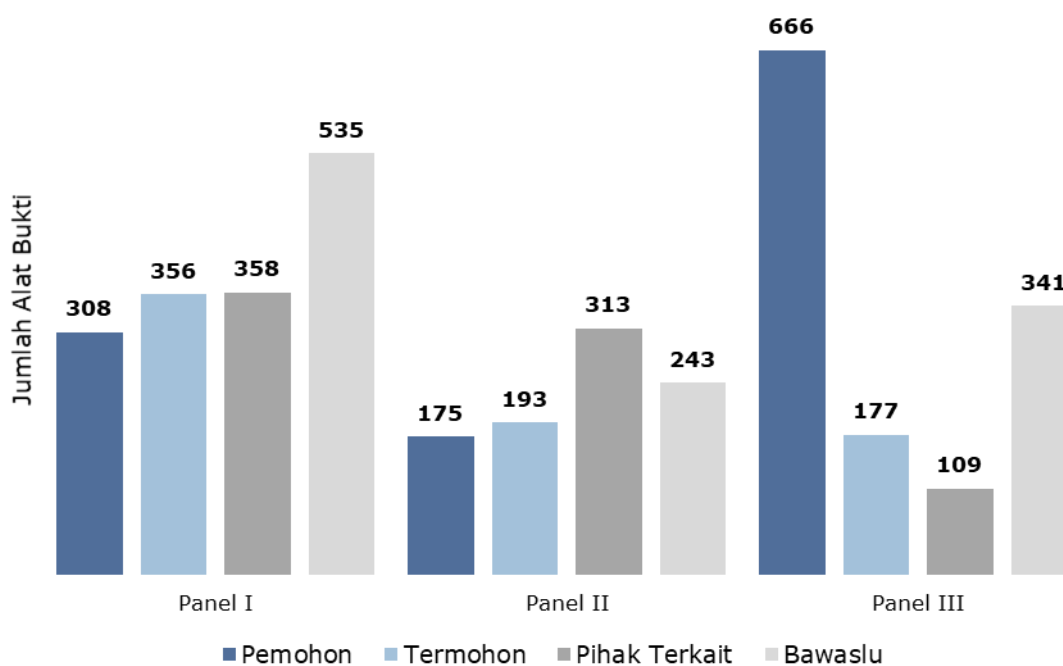
Dalam menangani 17 perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang, terdapat sebanyak 8 perkara yang dialokasikan untuk Panel I. Semua perkara tersebut merupakan perkara PHP Bupati. Adapun perkara yang dialokasikan untuk Panel II sebanyak 4 perkara yang terdiri dari 3 perkara PHP Bupati dan 1 perkara PHP Walikota. Sementara itu, perkara yang dialokasikan untuk Panel III sebanyak 5 perkara yang terdiri dari 3 perkara PHP Bupati dan 2 perkara PHP Walikota.



Gambar 31. Jumlah Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Panel dan Klasifikasi Kepala Daerah

5.2.2 Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Pemungutan Suara Ulang adalah alat bukti yang bersumber dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu. Secara total terdapat 3.774 alat bukti yang terdiri dari 1.557 alat bukti untuk Panel I, 924 alat bukti untuk Panel II, dan 1.293 alat bukti untuk Panel III. Rincian alat bukti pada masing-masing panel dapat dilihat pada Gambar 32. Pada Panel I terdapat 308 alat bukti dari Pemohon, 356 alat bukti dari Termohon, 358 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 535 alat bukti dari Bawaslu. Sedangkan pada Panel II terdapat 175 alat bukti dari Pemohon, 193 alat bukti dari Termohon, 313 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 243 alat bukti dari Bawaslu. Sementara itu, pada Panel III terdapat 666 alat bukti dari Pemohon, 177 alat bukti dari Termohon, 109 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 341 alat bukti dari Bawaslu.



Gambar 32. Jumlah Alat Bukti Perkara PPHUKADA Pasca PSU Menurut Panel Sidang dan Klasifikasi Para Pihak

5.2.3 Sidang Pendahuluan

Masing-masing Panel Sidang melaksanakan sidang pendahuluan pada 25 April 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 21 April 2025, 15 Mei 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 7



Mei 2025, dan 17 Juni 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 11 Juni 2025 di Ruang Sidang Pleno (Panel 1), Ruang Sidang Panel I (Panel 2) serta di Ruang Sidang Panel II (Panel 3) yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon (KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Pihak Terkait (Pasangan Calon dengan Perolehan Suara Terbanyak) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Agenda Sidang Panel Pendahuluan adalah mendengarkan penjelasan permohonan pemohon dan perbaikannya serta pengesahan alat bukti dari pemohon.

5.2.4 Pemeriksaan Persidangan Tahap 1

Sidang Panel Pemeriksaan Persidangan Tahap 1 dilaksanakan oleh masing-masing panel pada 29 April 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 21 April 2025, 20 Mei 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 7 Mei 2025, dan 20 Juni 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 11 Juni 2025 dengan agenda (1) mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, dan perbaikan jawaban/keterangannya (2) pengesahan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota serta tambahan alat bukti dari Pemohon. Persidangan dihadiri oleh para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau kuasa hukumnya.

Setelah menyelesaikan sidang pendahuluan dan pemeriksaan persidangan tahap 1, masing-masing Hakim Panel menyelenggarakan rapat hakim panel untuk membahas perkara-perkara yang ditangani masing-masing panel hakim sebelum dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

5.2.5 Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1

Pada 5 Mei 2025, 26 Mei 2025, dan 26 Juni 2025, bertempat di ruangan sidang pleno Mahkamah Konstitusi, diselenggarakan Sidang Pleno Hakim Konstitusi Tahap 1, dengan agenda pengucapan putusan atau ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024. Sidang pleno ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau kuasa hukumnya.

Dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum ini, telah diucapkan putusan atas 5 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 pada 5 Mei 2025, putusan atas 7 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 pada 26 Mei 2025, dan putusan atas 1 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 pada 26 Juni 2025. Dengan demikian, untuk perkara yang diregistrasi pada 21 April 2025, hanya terdapat 2 perkara yang dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan Tahap 2. Kedua perkara tersebut yaitu perkara nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 317/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kemudian, untuk perkara yang diregistrasi pada 7 Mei 2025, tidak terdapat perkara yang dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan Tahap 2. Sementara itu, untuk perkara yang diregistrasi pada 11 Juni 2025, juga terdapat 2 perkara yang dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan Tahap 2. Kedua perkara tersebut yaitu perkara nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 327/PHPU.BUP-XXIII/2025.

5.2.6 Pemeriksaan Persidangan Tahap 2

Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 dilaksanakan pada 8 Mei 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 21 April 2025 serta 2 dan 4 Juli 2025 untuk perkara yang diregistrasi pada 11 Juni 2025 dengan agenda pembuktian oleh para pihak, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli, atas perkara nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, 317/PHPU.BUP-XXIII/2025, 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dan 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menurut Mahkamah Konstitusi, secara kumulatif memenuhi seluruh persyaratan formal dan/atau terdapat pertimbangan lain dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya.

5.2.7 Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2

Sidang Pleno Hakim Konstitusi Tahap 2 diselenggarakan di ruangan sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan putusan perkara nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada 14 Mei 2025 dan putusan perkara nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada tanggal 8 Juli 2025. Sidang



pleno ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau kuasa hukumnya.

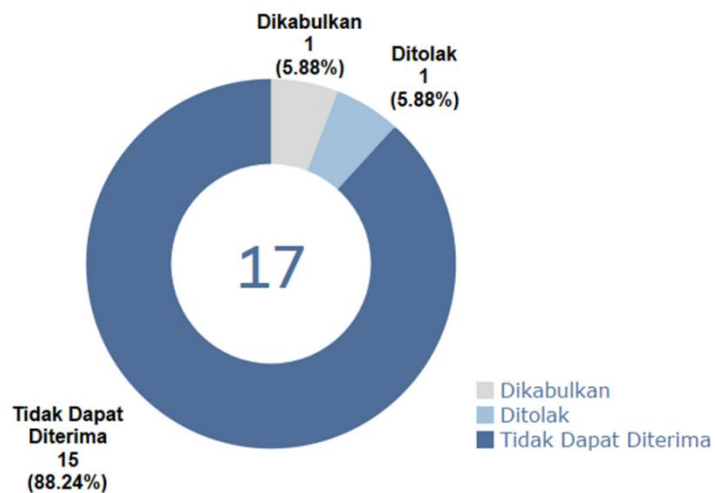
5.3 Putusan

Pada 5 Mei 2025, 26 Mei 2025, 26 Juni 2025 melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Tahap 1, dengan agenda pengucapan putusan dan penetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024, telah diputus sebanyak 13 perkara atas Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dari 13 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, semuanya tidak dapat diterima.

Selanjutnya, pada 14 Mei 2025 dan 8 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pleno pembacaan putusan Tahap 2, dengan agenda pengucapan putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024. Dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, diputus sebanyak 2 perkara atas Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 pada tanggal 14 Mei 2024. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dari 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 1 perkara dikabulkan sebagian dan 1 perkara ditolak. Adapun dari putusan tersebut untuk perkara yang dikabulkan sebagian, yaitu putusan perkara nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, terdapat perintah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Kemudian, pada tanggal 8 Juli 2025 diputus sebanyak 2 perkara atas Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024, yaitu perkara nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan amar putusan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Gambar 33, untuk keseluruhan perkara PHPUKADA Pasca PSU yang telah diputus adalah sebanyak 17 putusan. Terdapat 1 perkara (5,88%) yang dikabulkan, 15 perkara (88,24%) tidak dapat diterima, dan 1 perkara (5,88%) ditolak.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Gambar 33. Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut Amar Putusan



BAB VI
PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Sebagai lembaga peradilan yang berperan dalam menegakkan konstitusi dan menjaga demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan perannya dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKADA) tahun 2024 dengan prinsip independensi, transparansi, dan keadilan. Melalui proses persidangan yang objektif, berlandaskan konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah telah berupaya untuk memastikan bahwa setiap sengketa pilkada diselesaikan secara adil dan demokratis. Dengan demikian, diharapkan putusan Mahkamah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilihan serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi akan terus berkomitmen dalam menegakkan keadilan demi menjaga integritas dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia.

LAMPIRAN



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan yang Memenuhi Persyaratan Formal

No.	Daerah Pemilihan	Pemohon	Selisih Suara	Persentase Selisih Suara (%)	Batas Selisih Suara	Persentase Batas Selisih Suara (%)
1	Kabupaten Aceh Timur	Sulaiman dan Abdul Hamid	2.556	1,33	2.875	1,50
2	Kabupaten Banggai	Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang	2.253	1,06	3.197	1,50
3	Kabupaten Bangka Barat	Sukirman dan Bong Ming Ming	1.426	1,48	1.926	2
4	Kabupaten Barito Utara	Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya	8	0,01	1.692	2
5	Kabupaten Bengkulu Selatan	Rifai dan Yevri Sudianto	818	0,81	2.014	2
6	Kabupaten Berau	Madri Pani dan Agus Wahyudi	696	0,53	1.957	1,50
7	Kabupaten Bungo	Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat	1.124	0,59	2.860	1,50
8	Kabupaten Buru	Amus Besan dan Hamsah Buton	287	0,37	1.562	2
9	Kabupaten Buru	Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim	1.350	1,73	1.562	2
10	Kabupaten Buru Selatan	Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa	413	1,01	820	2
11	Kabupaten Buton Tengah	La Andi dan Abidin	586	1,06	1.101	2
12	Kabupaten Jeneponto	Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby	1.064	0,50	3.179	1,50
13	Kabupaten Kepulauan Talaud	Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo	745	1,29	1.153	2
14	Kabupaten Lamandau	Hendra Lesmana dan Budiman	1.115	1,98	1.128	2
15	Kabupaten Lanny Jaya	Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya	3.591	1,94	3.700	2
16	Kabupaten Lanny Jaya	Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya	3.591	1,94	3.700	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah Pemilihan	Pemohon	Selisih Suara	Persentase Selisih Suara (%)	Batas Selisih Suara	Persentase Batas Selisih Suara (%)
17	Kabupaten Magetan	Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa	1.264	0,31	4.047	1
18	Kabupaten Mandailing Natal	Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst	941	0,48	2.939	1,50
19	Kabupaten Murung Raya	Nuryakin dan Doni	318	0,51	1.252	2
20	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Iwan Hermawan dan M. Faisal Ranopa	2.714	1,25	3.267	1,50
21	Kabupaten Pasaman Barat	Daliyus K dan Heri Miheldi	2.430	1,33	2.745	1,50
22	Kabupaten Puncak	Peniel Waker dan Saulinus Murib	2.019	1,21	3.348	2
23	Kabupaten Seram Bagian Timur	Rohani Vanath dan Madja Rumatiga	628	0,75	1.680	2
24	Kabupaten Siak	Alfedri dan Husni Merza	224	0,11	3.036	1,50
25	Kota Palopo	Farid Kasim dan Nurhaenih	595	0,63	1.890	2
26	Kota Sabang	Ferdiansyah dan Muhammad Isa	114	0,52	439	2
27	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah	9.043	1,53	11.803	2
28	Provinsi Papua	Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen	7.193	1,35	10.655	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 2 Permohonan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
1	Kabupaten Alor	Immanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy	80,07	2	Sabtu 12/07/24 02:26 WIB	Senin 12/16/24 22:51 WIB
2	Kabupaten Asmat	Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing	30,02	2	Sabtu 12/07/24 18:38 WIB	Selasa 12/10/24 22:13 WIB
3	Kabupaten Bandung	Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan	11,69	0,50	Rabu 12/04/24 17:14 WIB	Jumat 12/06/24 17:36 WIB
4	Kabupaten Bandung Barat	Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman	12,84	0,50	Kamis 12/05/24 01:31 WIB	Senin 12/09/24 22:18 WIB
5	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sugianto dan Hery Ludong	4,07	2	Rabu 12/04/24 01:32 WIB	Jumat 12/06/24 21:58 WIB
6	Kabupaten Bangkalan	Mathur Husyairi dan Jayus Salam	20,34	0,50	Rabu 12/04/24 22:46 WIB	Jumat 12/06/24 11:19 WIB
7	Kabupaten Banjar	Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahasyim	67,69	1	Rabu 12/04/24 16:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:15 WIB
8	Kabupaten Banyuasin	Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam	20,30	1	Selasa 12/03/24 23:47 WIB	Kamis 12/05/24 15:08 WIB
9	Kabupaten Banyuwangi	Moh Ali Makki dan Ali Ruchi	4,21	0,50	Rabu 12/04/24 00:28 WIB	Jumat 12/06/24 23:09 WIB
10	Kabupaten Barito Selatan	Juana dan Tini Rusdihatie	6,14	2	Kamis 12/05/24 00:05 WIB	Kamis 12/12/24 00:16 WIB
11	Kabupaten Belitung Timur	Burhanudin dan Ali Reza Mahendra	31,72	2	Rabu 12/04/24 16:57 WIB	Jumat 12/06/24 21:22 WIB
12	Kabupaten Belu	Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere	11,95	2	Kamis 12/05/24 00:01 WIB	Jumat 12/06/24 21:13 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
13	Kabupaten Bengkulu Tengah	Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra	3,12	2	Jumat 12/06/24 03:03 WIB	Sabtu 12/07/24 21:56 WIB
14	Kabupaten Biak Numfor	Saint Benhur Mansandifu dan Yohan Anthon Kho	9,91	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 16:00 WIB
15	Kabupaten Bintan	Budi Prasetyo	36,59	2	Jumat 12/06/24 14:50 WIB	Selasa 12/10/24 16:47 WIB
16	Kabupaten Bireuen	Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin	23,34	1,50	Senin 12/02/24 17:45 WIB	Rabu 12/04/24 22:48 WIB
17	Kabupaten Bogor	R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	44,46	0,50	Kamis 12/05/24 21:11 WIB	Senin 12/09/24 20:02 WIB
18	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh	32,85	1,50	Selasa 12/03/24 20:00 WIB	Kamis 12/05/24 22:34 WIB
19	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Arsalan Makalalag dan Hartina S Badu	40,56	2	Minggu 12/01/24 17:00 WIB	Rabu 12/04/24 21:56 WIB
20	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sam Sachrul Mamonto dan Rusmin Mokoagow	4,19	2	Rabu 12/04/24 01:00 WIB	Jumat 12/06/24 21:44 WIB
21	Kabupaten Bondowoso	Bambang Soekwanto dan Moh Baqir	2,66	1	Rabu 12/04/24 17:35 WIB	Senin 12/09/24 14:54 WIB
22	Kabupaten Bone Bolango	Merlan S. Uloli dan Syamsu T. Botutihe	3,18	2	Rabu 12/04/24 15:58 WIB	Jumat 12/06/24 22:25 WIB
23	Kabupaten Boven Digoel	Yakob Weremba dan Suharto	21,61	2	Sabtu 12/07/24 04:34 WIB	Rabu 12/11/24 17:37 WIB
24	Kabupaten Boven Digoel	Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob	21,22	2	Sabtu 12/07/24 04:34 WIB	Rabu 12/11/24 20:37 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
25	Kabupaten Bulukumba	Jamaluddin M Syamsir dan Tomy Satria Yulianto	27,31	1,50	Rabu 12/04/24 15:06 WIB	Kamis 12/05/24 23:42 WIB
26	Kabupaten Buol	Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto	7,10	2	Selasa 12/03/24 11:12 WIB	Kamis 12/05/24 23:59 WIB
27	Kabupaten Buton	Syaraswati dan Rasyid Mangura	4,60	2	Rabu 12/04/24 06:00 WIB	Jumat 12/06/24 16:01 WIB
28	Kabupaten Buton Selatan	Aliadi dan La Ode Rusyamin	7,45	2	Rabu 12/04/24 00:32 WIB	Jumat 12/06/24 16:03 WIB
29	Kabupaten Buton Selatan	Hardodi dan La Ode Amiruddin	32,25	2	Rabu 12/04/24 00:32 WIB	Sabtu 12/07/24 12:30 WIB
30	Kabupaten Cianjur	Herman Suherman dan R.A Muhammad Solih Ibang	2,30	0,50	Jumat 12/06/24 14:30 WIB	Selasa 12/10/24 09:31 WIB
31	Kabupaten Cirebon	Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana	13,18	0,50	Kamis 12/05/24 00:23 WIB	Senin 12/09/24 19:47 WIB
32	Kabupaten Deiyai	Yan Ukago dan Stefanus Mote	15,01	2	Kamis 12/05/24 18:45 WIB	Senin 12/09/24 20:44 WIB
33	Kabupaten Deiyai	Yan Ukago dan Stefanus Mote	15,01	2	Kamis 12/05/24 18:45 WIB	Senin 12/09/24 22:47 WIB
34	Kabupaten Deli Serdang	M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung	20,24	0,50	Jumat 12/06/24 15:04 WIB	Senin 12/09/24 13:19 WIB
35	Kabupaten Dogiyai	Oskar Makai dan Yani Bobi	32,25	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:13 WIB
36	Kabupaten Dogiyai	Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki	19,25	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:18 WIB
37	Kabupaten Dogiyai	Otopianus P Tebai dan Angkian Goo	33,60	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 22:00 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
38	Kabupaten Donggala	Moh. Yasin dan Syafiah	6,82	1,50	Kamis 12/05/24 17:40 WIB	Senin 12/09/24 17:43 WIB
39	Kabupaten Empat Lawang	Ruli Margianto dan Anggi Aribowo	60,81	1,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 12:39 WIB
40	Kabupaten Empat Lawang	Budi Antoni Aljufri	60,81	1,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Kamis 12/05/24 14:15 WIB
41	Kabupaten Fak Fak	Saparuddin	54,34	2	Jumat 12/06/24 05:15 WIB	Minggu 12/08/24 20:38 WIB
42	Kabupaten Fak Fak	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	8,68	2	Jumat 12/06/24 05:15 WIB	Senin 12/09/24 21:22 WIB
43	Kabupaten Flores Timur	Y.A.T Lukman Riberu dan Zakarias Paun	3,49	1,50	Jumat 12/06/24 23:40 WIB	Selasa 12/10/24 14:57 WIB
44	Kabupaten Gorontalo Utara	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf	16,48	2	Rabu 12/04/24 14:30 WIB	Jumat 12/06/24 00:19 WIB
45	Kabupaten Gorontalo Utara	Ridwan Yasin dan Muksin Badar	48,19	2	Rabu 12/04/24 14:30 WIB	Jumat 12/06/24 03:34 WIB
46	Kabupaten Gresik	M. Ali Murtadlo	100,00	0,50	Rabu 12/04/24 02:18 WIB	Sabtu 12/07/24 00:13 WIB
47	Kabupaten Halmahera Barat	Dany Missy dan Iksan Husain	15,63	2	Jumat 12/06/24 00:10 WIB	Senin 12/09/24 23:18 WIB
48	Kabupaten Halmahera Barat	Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar	22,66	2	Jumat 12/06/24 00:10 WIB	Selasa 12/10/24 04:17 WIB
49	Kabupaten Halmahera Selatan	Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila	13,64	1,50	Rabu 12/04/24 00:01 WIB	Kamis 12/05/24 23:22 WIB
50	Kabupaten Halmahera Selatan	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	24,75	1,50	Rabu 12/04/24 00:01 WIB	Jumat 12/06/24 08:40 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
51	Kabupaten Halmahera Tengah	Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani	32,57	2	Jumat 12/06/24 00:05 WIB	Selasa 12/10/24 15:37 WIB
52	Kabupaten Halmahera Timur	Muhammad Farrel Adhitama dan Thaib Djalaluddin	17,82	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 00:42 WIB
53	Kabupaten Halmahera Utara	Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos	12,42	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 21:15 WIB
54	Kabupaten Halmahera Utara	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah	14,45	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 22:31 WIB
55	Kabupaten Halmahera Utara	Matheus Stefi Pasimanjeku dan Abdul Aziz Hakim	17,80	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 23:15 WIB
56	Kabupaten Humbang Hasundutan	Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite	4,19	2	Jumat 12/06/24 13:55 WIB	Selasa 12/10/24 21:17 WIB
57	Kabupaten Intan Jaya	Marten Tipagau dan Melianus Belau	14,83	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Selasa 12/17/24 21:30 WIB
58	Kabupaten Intan Jaya	Bernadus Kobogau dan Melianus Agimbau	22,12	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Rabu 12/18/24 22:56 WIB
59	Kabupaten Intan Jaya	Sarekat Demokrasi Indonesia	34,83	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Jumat 12/20/24 14:39 WIB
60	Kabupaten Intan Jaya	Apolos Bagau dan Tetairus Widigipa	18,90	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Selasa 12/31/24 14:24 WIB
61	Kabupaten Jayawijaya	Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi	6,35	1,50	Rabu 12/11/24 15:00 WIB	Jumat 12/13/24 17:15 WIB
62	Kabupaten Kaimana	Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada	3,00	2	Sabtu 12/07/24 23:15 WIB	Rabu 12/11/24 16:43 WIB
63	Kabupaten Kampar	Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra	1,79	1	Selasa 12/03/24 00:06 WIB	Kamis 12/05/24 16:14 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
64	Kabupaten Kapuas	Erlin Hardi dan Alberkat Yadi	3,13	1,50	Kamis 12/05/24 15:58 WIB	Senin 12/09/24 16:47 WIB
65	Kabupaten Kapuas	Muhammad Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin	4,54	1,50	Kamis 12/05/24 15:58 WIB	Senin 12/09/24 20:24 WIB
66	Kabupaten Keerom	Petrus Solossa dan Mustakim Hr.	20,53	2	Jumat 12/06/24 00:40 WIB	Selasa 12/10/24 19:11 WIB
67	Kabupaten Kepulauan Aru	Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh	21,22	2	Kamis 12/05/24 01:07 WIB	Jumat 12/06/24 13:16 WIB
68	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok	2,91	2	Jumat 12/06/24 19:36 WIB	Selasa 12/10/24 18:22 WIB
69	Kabupaten Kepulauan Selayar	Ady Ansar dan M. Suwadi	26,18	2	Kamis 12/05/24 00:06 WIB	Senin 12/09/24 17:15 WIB
70	Kabupaten Kepulauan Sula	Hendrata Thes dan Muhamad Natsir Sangadji	7,64	2	Sabtu 12/07/24 17:32 WIB	Selasa 12/10/24 19:07 WIB
71	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Melkianus Sairdeket dan Kelvin Keliduan	8,25	2	Kamis 12/05/24 14:29 WIB	Senin 12/09/24 16:33 WIB
72	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Adolof Bormasa dan Henrikus Serin	19,20	2	Kamis 12/05/24 14:29 WIB	Selasa 12/10/24 22:40 WIB
73	Kabupaten Kepulauan Yapen	Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi	51,11	2	Rabu 08/01/25 06:50 WIB	Selasa 12/10/24 09:48 WIB
74	Kabupaten Kepulauan Yapen	Welliam R Manderi dan Yohanes G Raubaba	24,22	2	Rabu 08/01/25 06:50 WIB	Rabu 12/11/24 23:23 WIB
75	Kabupaten Kerinci	Deri Mulyadi dan Aswanto	25,10	1,50	Rabu 12/04/24 13:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:13 WIB
76	Kabupaten Kerinci	Darmadi dan Darifus	29,02	1,50	Rabu 12/04/24 13:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:27 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
77	Kabupaten Kerinci	Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan	34,14	1,50	Rabu 12/04/24 13:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:41 WIB
78	Kabupaten Klaten	W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan	42,83	0,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Kamis 12/05/24 12:37 WIB
79	Kabupaten Kolaka Utara	Sumarling dan Timber	2,28	2	Jumat 12/06/24 00:10 WIB	Senin 12/09/24 13:20 WIB
80	Kabupaten Konawe Kepulauan	Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	22,18	2	Rabu 12/04/24 15:43 WIB	Minggu 12/08/24 20:25 WIB
81	Kabupaten Konawe Selatan	Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke	7,03	1,50	Rabu 12/04/24 00:06 WIB	Jumat 12/06/24 16:01 WIB
82	Kabupaten Konawe Utara	Sudiro dan Raup	5,49	2	Selasa 12/03/24 01:43 WIB	Kamis 12/05/24 22:55 WIB
83	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sanidin dan Siyono	4,21	1,50	Kamis 12/05/24 20:00 WIB	Senin 12/09/24 17:16 WIB
84	Kabupaten Kuantan Singingi	Adam dan Sutoyo	24,20	1,50	Selasa 12/03/24 09:00 WIB	Kamis 12/05/24 11:55 WIB
85	Kabupaten Kutai Kartanegara	Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais	59,49	1	Jumat 12/06/24 05:06 WIB	Senin 12/09/24 16:35 WIB
86	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dendi Suryadi dan Alif Turiadi	46,58	1	Jumat 12/06/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 22:11 WIB
87	Kabupaten Labuhanbatu	Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar	10,57	1	Rabu 12/04/24 10:00 WIB	Jumat 12/06/24 09:10 WIB
88	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung	25,69	1,50	Selasa 12/03/24 17:00 WIB	Kamis 12/05/24 17:23 WIB
89	Kabupaten Lahat	Yulius Maulana dan Budiarto	12,11	1,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:18 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
90	Kabupaten Lamongan	Abdul Ghofur dan Firohya Shalati	10,91	0,50	Kamis 12/05/24 21:40 WIB	Senin 12/09/24 22:25 WIB
91	Kabupaten Lima Puluh Kota	Safaruddin Dt: Bandaro Rajo dan Darman Sahladi	6,19	1,50	Jumat 12/05/25 10:56 WIB	Senin 12/09/24 15:25 WIB
92	Kabupaten Lingga	Alias Wello dan Muhammad Ishak	29,06	2	Rabu 12/04/24 20:10 WIB	Jumat 12/06/24 22:38 WIB
93	Kabupaten Mahakam Ulu	Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin	7,29	2	Jumat 12/06/24 01:58 WIB	Selasa 12/10/24 19:15 WIB
94	Kabupaten Malang	Gunawan Hs dan Umar Usman	32,43	0,50	Rabu 12/04/24 22:05 WIB	Sabtu 12/07/24 19:35 WIB
95	Kabupaten Maluku Barat Daya	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	20,96	2	Kamis 12/05/24 19:15 WIB	Senin 12/09/24 08:43 WIB
96	Kabupaten Maluku Tengah	Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam	4,07	1,50	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 23:11 WIB
97	Kabupaten Maluku Tenggara	Martinus Sergius Ulukyanan dan A Yani Rahawarin	6,51	2	Minggu 12/08/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 23:06 WIB
98	Kabupaten Mamberamo Raya	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	21,83	2	Kamis 12/12/24 10:52 WIB	Senin 12/16/24 03:34 WIB
99	Kabupaten Mamberamo Raya	Ever Mudumi dan Mada Marlinge Rumaikewi S.Si	33,83	2	Kamis 12/12/24 10:52 WIB	Senin 12/16/24 10:18 WIB
100	Kabupaten Mamberamo Raya	Alfons Sesa dan Yakobus Britai	23,44	2	Kamis 12/12/24 10:52 WIB	Senin 12/16/24 22:41 WIB
101	Kabupaten Mamberamo Tengah	Eremen Yogosam dan Berius Kogoya	30,77	2	Sabtu 12/07/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 11:13 WIB
102	Kabupaten Mamuju	Ado Mas Ud dan Damris	26,27	1,50	Jumat 12/06/24 16:48 WIB	Selasa 12/10/24 10:50 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
103	Kabupaten Mamuju Tengah	Sarul Sukardi dan Alamsyah Arifin	8,55	2	Jumat 12/06/24 22:33 WIB	Selasa 12/10/24 21:48 WIB
104	Kabupaten Manggarai Barat	Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontani	1,87	1,50	Selasa 12/03/24 21:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:09 WIB
105	Kabupaten Manokwari	Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo	10,34	2	Sabtu 12/07/24 01:15 WIB	Selasa 12/10/24 15:06 WIB
106	Kabupaten Manokwari Selatan	Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi'i	22,77	2	Kamis 12/05/24 17:20 WIB	Senin 12/09/24 17:16 WIB
107	Kabupaten Mappi	Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling	3,02	2	Rabu 12/04/24 00:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:49 WIB
108	Kabupaten Mappi	Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling	3,02	2	Rabu 12/04/24 00:35 WIB	Sabtu 12/07/24 00:20 WIB
109	Kabupaten Maybrat	Kornelius Kambu dan Zakeus Momao	20,56	2	Minggu 12/08/24 00:00 WIB	Selasa 12/10/24 21:27 WIB
110	Kabupaten Maybrat	Agustinus Tenau dan Marthen Howay	27,63	2	Minggu 12/08/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 21:01 WIB
111	Kabupaten Melawi	Kluisen dan Iif Usfayadi	33,19	2	Rabu 12/04/24 01:17 WIB	Jumat 12/06/24 08:00 WIB
112	Kabupaten Merangin	Nalim dan Nilwan Yahya	1,93	1,50	Kamis 12/05/24 17:20 WIB	Senin 12/09/24 14:25 WIB
113	Kabupaten Merauke	Hendrikus Mahuse dan Riduwan	7,32	2	Jumat 12/6/2024 00:00 WIB	Selasa 12/10/24 22:35 WIB
114	Kabupaten Mesuji	Suprpto dan Fuad Amrulloh	19,55	2	Selasa 12/03/24 14:00 WIB	Kamis 12/05/24 21:05 WIB
115	Kabupaten Mimika	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin	1,69	1,50	Senin 12/09/24 23:34 WIB	Rabu 12/11/24 17:48 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
116	Kabupaten Mimika	Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi	5,29	1,50	Senin 12/09/24 23:34 WIB	Rabu 12/11/24 23:07 WIB
117	Kabupaten Minahasa	Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot	27,92	1,50	Rabu 12/04/24 08:44 WIB	Jumat 12/06/24 20:34 WIB
118	Kabupaten Minahasa Selatan	Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie	5,89	2	Rabu 12/04/24 17:37 WIB	Jumat 12/06/24 22:54 WIB
119	Kabupaten Minahasa Tenggara	Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu	36,02	2	Selasa 12/03/24 19:55 WIB	Jumat 12/06/24 18:26 WIB
120	Kabupaten Minahasa Utara	Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi	16,07	2	Kamis 12/05/24 01:10 WIB	Jumat 12/06/24 23:00 WIB
121	Kabupaten Morowali	Taslim dan Asgar Ali K.	2,88	2	Jumat 12/06/24 17:54 WIB	Senin 12/09/24 16:19 WIB
122	Kabupaten Morowali Utara	Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi	6,81	2	Rabu 12/04/24 11:00 WIB	Jumat 12/06/24 18:44 WIB
123	Kabupaten Muara Enim	Nasrun Umar dan Lia Anggraini	3,12	1	Selasa 12/03/24 22:37 WIB	Jumat 12/06/24 17:29 WIB
124	Kabupaten Muaro Jambi	Zuwanda dan Sawaluddin	5,49	1,50	Sabtu 12/07/24 21:45 WIB	Senin 12/09/24 08:27 WIB
125	Kabupaten Muna	La Ode M: Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan	5,30	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 17:35 WIB
126	Kabupaten Nabire	Delpedro Marhaen Rismansyah	62,44	2	Sabtu 12/07/24 00:20 WIB	Selasa 12/10/24 20:13 WIB
127	Kabupaten Nabire	Martinus Adii dan Agus Suprayitno	24,89	2	Sabtu 12/07/24 00:20 WIB	Rabu 12/11/24 15:52 WIB
128	Kabupaten Nduga	Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge	5,76	2	Sabtu 12/07/24 21:00 WIB	Selasa 12/10/24 22:34 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
129	Kabupaten Nganjuk	Muhammad Muhibbin. dan Aushaf Fajr Herdiansyah	1,91	0,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 17:51 WIB
130	Kabupaten Nias Selatan	Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo	24,97	1,50	Jumat 12/06/24 18:00 WIB	Selasa 12/10/24 17:10 WIB
131	Kabupaten Nias Selatan	Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya	25,19	1,50	Jumat 12/06/24 18:00 WIB	Senin 12/16/24 17:51 WIB
132	Kabupaten Nias Utara	Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara	61,73	2	Rabu 12/04/24 00:05 WIB	Jumat 12/06/24 21:05 WIB
133	Kabupaten Nunukan	Andi M Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus	3,47	2	Jumat 12/06/24 00:47 WIB	Senin 12/09/24 14:41 WIB
134	Kabupaten Ogan Ilir	Desva Adelia Rachmadani (Ketua BP2SS DPC Kabupaten Ogan Ilir)	57,55	1,50	Selasa 12/03/24 21:15 WIB	Jumat 12/06/24 23:54 WIB
135	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita	1,79	1,50	Senin 12/02/24 17:15 WIB	Rabu 12/04/24 23:14 WIB
136	Kabupaten Pamekasan	Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi	4,81	1	Kamis 12/05/24 01:00 WIB	Senin 12/09/24 20:53 WIB
137	Kabupaten Pandeglang	Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya	38,99	0,50	Kamis 12/05/24 16:22 WIB	Senin 12/09/24 16:05 WIB
138	Kabupaten Pangandaran	Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat	3,44	1,50	Senin 12/02/24 19:00 WIB	Rabu 12/04/24 19:11 WIB
139	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	19,73	1,50	Rabu 12/04/24 00:12 WIB	Jumat 12/06/24 23:09 WIB
140	Kabupaten Paniai	Robby Kayame dan Hengki Kudiai	38,12	2	Sabtu 12/14/24 22:15 WIB	Selasa 12/17/24 21:12 WIB
141	Kabupaten Paniai	Thomas Yeimo dan Yeri Adii	27,09	2	Sabtu 12/14/24 22:15 WIB	Rabu 12/18/24 21:12 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
142	Kabupaten Paniai	Nason Uti dan Jhon Deki Yogi	25,88	2	Sabtu 12/14/24 22:15 WIB	Rabu 12/18/24 21:27 WIB
143	Kabupaten Parigi Moutong	M. Nizar Rahmatu dan Ardi	8,20	1,50	Rabu 12/04/24 19:15 WIB	Jumat 12/06/24 15:41 WIB
144	Kabupaten Pasaman	Mara Ondak dan Desrizal	1,88	1,50	Senin 12/02/24 21:48 WIB	Rabu 12/04/24 12:36 WIB
145	Kabupaten Pasaman	Sabar As dan Sukardi	6,36	1,50	Senin 12/02/24 21:48 WIB	Kamis 12/05/24 00:02 WIB
146	Kabupaten Pasaman Barat	Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah	4,79	1,50	Selasa 12/03/24 20:52 WIB	Kamis 12/05/24 20:39 WIB
147	Kabupaten Pasangkayu	Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia (Putrawan Suryatno dan Aprisal)	9,37	2	Rabu 12/04/24 00:12 WIB	Jumat 12/06/24 14:31 WIB
148	Kabupaten Pegunungan Bintang	Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman	42,06	2	Jumat 12/06/24 21:56 WIB	Selasa 12/10/24 20:06 WIB
149	Kabupaten Pegunungan Bintang	Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor	14,55	2	Jumat 12/06/24 21:56 WIB	Selasa 12/10/24 22:48 WIB
150	Kabupaten Pematang	Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi	25,11	0,50	Selasa 12/03/24 22:00 WIB	Jumat 12/06/24 23:59 WIB
151	Kabupaten Pesawaran	Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali	18,99	1,50	Selasa 12/03/24 16:39 WIB	Kamis 12/05/24 11:02 WIB
152	Kabupaten Pesisir Barat	Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim	8,38	2	Kamis 12/05/24 02:00 WIB	Kamis 12/05/24 20:54 WIB
153	Kabupaten Pinrang	Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir	5,98	1,50	Rabu 12/04/24 00:10 WIB	Jumat 12/06/24 23:24 WIB
154	Kabupaten Pohuwato	Yusri M. Helingo dan Fatmawaty Syarif	11,33	2	Rabu 12/04/24 00:44 WIB	Kamis 12/05/24 21:10 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
155	Kabupaten Ponorogo	Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru	8,31	1	Selasa 12/03/24 16:00 WIB	Kamis 12/05/24 22:12 WIB
156	Kabupaten Poso	Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga	20,26	1,50	Jumat 12/06/24 22:00 WIB	Senin 12/09/24 13:43 WIB
157	Kabupaten Pringsewu	Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda	29,38	1,50	Senin 12/02/24 11:10 WIB	Senin 12/09/24 09:50 WIB
158	Kabupaten Pulau Morotai	Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana	40,93	2	Rabu 12/04/24 00:15 WIB	Kamis 12/05/24 08:28 WIB
159	Kabupaten Pulau Morotai	Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba	6,04	2	Rabu 12/04/24 00:15 WIB	Jumat 12/06/24 14:14 WIB
160	Kabupaten Pulau Taliabu	Abidin Jaaba dan Dedy Mirzan	23,97	2	Sabtu 12/07/24 00:10 WIB	Selasa 12/10/24 19:03 WIB
161	Kabupaten Pulau Taliabu	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi	3,52	2	Sabtu 12/07/24 00:10 WIB	Rabu 12/11/24 22:43 WIB
162	Kabupaten Puncak	Sarekat Demokrasi Indonesia	36,63	2	Kamis 12/12/24 18:56 WIB	Sabtu 12/14/24 21:56 WIB
163	Kabupaten Puncak	Saparuddin	36,63	2	Kamis 12/12/24 18:56 WIB	Senin 12/16/24 17:24 WIB
164	Kabupaten Puncak Jaya	Yuni Wonda dan Mus Kogoya	12,84	2	Rabu 12/18/24 00:00 WIB	Rabu 12/18/24 23:59 WIB
165	Kabupaten Raja Ampat	Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku	24,80	2	Kamis 12/05/24 17:34 WIB	Senin 12/09/24 10:16 WIB
166	Kabupaten Raja Ampat	Ria Siti Naruliah Umlati dan Benoni Saleo	13,62	2	Kamis 12/05/24 17:34 WIB	Senin 12/09/24 17:59 WIB
167	Kabupaten Raja Ampat	Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M. Bula	18,99	2	Kamis 12/05/24 17:34 WIB	Senin 12/09/24 18:00 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
168	Kabupaten Rokan Hilir	Afrizal Sintong dan Setiawan	15,28	1	Selasa 12/03/24 00:45 WIB	Kamis 12/05/24 16:48 WIB
169	Kabupaten Rokan Hulu	Kelmi Amri dan Asparaini	1,17	1	Selasa 12/03/24 20:19 WIB	Kamis 12/05/24 18:11 WIB
170	Kabupaten Rote Ndao	Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggaldae	41,14	2	Selasa 12/03/24 23:59 WIB	Jumat 12/06/24 23:42 WIB
171	Kabupaten Sabu Raijua	Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado	15,33	2	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/18/24 22:49 WIB
172	Kabupaten Samosir	Freddy Lamhot P Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon	27,61	2	Jumat 12/06/24 09:43 WIB	Selasa 12/10/24 14:25 WIB
173	Kabupaten Sampang	Muhammad Bin Mu'Afi Zaini dan Abdullah Hidayat	6,93	0,50	Jumat 12/06/24 00:00 WIB	Selasa 12/10/24 22:09 WIB
174	Kabupaten Sarmi	Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar	56,14	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 14:24 WIB
175	Kabupaten Sarmi	Yanni dan Jemmi Esau Maban	31,00	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 14:26 WIB
176	Kabupaten Sarolangun	Tontawi Jauhari dan A.Harris.Ab	34,47	1,50	Selasa 12/03/24 16:25 WIB	Jumat 12/06/24 15:26 WIB
177	Kabupaten Serang	Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna	40,34	0,50	Rabu 12/04/24 17:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:50 WIB
178	Kabupaten Sigi	Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Samuel Riga	6,31	1,50	Kamis 12/05/24 23:00 WIB	Senin 12/09/24 10:28 WIB
179	Kabupaten Sikka	Suitbertus Amandus dan Robertus Ray	4,72	1,50	Kamis 12/05/24 03:07 WIB	Rabu 12/18/24 18:56 WIB
180	Kabupaten Solok Selatan	Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen	10,29	2	Rabu 12/04/24 14:30 WIB	Jumat 12/06/24 22:02 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
181	Kabupaten Sorong Selatan	Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)	41,16	2	Jumat 12/06/24 16:00 WIB	Sabtu 12/07/24 23:29 WIB
182	Kabupaten Sorong Selatan	Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin	11,50	2	Jumat 12/06/24 16:00 WIB	Selasa 12/10/24 10:57 WIB
183	Kabupaten Subang	H. Ruhimat dan H. Aceng Kudus	18,25	0,50	Rabu 12/04/24 00:31 WIB	Jumat 12/06/24 10:17 WIB
184	Kabupaten Sukabumi	Iyos Somantri dan Zainul S	6,19	0,50	Jumat 12/06/24 22:45 WIB	Selasa 12/10/24 20:36 WIB
185	Kabupaten Sumba Barat	Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba	11,12	2	Selasa 12/03/24 16:59 WIB	Jumat 12/06/24 23:26 WIB
186	Kabupaten Sumba Barat Daya	Fransiskus Marthin Adilalo dan Yeremia Tanggu	5,26	1,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:42 WIB
187	Kabupaten Sumenep	Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam	20,69	0,50	Jumat 12/06/24 09:30 WIB	Selasa 12/10/24 11:18 WIB
188	Kabupaten Supiori	Yotam Wakum dan Marinus Maryar	17,53	2	Selasa 12/03/24 20:30 WIB	Jumat 12/06/24 17:19 WIB
189	Kabupaten Takalar	Syamsari dan M. Natsir Ibrahim Se	41,53	1,50	Rabu 12/04/24 00:03 WIB	Jumat 12/06/24 16:14 WIB
190	Kabupaten Tambrauw	Ir. Saparuddin	30,98	2	Jumat 12/06/24 20:25 WIB	Minggu 12/08/24 13:57 WIB
191	Kabupaten Tambrauw	Yohanis Yembra dan Petrus Yewen	9,55	2	Jumat 12/06/24 20:25 WIB	Selasa 12/10/24 15:32 WIB
192	Kabupaten Tambrauw	Thomas Kofiaga dan Pieter Mambrasar	11,28	2	Jumat 12/06/24 20:25 WIB	Selasa 12/10/24 20:52 WIB
193	Kabupaten Tana Tidung	Said Agil dan Hendrik	2,50	2	Jumat 12/06/24 00:43 WIB	Selasa 12/10/24 14:21 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
194	Kabupaten Tanah Datar	Richi Aprian dan Donny Karsont	4,96	1,50	Kamis 12/05/24 10:51 WIB	Senin 09/12/24 11:37 WIB
195	Kabupaten Tapanuli Tengah	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	7,99	1,50	Kamis 12/05/24 00:05 WIB	Senin 12/09/24 10:52 WIB
196	Kabupaten Tapanuli Utara	Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat	28,55	1,50	Rabu 12/04/24 17:00 WIB	Jumat 12/06/24 22:15 WIB
197	Kabupaten Tasikmalaya	Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi	24,52	0,50	Jumat 12/06/24 00:51 WIB	Senin 12/09/24 08:32 WIB
198	Kabupaten Teluk Bintuni	Daniel Asmorom dan Alimudin Baedu	12,14	2	Rabu 12/04/24 00:27 WIB	Jumat 12/06/24 22:22 WIB
199	Kabupaten Teluk Wondama	Hendrik Syake Mambor .Mm dan Andarias Kayukatui	15,44	2	Kamis 12/05/24 02:13 WIB	Senin 12/09/24 08:23 WIB
200	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Egusem Piether Tahun dan Johan Christian Tallo	6,40	1,50	Jumat 12/06/24 23:55 WIB	Rabu 12/11/24 22:55 WIB
201	Kabupaten Toba	Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu	6,63	2	Rabu 12/04/24 16:00 WIB	Jumat 12/06/24 21:11 WIB
202	Kabupaten Tolikara	Nus Weya dan Yan Wenda	10,35	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Rabu 12/18/24 21:18 WIB
203	Kabupaten Tolikara	Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi	8,80	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Rabu 12/18/24 21:52 WIB
204	Kabupaten Tolikara	Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi	8,80	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Rabu 12/18/24 22:50 WIB
205	Kabupaten Tolikara	Irinus Wanimbo dan Arson R. Kogoya	10,75	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Kamis 12/19/24 01:10 WIB
206	Kabupaten Toraja Utara	Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok	4,41	1,50	Selasa 12/03/24 13:00 WIB	Kamis 12/05/24 19:01 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
207	Kabupaten Tulang Bawang	Hendriwansyah dan Danial Anwar	22,03	1,50	Selasa 12/03/24 00:05 WIB	Kamis 12/05/24 22:29 WIB
208	Kabupaten Tulungagung	Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti	16,14	0,50	Kamis 12/05/24 18:59 WIB	Selasa 12/10/24 00:45 WIB
209	Kabupaten Wakatobi	Hamirudin dan Muhamad Ali	6,18	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 10:35 WIB
210	Kabupaten Waropen	Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi	12,68	2	Senin 12/09/24 20:40 WIB	Senin 12/09/24 21:31 WIB
211	Kabupaten Yahukimo	Yosep Payage dan Mari Mirin	13,16	1,50	Jumat 12/06/24 10:57 WIB	Selasa 12/10/24 20:44 WIB
212	Kabupaten Yalimo	Alexsander Walilo dan Ahim Helakombo	2,69	2	Selasa 12/10/24 14:30 WIB	Kamis 12/12/24 21:23 WIB
213	Kabupaten Jayapura	Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak	1,50	2	Senin 12/09/24 00:00 WIB	Kamis 12/12/24 19:17 WIB
214	Kabupaten Katingan	Sakariyas dan Endang Susilawatie	1,04	2	Rabu 12/04/24 16:44 WIB	Sabtu 12/07/24 00:00 WIB
215	Kota Ambon	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	36,69	1,50	Jumat 12/06/24 17:34 WIB	Rabu 12/11/24 00:20 WIB
216	Kota Banjarbaru	Muhamad Arifin (Selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan)	100,00	1,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 15:07 WIB
217	Kota Banjarbaru	Udiansyah dan Abd. Karim	100,00	1,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 15:08 WIB
218	Kota Banjarbaru	Hamdan Eko Benyamine, dkk	100,00	1,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 15:52 WIB
219	Kota Banjarbaru	Said Abdullah	100,00	1,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 17:28 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
220	Kota Batam	Nuryanto dan Hardi Selamat Hood	32,01	0,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 12:32 WIB
221	Kota Bau Bau	Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin	31,74	2	Selasa 12/03/24 00:25 WIB	Kamis 12/05/24 14:33 WIB
222	Kota Bekasi	Heri Koswara dan Sholihin	0,73	0,50	Jumat 12/06/24 15:00 WIB	Selasa 12/10/24 19:10 WIB
223	Kota Bengkulu	Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari	9,65	1,50	Rabu 12/04/24 15:28 WIB	Jumat 12/06/24 21:27 WIB
224	Kota Bima	Mohammad Rum dan Mutmainnah	3,07	2	Selasa 12/03/24 17:27 WIB	Kamis 12/05/24 21:53 WIB
225	Kota Binjai	Donal Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah	2,98	1,50	Rabu 12/04/24 18:11 WIB	Senin 12/09/24 18:13 WIB
226	Kota Blitar	Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro	6,58	2	Rabu 12/04/24 15:35 WIB	Minggu 12/08/24 00:02 WIB
227	Kota Depok	Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq	6,47	0,50	Senin 12/02/24 22:08 WIB	Jumat 12/06/24 22:15 WIB
228	Kota Dumai	Ferdiansyah dan Soeparto	52,78	1,50	Rabu 12/04/24 16:00 WIB	Jumat 12/06/24 19:17 WIB
229	Kota Gorontalo	Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku	13,98	2	Selasa 12/03/24 15:05 WIB	Kamis 12/05/24 21:25 WIB
230	Kota Jayapura	Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo	22,69	1,50	Rabu 12/11/24 00:00 WIB	Jumat 12/13/24 21:32 WIB
231	Kota Kendari	Abdul Rasak dan Afdhal	5,45	1,50	Kamis 12/05/24 00:30 WIB	Jumat 12/06/24 21:38 WIB
232	Kota Kendari	Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin	11,07	1,50	Kamis 12/05/24 00:30 WIB	Senin 12/09/24 21:39 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
233	Kota Langsa	Maimul Mahdi dan Nurzahri	14,36	2	Senin 12/02/24 13:55 WIB	Rabu 12/04/24 23:13 WIB
234	Kota Langsa	Fazlun Hasan dan Meutia Apriani	21,92	2	Senin 12/02/24 13:55 WIB	Kamis 12/05/24 00:20 WIB
235	Kota Lhokseumawe	Ismail dan Azhar Mahmud	3,22	2	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 21:53 WIB
236	Kota Makassar	Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara	40,76	0,50	Jumat 12/06/24 20:00 WIB	Selasa 12/10/24 17:12 WIB
237	Kota Malang	Budhy Pakarti	49,62	1	Selasa 12/03/24 00:00 WIB	Jumat 12/13/24 09:24 WIB
238	Kota Manado	Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut	4,43	1,50	Selasa 12/03/24 03:12 WIB	Kamis 12/05/24 14:57 WIB
239	Kota Medan	Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani	17,75	0,50	Jumat 12/06/24 23:58 WIB	Selasa 12/10/24 17:52 WIB
240	Kota Padang	Hendri Septa dan Hidayat	27,42	1	Jumat 12/06/24 11:17 WIB	Selasa 12/10/24 14:58 WIB
241	Kota Padang Panjang	Nasrul dan Eri	4,27	2	Senin 12/02/24 11:42 WIB	Rabu 12/04/24 22:55 WIB
242	Kota Pagar Alam	Alpian dan Alfikriansyah	4,80	2	Rabu 12/04/24 23:00 WIB	Jumat 12/06/24 15:09 WIB
243	Kota Pagar Alam	Hepy Safriani dan Efsi	4,47	2	Rabu 12/04/24 23:00 WIB	Jumat 12/06/24 19:15 WIB
244	Kota Palangkaraya	Rojikinnor dan Vina Panduwinata	27,36	1,50	Selasa 12/03/24 21:00 WIB	Jumat 12/06/24 19:39 WIB
245	Kota Palembang	Yudha Pratomo dan Baharudin	16,20	0,50	Kamis 12/05/24 00:33 WIB	Jumat 12/06/24 23:09 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
246	Kota Palu	Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate	37,70	1,50	Kamis 12/05/24 23:53 WIB	Senin 12/09/24 10:03 WIB
247	Kota Parepare	Erna Rasyid Taufan dan M. Rahmat Sjamsu Alam	15,31	2	Senin 12/02/24 17:34 WIB	Rabu 12/04/24 23:56 WIB
248	Kota Payakumbuh	Supardi dan Tri Venindra	9,36	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 10:01 WIB
249	Kota Pekanbaru	Mufihun dan Ade Hartati Rahmat	25,98	0,50	Rabu 12/04/24 01:48 WIB	Jumat 12/06/24 20:43 WIB
250	Kota Pematangsiantar	Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon	4,69	1,50	Selasa 12/03/24 16:35 WIB	Rabu 12/11/24 16:23 WIB
251	Kota Probolinggo	Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)	39,15	2	Selasa 12/03/24 18:31 WIB	Selasa 12/10/24 06:55 WIB
252	Kota Sawahlunto	Deri Asta dan Desni Seswinari	58,18	2	Selasa 12/03/24 14:04 WIB	Kamis 12/05/24 23:28 WIB
253	Kota Semarang	Saparuddin	57,24	0,50	Kamis 12/05/24 14:00 WIB	Senin 12/09/24 23:55 WIB
254	Kota Solok	Nofi Candra dan Leo Murphy	4,38	2	Selasa 12/03/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:39 WIB
255	Kota Sorong	Petronela Kambuaya dan Hermanto	16,68	1,50	Senin 12/09/24 21:00 WIB	Rabu 12/11/24 22:00 WIB
256	Kota Sungai Penuh	Ahmadi Zubir dan Ferry Satria	6,10	2	Rabu 12/04/24 17:15 WIB	Jumat 12/06/24 14:52 WIB
257	Kota Tangerang Selatan	Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin	24,93	0,50	Rabu 12/06/24 00:21 WIB	Selasa 12/10/24 19:10 WIB
258	Kota Tarakan	Lembaga Analisis HAM Indonesia	14,97	1,50	Kamis 12/05/24 02:21 WIB	Senin 12/09/24 07:01 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
259	Kota Ternate	Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu	11,80	2	Rabu 12/04/24 00:20 WIB	Kamis 12/05/24 22:00 WIB
260	Kota Tidore Kepulauan	Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar	41,12	2	Rabu 12/04/24 16:49 WIB	Jumat 12/06/24 23:18 WIB
261	Kota Tomohon	Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait	2,47	2	Selasa 12/03/24 15:00 WIB	Kamis 12/05/24 13:33 WIB
262	Papua Selatan	M: Andrean Saefudin dan Salsabila	51,65	2	Minggu 12/08/24 18:17 WIB	Senin 12/09/24 20:24 WIB
263	Papua Selatan	Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)	51,65	2	Minggu 12/08/24 18:17 WIB	Selasa 12/10/24 08:25 WIB
264	Papua Selatan	Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo	33,52	2	Minggu 12/08/24 18:17 WIB	Selasa 12/10/24 22:57 WIB
265	Maluku Utara	Aliong Mus dan Sahril Thahir	40,66	2	Minggu 12/08/24 19:26 WIB	Selasa 12/10/24 22:55 WIB
266	Sumatera Utara	Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala	28,94	0,50	Senin 12/09/24 17:50 WIB	Selasa 12/10/24 23:59 WIB
267	Sulawesi Tenggara	Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan	31,55	1,50	Minggu 12/08/24 04:12 WIB	Rabu 12/11/24 10:58 WIB
268	Maluku Utara	Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan	27,50	2	Minggu 12/08/24 19:26 WIB	Rabu 12/11/24 13:08 WIB
269	Sulawesi Selatan	Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad. S.	30,65	1	Senin 12/09/24 00:20 WIB	Rabu 12/11/24 18:43 WIB
270	Maluku Utara	Muhammad Kasuba dan Basri Salama	38,55	2	Minggu 12/08/24 19:26 WIB	Rabu 12/11/24 20:11 WIB
271	Sulawesi Utara	Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw	5,17	1,50	Sabtu 12/07/24 13:32 WIB	Rabu 12/11/24 21:56 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
272	Kalimantan Timur	Isran Noor dan Hadi Mulyadi	11,32	1,50	Senin 12/09/24 03:21 WIB	Rabu 12/11/24 21:57 WIB
273	Jawa Tengah	Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi	18,28	0,50	Sabtu 12/07/24 17:53 WIB	Rabu 12/11/24 22:13 WIB
274	Jawa Timur	Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans	26,28	0,50	Senin 12/09/24 21:30 WIB	Rabu 12/11/24 22:34 WIB
275	Kalimantan Tengah	Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail Bin Yahya	15,80	1,50	Minggu 12/08/24 19:35 WIB	Rabu 12/11/24 23:37 WIB
276	Papua Barat Daya	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw	21,03	2	Selasa 12/10/24 14:38 WIB	Kamis 12/12/24 22:40 WIB
277	Sulawesi Tengah	Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri	6,39	1,50	Kamis 12/12/24 01:33 WIB	Senin 12/16/24 18:52 WIB
278	Papua Pegunungan	Befa Yigibalom dan Natan Pahabol	12,19	2	Minggu 12/15/24 19:44 WIB	Rabu 12/18/24 13:51 WIB
279	Papua Tengah	Willem Wandik dan Aloisius Giyai	11,66	2	Rabu 12/18/24 13:32 WIB	Rabu 12/18/24 20:32 WIB
280	Papua Pegunungan	Delpedro Marhaen Rismansyah	56,09	2	Minggu 12/15/24 19:44 WIB	Rabu 12/18/24 23:08 WIB
281	Papua Tengah	Natalis Tabuni dan Titus Natkime	35,83	2	Rabu 12/18/24 13:32 WIB	Jumat 12/20/24 15:24 WIB
282	Papua Tengah	Wempi Wetipo dan Agustinus Anggaibak	34,42	2	Rabu 12/18/24 13:32 WIB	Jumat 12/20/24 20:14 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 3 Permohonan yang Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara tetapi Melewati
Tenggang Waktu Pengajuan

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajua Permohonan
1	Kabupaten Jayapura	Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak	1,50	2	Senin 12/09/24 00:00 WIB	Kamis 12/12/24 19:17 WIB
2	Kabupaten Katingan	Sakariyas dan Endang Susilawatie	1,04	2	Rabu 12/04/24 16:44 WIB	Sabtu 07/12/24 00:00 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 4 Permohonan yang Diajukan oleh Pemantau atau Bukan Pasangan Calon Pemilu

No.	Nomor Permohonan	Daerah	Jenis Pemohon
1	3/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Empat Lawang	Bukan Calon
2	5/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Banjarbaru	Pemantau
3	6/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Banjarbaru	Bukan Calon
4	7/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Banjarbaru	Bukan Calon
5	9/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Banjarbaru	Bukan Pasangan Calon
6	24/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Empat Lawang	Bukan Calon
7	72/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Pasangkayu	Bukan Calon
8	91/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Nias Utara	Pemantau
9	130/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Ogan Ilir	Pemantau
10	132/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Gresik	Pemantau
11	141/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Sorong Selatan	Bukan Calon
12	143/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Tambrauw	Bukan Calon
13	145/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Fak Fak	Bukan Calon
14	147/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Tarakan	Pemantau
15	187/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Provinsi Papua Selatan	Bukan Calon
16	201/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Semarang	Bukan Calon
17	206/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Probolinggo	Bukan Calon
18	207/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Provinsi Papua Selatan	Bukan Calon
19	219/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Bintan	Pemantau
20	227/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Nabire	Bukan Calon
21	230/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Pegunungan Bintang	Bukan Calon
22	281/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kota Malang	Bukan Calon
23	284/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Puncak	Pemantau
24	291/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Puncak	Bukan Calon
25	306/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Provinsi Papua Pegunungan	Bukan Calon
26	311/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Intan Jaya	Pemantau



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 5 Permohonan yang Memenuhi Tenggang Waktu Pengajuan tetapi Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
1	Kabupaten Alor	Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy	80,07	2	Sabtu 12/07/24 02:26 WIB	Senin 12/16/24 22:51 WIB
2	Kabupaten Asmat	Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing	30,02	2	Sabtu 12/07/24 18:38 WIB	Selasa 12/10/24 22:13 WIB
3	Kabupaten Bandung	Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan	11,69	0,50	Rabu 12/04/24 17:14 WIB	Jumat 12/06/24 17:36 WIB
4	Kabupaten Bandung Barat	Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman	12,84	0,50	Kamis 12/05/24 01:31 WIB	Senin 12/09/24 22:18 WIB
5	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sugianto dan Hery Ludong	4,07	2	Rabu 12/04/24 01:32 WIB	Jumat 12/06/24 21:58 WIB
6	Kabupaten Bangkalan	Mathur Husyairi dan Jayus Salam	20,34	0,50	Rabu 12/04/24 22:46 WIB	Jumat 12/06/24 11:19 WIB
7	Kabupaten Banjar	Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahasyim	67,69	1	Rabu 12/04/24 16:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:15 WIB
8	Kabupaten Banyuasin	Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam	20,30	1	Selasa 12/03/24 23:47 WIB	Kamis 12/05/24 15:08 WIB
9	Kabupaten Banyuwangi	Moh Ali Makki dan Ali Ruchi	4,21	0,50	Rabu 12/04/24 00:28 WIB	Jumat 12/06/24 23:09 WIB
10	Kabupaten Belitung Timur	Burhanudin dan Ali Reza Mahendra	31,72	2	Rabu 12/04/24 16:57 WIB	Jumat 12/06/24 21:22 WIB
11	Kabupaten Belu	Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere	11,95	2	Kamis 12/05/24 00:01 WIB	Jumat 12/06/24 21:13 WIB
12	Kabupaten Bengkulu Tengah	Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra	3,12	2	Jumat 12/06/24 03:03 WIB	Sabtu 12/07/24 21:56 WIB
13	Kabupaten Biak Numfor	Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho	9,91	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 16:00 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
14	Kabupaten Bireuen	Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin	23,34	1,50	Senin 12/02/24 17:45 WIB	Rabu 12/04/24 22:48 WIB
15	Kabupaten Bogor	R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	44,46	0,50	Kamis 12/05/24 21:11 WIB	Senin 12/09/24 20:02 WIB
16	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh	32,85	1,50	Selasa 12/03/24 20:00 WIB	Kamis 12/05/24 22:34 WIB
17	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Arsalan Makalalag dan Hartina S Badu	40,56	2	Minggu 12/01/24 17:00 WIB	Rabu 12/04/24 21:56 WIB
18	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sam Sachrul Mamonto dan Rusmin Mokoagow	4,19	2	Rabu 12/04/24 01:00 WIB	Jumat 12/06/24 21:44 WIB
19	Kabupaten Bone Bolango	Merlan S. Uloli dan Syamsu T. Botutihe	3,18	2	Rabu 12/04/24 15:58 WIB	Jumat 12/06/24 22:25 WIB
20	Kabupaten Boven Digoel	Yakob Weremba dan Suharto	21,61	2	Sabtu 12/07/24 04:34 WIB	Rabu 12/11/24 17:37 WIB
21	Kabupaten Boven Digoel	Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob	21,22	2	Sabtu 12/07/24 04:34 WIB	Rabu 12/11/24 20:37 WIB
22	Kabupaten Bulukumba	Jamaluddin M Syamsir dan Tomy Satria Yulianto	27,31	1,50	Rabu 12/04/24 15:06 WIB	Kamis 12/05/24 23:42 WIB
23	Kabupaten Buol	Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto	7,10	2	Selasa 12/03/24 11:12 WIB	Kamis 12/05/24 23:59 WIB
24	Kabupaten Buton	Syaraswati dan Rasyid Mangura	4,60	2	Rabu 12/04/24 06:00 WIB	Jumat 12/06/24 16:01 WIB
25	Kabupaten Buton Selatan	Aliadi dan La Ode Rusyamin	7,45	2	Rabu 12/04/24 00:32 WIB	Jumat 12/06/24 16:03 WIB
26	Kabupaten Cianjur	Herman Suherman dan R.A Muhammad Solih Ibang	2,30	0,50	Jumat 12/06/24 14:30 WIB	Selasa 12/10/24 09:31 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
27	Kabupaten Cirebon	Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana	13,18	0,50	Kamis 12/05/24 00:23 WIB	Senin 12/09/24 19:47 WIB
28	Kabupaten Deiyai	Yan Ukago dan Stefanus Mote	15,01	2	Kamis 12/05/24 18:45 WIB	Senin 12/09/24 20:44 WIB
29	Kabupaten Deiyai	Yan Ukago dan Stefanus Mote	15,01	2	Kamis 12/05/24 18:45 WIB	Senin 12/09/24 22:47 WIB
30	Kabupaten Deli Serdang	M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung	20,24	0,50	Jumat 12/06/24 15:04 WIB	Senin 12/09/24 13:19 WIB
31	Kabupaten Dogiyai	Oskar Makai dan Yani Bobi	32,25	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:13 WIB
32	Kabupaten Dogiyai	Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki	19,25	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:18 WIB
33	Kabupaten Dogiyai	Otopianus P Tebai dan Angkian Goo	33,60	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 22:00 WIB
34	Kabupaten Donggala	Moh. Yasin dan Syafiah	6,82	1,50	Kamis 12/05/24 17:40 WIB	Senin 12/09/24 17:43 WIB
35	Kabupaten Fak Fak	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	8,68	2	Jumat 12/06/24 05:15 WIB	Senin 12/09/24 21:22 WIB
36	Kabupaten Flores Timur	Y.A.T Lukman Riberu dan Zakarias Paun	3,49	1,50	Jumat 12/06/24 23:40 WIB	Selasa 12/10/24 14:57 WIB
37	Kabupaten Gorontalo Utara	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf	16,48	2	Rabu 12/04/24 14:30 WIB	Jumat 12/06/24 00:19 WIB
38	Kabupaten Gorontalo Utara	Ridwan Yasin dan Muksin Badar	48,19	2	Rabu 12/04/24 14:30 WIB	Jumat 12/06/24 03:34 WIB
39	Kabupaten Halmahera Barat	Dany Missy dan Iksan Husain	15,63	2	Jumat 12/06/24 00:10 WIB	Senin 12/09/24 23:18 WIB
40	Kabupaten Halmahera Barat	Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar	22,66	2	Jumat 12/06/24 00:10 WIB	Selasa 12/10/24 04:17 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
41	Kabupaten Halmahera Selatan	Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila	13,64	1,50	Rabu 12/04/24 00:01 WIB	Kamis 12/05/24 23:22 WIB
42	Kabupaten Halmahera Selatan	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	24,75	1,50	Rabu 12/04/24 00:01 WIB	Jumat 12/06/24 08:40 WIB
43	Kabupaten Halmahera Tengah	Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani	32,57	2	Jumat 12/06/24 00:05 WIB	Selasa 12/10/24 15:37 WIB
44	Kabupaten Halmahera Utara	Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos	12,42	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 21:15 WIB
45	Kabupaten Halmahera Utara	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah	14,45	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 22:31 WIB
46	Kabupaten Halmahera Utara	Matheus Stefi Pasimanjeku dan Abdul Aziz Hakim	17,80	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 23:15 WIB
47	Kabupaten Humbang Hasundutan	Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite	4,19	2	Jumat 12/06/24 13:55 WIB	Selasa 12/10/24 21:17 WIB
48	Kabupaten Intan Jaya	Marten Tipagau dan Melianus Belau	14,83	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Selasa 12/17/24 21:30 WIB
49	Kabupaten Intan Jaya	Bernadus Kobogau dan Melianus Agimbau	22,12	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Rabu 12/18/24 22:56 WIB
50	Kabupaten Jayawijaya	Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi	6,35	1,50	Rabu 12/11/24 15:00 WIB	Jumat 12/13/24 17:15 WIB
51	Kabupaten Kaimana	Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada	3,00	2	Sabtu 12/07/24 23:15 WIB	Rabu 12/11/24 16:43 WIB
52	Kabupaten Kampar	Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra	1,79	1	Selasa 12/03/24 00:06 WIB	Kamis 12/05/24 16:14 WIB
53	Kabupaten Kapuas	Erlin Hardi dan Alberkat Yadi	3,13	1,50	Kamis 12/05/24 15:58 WIB	Senin 12/09/24 16:47 WIB
54	Kabupaten Kapuas	Muhammad Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin	4,54	1,50	Kamis 12/05/24 15:58 WIB	Senin 12/09/24 20:24 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
55	Kabupaten Keerom	Petrus Solossa dan Mustakim Hr.	20,53	2	Jumat 12/06/24 00:40 WIB	Selasa 12/10/24 19:11 WIB
56	Kabupaten Kepulauan Aru	Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh	21,22	2	Kamis 12/05/24 01:07 WIB	Jumat 12/06/24 13:16 WIB
57	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok	2,91	2	Jumat 12/06/24 19:36 WIB	Selasa 12/10/24 18:22 WIB
58	Kabupaten Kepulauan Selayar	Ady Ansar dan M. Suwadi	26,18	2	Kamis 12/05/24 00:06 WIB	Senin 12/09/24 17:15 WIB
59	Kabupaten Kepulauan Sula	Hendrata Thes dan Muhamad Natsir Sangadji	7,64	2	Sabtu 12/07/24 17:32 WIB	Selasa 12/10/24 19:07 WIB
60	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan	8,25	2	Kamis 12/05/24 14:29 WIB	Senin 12/09/24 16:33 WIB
61	Kabupaten Kepulauan Yapen	Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi	51,11	2	Rabu 01/08/25 06:50 WIB	Selasa 12/10/24 09:48 WIB
62	Kabupaten Kepulauan Yapen	Welliam R Manderi dan Yohanes G Raubaba	24,22	2	Rabu 01/08/25 06:50 WIB	Rabu 12/11/24 23:23 WIB
63	Kabupaten Kerinci	Deri Mulyadi dan Aswanto	25,10	1,50	Rabu 12/04/24 13:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:13 WIB
64	Kabupaten Kerinci	Darmadi dan Darifus	29,02	1,50	Rabu 12/04/24 13:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:27 WIB
65	Kabupaten Kerinci	Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan	34,14	1,50	Rabu 12/04/24 13:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:41 WIB
66	Kabupaten Kolaka Utara	Sumarling dan Timber	2,28	2	Jumat 12/06/24 00:10 WIB	Senin 12/09/24 13:20 WIB
67	Kabupaten Konawe Selatan	Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke	7,03	1,50	Rabu 12/04/24 00:06 WIB	Jumat 12/06/24 16:01 WIB
68	Kabupaten Konawe Utara	Sudiro dan Raup	5,49	2	Selasa 12/03/24 01:43 WIB	Kamis 12/05/24 22:55 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
69	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sanidin dan Siyono	4,21	1,50	Kamis 12/05/24 20:00 WIB	Senin 12/09/24 17:16 WIB
70	Kabupaten Kuantan Singingi	Adam dan Sutoyo	24,20	1,50	Selasa 12/03/24 09:00 WIB	Kamis 12/05/24 11:55 WIB
71	Kabupaten Kutai Kartanegara	Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais	59,49	1	Jumat 12/06/24 05:06 WIB	Senin 12/09/24 16:35 WIB
72	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dendi Suryadi dan Alif Turiadi	46,58	1	Jumat 12/06/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 22:11 WIB
73	Kabupaten Labuhanbatu	Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar	10,57	1	Rabu 12/04/24 10:00 WIB	Jumat 12/06/24 09:10 WIB
74	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung	25,69	1,50	Selasa 12/03/24 17:00 WIB	Kamis 12/05/24 17:23 WIB
75	Kabupaten Lahat	Yulius Maulana dan Budiarto	12,11	1,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:18 WIB
76	Kabupaten Lamongan	Abdul Ghofur dan Firohya Shalati	10,91	0,50	Kamis 12/05/24 21:40 WIB	Senin 12/09/24 22:25 WIB
77	Kabupaten Lima Puluh Kota	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Darman Sahladi	6,19	1,50	Jumat 12/05/25 10:56 WIB	Senin 12/09/24 15:25 WIB
78	Kabupaten Lingga	Alias Wello dan Muhammad Ishak	29,06	2	Rabu 12/04/24 20:10 WIB	Jumat 12/06/24 22:38 WIB
79	Kabupaten Mahakam Ulu	Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin	7,29	2	Jumat 12/06/24 01:58 WIB	Selasa 12/10/24 19:15 WIB
80	Kabupaten Maluku Barat Daya	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	20,96	2	Kamis 12/05/24 19:15 WIB	Senin 12/09/24 08:43 WIB
81	Kabupaten Maluku Tengah	Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam	4,07	1,50	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 23:11 WIB
82	Kabupaten Maluku Tenggara	Martinus Sergius Ulukyanan dan A Yani Rahawarin	6,51	2	Minggu 12/08/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 23:06 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
83	Kabupaten Mamberamo Raya	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	21,83	2	Kamis 12/12/24 10:52 WIB	Senin 12/16/24 03:34 WIB
84	Kabupaten Mamberamo Raya	Ever Mudumi dan Mada Marince Rumaikewi S.Si	33,83	2	Kamis 12/12/24 10:52 WIB	Senin 12/16/24 10:18 WIB
85	Kabupaten Mamberamo Raya	Alfons Sesa dan Yakobus Britai	23,44	2	Kamis 12/12/24 10:52 WIB	Senin 12/16/24 22:41 WIB
86	Kabupaten Mamberamo Tengah	Eremen Yogosam dan Berius Kogoya	30,77	2	Sabtu 12/07/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 11:13 WIB
87	Kabupaten Mamuju	Ado Mas Ud dan Damris	26,27	1,50	Jumat 12/06/24 16:48 WIB	Selasa 12/10/24 10:50 WIB
88	Kabupaten Mamuju Tengah	Sarul Sukardi dan Alamsyah Arifin	8,55	2	Jumat 12/06/24 22:33 WIB	Selasa 12/10/24 21:48 WIB
89	Kabupaten Manokwari	Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo	10,34	2	Sabtu 12/07/24 01:15 WIB	Selasa 12/10/24 15:06 WIB
90	Kabupaten Manokwari Selatan	Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi`l	22,77	2	Kamis 12/05/24 17:20 WIB	Senin 12/09/24 17:16 WIB
91	Kabupaten Mappi	Benediktus Amoie dan Benedictus Tori Paliling	3,02	2	Rabu 12/04/24 00:35 WIB	Jumat 12/06/24 23:49 WIB
92	Kabupaten Maybrat	Kornelius Kambu dan Zakeus Momao	20,56	2	Minggu 12/08/24 00:00 WIB	Selasa 12/10/24 21:27 WIB
93	Kabupaten Maybrat	Agustinus Tenau dan Marthen Howay	27,63	2	Minggu 12/08/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 21:01 WIB
94	Kabupaten Melawi	Kluisen dan lif Usfayadi	33,19	2	Rabu 12/04/24 01:17 WIB	Jumat 12/06/24 08:00 WIB
95	Kabupaten Merangin	Nalim dan Nilwan Yahya	1,93	1,50	Kamis 12/05/24 17:20 WIB	Senin 12/09/24 14:25 WIB
96	Kabupaten Merauke	Hendrikus Mahuse dan Riduwan	7,32	2	Jumat 12/6/2024 00:00 WIB	Selasa 12/10/24 22:35 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
97	Kabupaten Mesuji	Suprpto dan Fuad Amrulloh	19,55	2	Selasa 12/03/24 14:00 WIB	Kamis 12/05/24 21:05 WIB
98	Kabupaten Mimika	Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin	1,69	1,50	Senin 12/09/24 23:34 WIB	Rabu 12/11/24 17:48 WIB
99	Kabupaten Mimika	Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi	5,29	1,50	Senin 12/09/24 23:34 WIB	Rabu 12/11/24 23:07 WIB
100	Kabupaten Minahasa	Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Panderoot	27,92	1,50	Rabu 12/04/24 08:44 WIB	Jumat 12/06/24 20:34 WIB
101	Kabupaten Minahasa Selatan	Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie	5,89	2	Rabu 12/04/24 17:37 WIB	Jumat 12/06/24 22:54 WIB
102	Kabupaten Minahasa Utara	Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi	16,07	2	Kamis 12/05/24 01:10 WIB	Jumat 12/06/24 23:00 WIB
103	Kabupaten Morowali	Taslim dan Asgar Ali K.	2,88	2	Jumat 12/06/24 17:54 WIB	Senin 12/09/24 16:19 WIB
104	Kabupaten Morowali Utara	Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi	6,81	2	Rabu 12/04/24 11:00 WIB	Jumat 12/06/24 18:44 WIB
105	Kabupaten Muaro Jambi	Zuwanda dan Sawaluddin	5,49	1,50	Sabtu 12/07/24 21:45 WIB	Senin 12/09/24 08:27 WIB
106	Kabupaten Muna	La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan	5,30	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 17:35 WIB
107	Kabupaten Nabire	Martinus Adii dan Agus Suprayitno	24,89	2	Sabtu 12/07/24 00:20 WIB	Rabu 12/11/24 15:52 WIB
108	Kabupaten Nduga	Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge	5,76	2	Sabtu 12/07/24 21:00 WIB	Selasa 12/10/24 22:34 WIB
109	Kabupaten Nganjuk	Muhammad Muhibbin. dan Aushaf Fajr Herdiansyah	1,91	0,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 17:51 WIB
110	Kabupaten Nias Selatan	Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo	24,97	1,50	Jumat 12/06/24 18:00 WIB	Selasa 12/10/24 17:10 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
11 1	Kabupaten Nunukan	Andi M Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus	3,47	2	Jumat 12/06/24 00:47 WIB	Senin 12/09/24 14:41 WIB
11 2	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita	1,79	1,50	Senin 12/02/24 17:15 WIB	Rabu 12/04/24 23:14 WIB
11 3	Kabupaten Pamekasan	Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi	4,81	1	Kamis 12/05/24 01:00 WIB	Senin 12/09/24 20:53 WIB
11 4	Kabupaten Pandeglang	Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya	38,99	0,50	Kamis 12/05/24 16:22 WIB	Senin 12/09/24 16:05 WIB
11 5	Kabupaten Pangandaran	Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat	3,44	1,50	Senin 12/02/24 19:00 WIB	Rabu 12/04/24 19:11 WIB
11 6	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	19,73	1,50	Rabu 12/04/24 00:12 WIB	Jumat 12/06/24 23:09 WIB
11 7	Kabupaten Paniai	Robby Kayame dan Hengki Kudiai	38,12	2	Sabtu 12/14/24 22:15 WIB	Selasa 12/17/24 21:12 WIB
11 8	Kabupaten Paniai	Thomas Yeimo dan Yeri Adii	27,09	2	Sabtu 12/14/24 22:15 WIB	Rabu 12/18/24 21:12 WIB
11 9	Kabupaten Paniai	Nason Uti dan Jhon Deki Yogi	25,88	2	Sabtu 12/14/24 22:15 WIB	Rabu 12/18/24 21:27 WIB
12 0	Kabupaten Parigi Moutong	M. Nizar Rahmatu dan Ardi	8,20	1,50	Rabu 12/04/24 19:15 WIB	Jumat 12/06/24 15:41 WIB
12 1	Kabupaten Pasaman	Mara Ondak dan Desrizal	1,88	1,50	Senin 12/02/24 21:48 WIB	Rabu 12/04/24 12:36 WIB
12 2	Kabupaten Pasaman Barat	Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah	4,79	1,50	Selasa 12/03/24 20:52 WIB	Kamis 12/05/24 20:39 WIB
12 3	Kabupaten Pegunungan Bintang	Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor	14,55	2	Jumat 12/06/24 21:56 WIB	Selasa 12/10/24 22:48 WIB
12 4	Kabupaten Pesawaran	Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali	18,99	1,50	Selasa 12/03/24 16:39 WIB	Kamis 12/05/24 11:02 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
125	Kabupaten Pesisir Barat	Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim	8,38	2	Kamis 12/05/24 02:00 WIB	Kamis 12/05/24 20:54 WIB
126	Kabupaten Pinrang	Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir	5,98	1,50	Rabu 12/04/24 00:10 WIB	Jumat 12/06/24 23:24 WIB
127	Kabupaten Pohuwato	Yusri M. Helingo dan Fatmawaty Syarief	11,33	2	Rabu 12/04/24 00:44 WIB	Kamis 12/05/24 21:10 WIB
128	Kabupaten Ponorogo	Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru	8,31	1	Selasa 12/03/24 16:00 WIB	Kamis 12/05/24 22:12 WIB
129	Kabupaten Poso	Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga	20,26	1,50	Jumat 12/06/24 22:00 WIB	Senin 12/09/24 13:43 WIB
130	Kabupaten Pulau Morotai	Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana	40,93	2	Rabu 12/04/24 00:15 WIB	Kamis 12/05/24 08:28 WIB
131	Kabupaten Pulau Morotai	Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba	6,04	2	Rabu 12/04/24 00:15 WIB	Jumat 12/06/24 14:14 WIB
132	Kabupaten Pulau Taliabu	Abidin Jaaba dan Dedy Mirzan	23,97	2	Sabtu 12/07/24 00:10 WIB	Selasa 12/10/24 19:03 WIB
133	Kabupaten Pulau Taliabu	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi	3,52	2	Sabtu 12/07/24 00:10 WIB	Rabu 12/11/24 22:43 WIB
134	Kabupaten Puncak Jaya	Yuni Wonda dan Mus Kogoya	12,84	2	Rabu 12/18/24 00:00 WIB	Rabu 12/18/24 23:59 WIB
135	Kabupaten Raja Ampat	Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku	24,80	2	Kamis 12/05/24 17:34 WIB	Senin 12/09/24 10:16 WIB
136	Kabupaten Raja Ampat	Ria Siti Naruliah Umlati dan Benoni Saleo	13,62	2	Kamis 12/05/24 17:34 WIB	Senin 12/09/24 17:59 WIB
137	Kabupaten Raja Ampat	Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M. Bula	18,99	2	Kamis 12/05/24 17:34 WIB	Senin 12/09/24 18:00 WIB
138	Kabupaten Rokan Hilir	Afrizal Sintong dan Setiawan	15,28	1	Selasa 12/03/24 00:45 WIB	Kamis 12/05/24 16:48 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
139	Kabupaten Rokan Hulu	Kelmi Amri dan Asparaini	1,17	1	Selasa 12/03/24 20:19 WIB	Kamis 12/05/24 18:11 WIB
140	Kabupaten Samosir	Freddy Lamhot P Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon	27,61	2	Jumat 12/06/24 09:43 WIB	Selasa 12/10/24 14:25 WIB
141	Kabupaten Sampang	Muhammad Bin Mu'Afi Zaini dan Abdullah Hidayat	6,93	0,50	Jumat 12/06/24 00:00 WIB	Selasa 12/10/24 22:09 WIB
142	Kabupaten Sami	Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar	56,14	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 14:24 WIB
143	Kabupaten Sami	Yanni dan Jemmi Esau Maban	31,00	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 14:26 WIB
144	Kabupaten Serang	Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna	40,34	0,50	Rabu 12/04/24 17:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:50 WIB
145	Kabupaten Sigi	Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Samuel Riga	6,31	1,50	Kamis 12/05/24 23:00 WIB	Senin 12/09/24 10:28 WIB
146	Kabupaten Solok Selatan	Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen	10,29	2	Rabu 12/04/24 14:30 WIB	Jumat 12/06/24 22:02 WIB
147	Kabupaten Sorong Selatan	Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin	11,50	2	Jumat 12/06/24 16:00 WIB	Selasa 12/10/24 10:57 WIB
148	Kabupaten Subang	H. Ruhimat dan H. Aceng Kudus	18,25	0,50	Rabu 12/04/24 00:31 WIB	Jumat 12/06/24 10:17 WIB
149	Kabupaten Sukabumi	Iyos Somantri dan Zainul S	6,19	0,50	Jumat 12/06/24 22:45 WIB	Selasa 12/10/24 20:36 WIB
150	Kabupaten Sumba Barat Daya	Fransiskus Marthin Adilalo dan Yeremia Tanggu	5,26	1,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 19:42 WIB
151	Kabupaten Sumenep	Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam	20,69	0,50	Jumat 12/06/24 09:30 WIB	Selasa 12/10/24 11:18 WIB
152	Kabupaten Takalar	Syamsari dan M. Natsir Ibrahim Se	41,53	1,50	Rabu 12/04/24 00:03 WIB	Jumat 12/06/24 16:14 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
153	Kabupaten Tambrauw	Yohanis Yembra dan Petrus Yewen	9,55	2	Jumat 12/06/24 20:25 WIB	Selasa 12/10/24 15:32 WIB
154	Kabupaten Tambrauw	Thomas Kofiaga dan Pieter Mambrasar	11,28	2	Jumat 12/06/24 20:25 WIB	Selasa 12/10/24 20:52 WIB
155	Kabupaten Tana Tidung	Said Agil dan Hendrik	2,50	2	Jumat 12/06/24 00:43 WIB	Selasa 12/10/24 14:21 WIB
156	Kabupaten Tanah Datar	Richi Aprian dan Donny Karsont	4,96	1,50	Kamis 12/05/24 10:51 WIB	Senin 12/09/24 11:37 WIB
157	Kabupaten Tapanuli Tengah	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	7,99	1,50	Kamis 12/05/24 00:05 WIB	Senin 12/09/24 10:52 WIB
158	Kabupaten Tapanuli Utara	Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat	28,55	1,50	Rabu 12/04/24 17:00 WIB	Jumat 12/06/24 22:15 WIB
159	Kabupaten Tasikmalaya	Cecep Nurul Yakim dan Asep Sopari Al-Ayubi	24,52	0,50	Jumat 12/06/24 00:51 WIB	Senin 12/09/24 08:32 WIB
160	Kabupaten Teluk Bintuni	Daniel Asmorom dan Alimudin Baedu	12,14	2	Rabu 12/04/24 00:27 WIB	Jumat 12/06/24 22:22 WIB
161	Kabupaten Teluk Wondama	Hendrik Syake Mambor .Mm dan Andarias Kayukatui	15,44	2	Kamis 12/05/24 02:13 WIB	Senin 12/09/24 08:23 WIB
162	Kabupaten Toba	Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu	6,63	2	Rabu 12/04/24 16:00 WIB	Jumat 12/06/24 21:11 WIB
163	Kabupaten Tolikara	Nus Weya dan Yan Wenda	10,35	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Rabu 12/18/24 21:18 WIB
164	Kabupaten Tolikara	Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi	8,80	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Rabu 12/18/24 21:52 WIB
165	Kabupaten Tolikara	Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi	8,80	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Rabu 12/18/24 22:50 WIB
166	Kabupaten Toraja Utara	Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok	4,41	1,50	Selasa 12/03/24 13:00 WIB	Kamis 12/05/24 19:01 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
167	Kabupaten Tulang Bawang	Hendriwansyah dan Danial Anwar	22,03	1,50	Selasa 12/03/24 00:05 WIB	Kamis 12/05/24 22:29 WIB
168	Kabupaten Wakatobi	Hamirudin dan Muhamad Ali	6,18	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 10:35 WIB
169	Kabupaten Waropen	Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi	12,68	2	Senin 12/09/24 20:40 WIB	Senin 12/09/24 21:31 WIB
170	Kabupaten Yahukimo	Yosep Payage dan Mari Mirin	13,16	1,50	Jumat 12/06/24 10:57 WIB	Selasa 12/10/24 20:44 WIB
171	Kabupaten Yalimo	Aleksander Walilo dan Ahim Helakombo	2,69	2	Selasa 12/10/24 14:30 WIB	Kamis 12/12/24 21:23 WIB
172	Kota Batam	Nuryanto dan Hardi Selamat Hood	32,01	0,50	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Senin 12/09/24 12:32 WIB
173	Kota Bau Bau	Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin	31,74	2	Selasa 12/03/24 00:25 WIB	Kamis 12/05/24 14:33 WIB
174	Kota Bekasi	Heri Koswara dan Sholihin	0,73	0,50	Jumat 12/06/24 15:00 WIB	Selasa 12/10/24 19:10 WIB
175	Kota Bengkulu	Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari	9,65	1,50	Rabu 12/04/24 15:28 WIB	Jumat 12/06/24 21:27 WIB
176	Kota Bima	Mohammad Rum dan Mutmainnah	3,07	2	Selasa 12/03/24 17:27 WIB	Kamis 12/05/24 21:53 WIB
177	Kota Dumai	Ferdiansyah dan Soeparto	52,78	1,50	Rabu 12/04/24 16:00 WIB	Jumat 12/06/24 19:17 WIB
178	Kota Gorontalo	Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku	13,98	2	Selasa 12/03/24 15:05 WIB	Kamis 12/05/24 21:25 WIB
179	Kota Jayapura	Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo	22,69	1,50	Rabu 12/11/24 00:00 WIB	Jumat 12/13/24 21:32 WIB
180	Kota Kendari	Abdul Rasak dan Afdhal	5,45	1,50	Kamis 12/05/24 00:30 WIB	Jumat 12/06/24 21:38 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
181	Kota Kendari	Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin	11,07	1,50	Kamis 12/05/24 00:30 WIB	Senin 12/09/24 21:39 WIB
182	Kota Langsa	Maimul Mahdi dan Nurzahri	14,36	2	Senin 12/02/24 13:55 WIB	Rabu 12/04/24 23:13 WIB
183	Kota Lhokseumawe	Ismail dan Azhar Mahmud	3,22	2	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/04/24 21:53 WIB
184	Kota Makassar	Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara	40,76	0,50	Jumat 12/06/24 20:00 WIB	Selasa 12/10/24 17:12 WIB
185	Kota Manado	Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut	4,43	1,50	Selasa 12/03/24 03:12 WIB	Kamis 12/05/24 14:57 WIB
186	Kota Medan	Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani	17,75	0,50	Jumat 12/06/24 23:58 WIB	Selasa 12/10/24 17:52 WIB
187	Kota Padang	Hendri Septa dan Hidayat	27,42	1	Jumat 12/06/24 11:17 WIB	Selasa 12/10/24 14:58 WIB
188	Kota Padang Panjang	Nasrul dan Eri	4,27	2	Senin 12/02/24 11:42 WIB	Rabu 12/04/24 22:55 WIB
189	Kota Pagar Alam	Alpian dan Alfikriansyah	4,80	2	Rabu 12/04/24 23:00 WIB	Jumat 12/06/24 15:09 WIB
190	Kota Pagar Alam	Hepy Safriani dan Efsi	4,47	2	Rabu 12/04/24 23:00 WIB	Jumat 12/06/24 19:15 WIB
191	Kota Palembang	Yudha Pratomo dan Baharudin	16,20	0,50	Kamis 12/05/24 00:33 WIB	Jumat 12/06/24 23:09 WIB
192	Kota Palu	Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate	37,70	1,50	Kamis 12/05/24 23:53 WIB	Senin 12/09/24 10:03 WIB
193	Kota Parepare	Erna Rasyid Taufan dan M. Rahmat Sjamsu Alam	15,31	2	Senin 12/02/24 17:34 WIB	Rabu 12/04/24 23:56 WIB
194	Kota Payakumbuh	Supardi dan Tri Venindra	9,36	2	Rabu 12/04/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 10:01 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
195	Kota Pekanbaru	Muflihun dan Ade Hartati Rahmat	25,98	0,50	Rabu 12/04/24 01:48 WIB	Jumat 12/06/24 20:43 WIB
196	Kota Sawahlunto	Deri Asta dan Desni Seswinari	58,18	2	Selasa 12/03/24 14:04 WIB	Kamis 12/05/24 23:28 WIB
197	Kota Sorong	Petronela Kambuaya dan Hermanto	16,68	1,50	Senin 12/09/24 21:00 WIB	Rabu 12/11/24 22:00 WIB
198	Kota Sungai Penuh	Ahmadi Zubir dan Ferry Satria	6,10	2	Rabu 12/04/24 17:15 WIB	Jumat 12/06/24 14:52 WIB
199	Kota Tangerang Selatan	Ruhmaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin	24,93	0,50	Rabu 12/06/24 00:21 WIB	Selasa 12/10/24 19:10 WIB
200	Kota Ternate	Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu	11,80	2	Rabu 12/04/24 00:20 WIB	Kamis 12/05/24 22:00 WIB
201	Kota Tidore Kepulauan	Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar	41,12	2	Rabu 12/04/24 16:49 WIB	Jumat 12/06/24 23:18 WIB
202	Kota Tomohon	Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait	2,47	2	Selasa 12/03/24 15:00 WIB	Kamis 12/05/24 13:33 WIB
203	Provinsi Papua Selatan	Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo	33,52	2	Minggu 12/08/24 18:17 WIB	Selasa 12/10/24 22:57 WIB
204	Provinsi Maluku Utara	Aliong Mus dan Sahril Thahir	40,66	2	Minggu 12/08/24 19:26 WIB	Selasa 12/10/24 22:55 WIB
205	Provinsi Sumatera Utara	Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala	28,94	0,50	Senin 12/09/24 17:50 WIB	Selasa 12/10/24 23:59 WIB
206	Provinsi Sulawesi Tenggara	Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan	31,55	1,50	Minggu 12/08/24 04:12 WIB	Rabu 12/11/24 10:58 WIB
207	Provinsi Maluku Utara	Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan	27,50	2	Minggu 12/08/24 19:26 WIB	Rabu 12/11/24 13:08 WIB
208	Provinsi Sulawesi Selatan	Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad. S.	30,65	1	Senin 12/09/24 00:20 WIB	Rabu 12/11/24 18:43 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
209	Provinsi Maluku Utara	Muhammad Kasuba dan Basri Salama	38,55	2	Minggu 12/08/24 19:26 WIB	Rabu 12/11/24 20:11 WIB
210	Provinsi Sulawesi Utara	Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw	5,17	1,50	Sabtu 12/07/24 13:32 WIB	Rabu 12/11/24 21:56 WIB
211	Provinsi Kalimantan Timur	Isran Noor dan Hadi Mulyadi	11,32	1,50	Senin 12/09/24 03:21 WIB	Rabu 12/11/24 21:57 WIB
212	Provinsi Jawa Tengah	Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi	18,28	0,50	Sabtu 12/07/24 17:53 WIB	Rabu 12/11/24 22:13 WIB
213	Provinsi Jawa Timur	Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans	26,28	0,50	Senin 12/09/24 21:30 WIB	Rabu 12/11/24 22:34 WIB
214	Provinsi Kalimantan Tengah	Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail Bin Yahya	15,80	1,50	Minggu 12/08/24 19:35 WIB	Rabu 12/11/24 23:37 WIB
215	Provinsi Papua Barat Daya	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw	21,03	2	Selasa 12/10/24 14:38 WIB	Kamis 12/12/24 22:40 WIB
216	Provinsi Sulawesi Tengah	Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri	6,39	1,50	Kamis 12/12/24 01:33 WIB	Senin 12/16/24 18:52 WIB
217	Provinsi Papua Pegunungan	Befa Yigibalom dan Natan Pahabol	12,19	2	Minggu 12/15/24 19:44 WIB	Rabu 12/18/24 13:51 WIB
218	Provinsi Papua Tengah	Willem Wandik dan Aloisius Giyai	11,66	2	Rabu 12/18/24 13:32 WIB	Rabu 12/18/24 20:32 WIB
219	Provinsi Papua Tengah	Natalis Tabuni dan Titus Natkime	35,83	2	Rabu 12/18/24 13:32 WIB	Jumat 12/20/24 15:24 WIB
220	Provinsi Papua Tengah	Wempi Wetipo dan Agustinus Anggaibak	34,42	2	Rabu 12/18/24 13:32 WIB	Jumat 12/20/24 20:14 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 6 Permohonan yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara dan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan

No	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
1	Kabupaten Barito Selatan	Juana dan Tini Rusdihatie	6,14	2	Kamis 12/05/24 00:05 WIB	Kamis 12/12/24 00:16 WIB
2	Kabupaten Bondowoso	Bambang Soekwanto dan Moh Baqir	2,66	1	Rabu 12/04/24 17:35 WIB	Senin 12/09/24 14:54 WIB
3	Kabupaten Buton Selatan	Hardodi dan La Ode Amiruddin	32,25	2	Rabu 12/04/24 00:32 WIB	Sabtu 12/07/24 12:30 WIB
4	Kabupaten Halmahera Timur	Muhammad Farrel Adhitama dan Thaib Djalaluddin	17,82	2	Kamis 12/05/24 00:00 WIB	Rabu 12/11/24 00:42 WIB
5	Kabupaten Intan Jaya	Apolos Bagau dan Tetairus Widigipa	18,90	2	Sabtu 12/14/24 23:30 WIB	Selasa 12/31/24 14:24 WIB
6	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Adolof Bormasa dan Henrikus Serin	19,20	2	Kamis 12/05/24 14:29 WIB	Selasa 12/10/24 22:40 WIB
7	Kabupaten Klaten	W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan	42,83	0,50	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Kamis 12/05/24 12:37 WIB
8	Kabupaten Konawe Kepulauan	Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	22,18	2	Rabu 12/04/24 15:43 WIB	Minggu 12/08/24 20:25 WIB
9	Kabupaten Malang	Gunawan Hs dan Umar Usman	32,43	0,50	Rabu 12/04/24 22:05 WIB	Sabtu 12/07/24 19:35 WIB
10	Kabupaten Manggarai Barat	Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontani	1,87	1,50	Selasa 12/03/24 21:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:09 WIB
11	Kabupaten Mappi	Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling	3,02	2	Rabu 12/04/24 00:35 WIB	Sabtu 12/07/24 00:20 WIB
12	Kabupaten Minahasa Tenggara	Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu	36,02	2	Selasa 12/03/24 19:55 WIB	Jumat 12/06/24 18:26 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
13	Kabupaten Muara Enim	Nasrun Umar dan Lia Anggraini	3,12	1	Selasa 12/03/24 22:37 WIB	Jumat 12/06/24 17:29 WIB
14	Kabupaten Nias Selatan	Idealisman Dachy dan Foluaha Bidaya	25,19	1,50	Jumat 12/06/24 18:00 WIB	Senin 12/16/24 17:51 WIB
15	Kabupaten Pasaman	Sabar As dan Sukardi	6,36	1,50	Senin 12/02/24 21:48 WIB	Kamis 12/05/24 00:02 WIB
16	Kabupaten Pemalang	Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi	25,11	0,50	Selasa 12/03/24 22:00 WIB	Jumat 12/06/24 23:59 WIB
17	Kabupaten Pringsewu	Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda	29,38	1,50	Senin 12/02/24 11:10 WIB	Senin 12/09/24 09:50 WIB
18	Kabupaten Rote Ndao	Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggalda	41,14	2	Selasa 12/03/24 23:59 WIB	Jumat 12/06/24 23:42 WIB
19	Kabupaten Sabu Raijua	Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado	15,33	2	Senin 12/02/24 00:00 WIB	Rabu 12/18/24 22:49 WIB
20	Kabupaten Sarolangun	Tontawi Jauhari dan A.Harris.Ab	34,47	1,50	Selasa 12/03/24 16:25 WIB	Jumat 12/06/24 15:26 WIB
21	Kabupaten Sikka	Suitbertus Amandus dan Robertus Ray	4,72	1,50	Kamis 12/05/24 03:07 WIB	Rabu 12/18/24 18:56 WIB
22	Kabupaten Sumba Barat	Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba	11,12	2	Selasa 12/03/24 16:59 WIB	Jumat 12/06/24 23:26 WIB
23	Kabupaten Supiori	Yotam Wakum dan Marinus Maryar	17,53	2	Selasa 12/03/24 20:30 WIB	Jumat 12/06/24 17:19 WIB
24	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Egusem Piether Tahun dan Johan Christian Tallo	6,40	1,50	Jumat 12/06/24 23:55 WIB	Rabu 12/11/24 22:55 WIB
25	Kabupaten Tolikara	Irinus Wanimbo dan Arson R. Kogoya	10,75	1,50	Senin 12/16/24 23:55 WIB	Kamis 12/19/24 01:10 WIB



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No	Daerah	Pemohon	Persentase Selisih Suara (%)	Persentase Batas Selisih Suara (%)	Tanggal SK KPUD	Tanggal Pengajuan Permohonan
26	Kabupaten Tulungagung	Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti	16,14	0,50	Kamis 12/05/24 18:59 WIB	Selasa 12/10/24 00:45 WIB
27	Kota Ambon	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	36,69	1,50	Jumat 12/06/24 17:34 WIB	Rabu 12/11/24 00:20 WIB
28	Kota Binjai	Donal Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah	2,98	1,50	Rabu 12/04/24 18:11 WIB	Senin 12/09/24 18:13 WIB
29	Kota Blitar	Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro	6,58	2	Rabu 12/04/24 15:35 WIB	Minggu 12/08/24 00:02 WIB
30	Kota Depok	Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq	6,47	0,50	Senin 12/02/24 22:08 WIB	Jumat 12/06/24 22:15 WIB
31	Kota Langsa	Fazlun Hasan dan Meutia Apriani	21,92	2	Senin 12/02/24 13:55 WIB	Kamis 12/05/24 00:20 WIB
32	Kota Palangkaraya	Rojikinnor dan Vina Panduwinata	27,36	1,50	Selasa 12/03/24 21:00 WIB	Jumat 12/06/24 19:39 WIB
33	Kota Pematangsiantar	Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampubolon	4,69	1,50	Selasa 12/03/24 16:35 WIB	Rabu 12/11/24 16:23 WIB
34	Kota Solok	Nofi Candra dan Leo Murphy	4,38	2	Selasa 12/03/24 00:00 WIB	Jumat 12/06/24 13:39 WIB

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 7 Permohonan Perkara PHPUKADA yang Tidak Diregistrasi dalam e-BRPK

No.	Nomor Permohonan	Daerah
1	126/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Rote Ndao
2	149/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Buton Selatan
3	244/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
4	275/PAN.MK/e-AP3/12/2024	Kabupaten Cirebon



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 8 Perkara PHPUKADA yang Diregistrasi dalam e-BRPK

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	1/PAN.MK/e-AP3/12/2024	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Murung Raya	Bupati
2	2/PAN.MK/e-AP3/12/2024	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	Bupati
3	3/PAN.MK/e-AP3/12/2024	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Bupati
4	4/PAN.MK/e-AP3/12/2024	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Tengah	Bupati
5	5/PAN.MK/e-AP3/12/2024	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
6	6/PAN.MK/e-AP3/12/2024	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
7	7/PAN.MK/e-AP3/12/2024	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
8	8/PAN.MK/e-AP3/12/2024	08/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Lhokseumawe	Walikota
9	9/PAN.MK/e-AP3/12/2024	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
10	10/PAN.MK/e-AP3/12/2024	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pangandaran	Bupati
11	11/PAN.MK/e-AP3/12/2024	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bupati
12	12/PAN.MK/e-AP3/12/2024	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bireuen	Bupati
13	13/PAN.MK/e-AP3/12/2024	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Padang Panjang	Walikota
14	14/PAN.MK/e-AP3/12/2024	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Bupati
15	15/PAN.MK/e-AP3/12/2024	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Langsa	Walikota
16	16/PAN.MK/e-AP3/12/2024	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	Bupati
17	17/PAN.MK/e-AP3/12/2024	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Langsa	Walikota
18	18/PAN.MK/e-AP3/12/2024	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Parepare	Walikota
19	19/PAN.MK/e-AP3/12/2024	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Morotai	Bupati
20	20/PAN.MK/e-AP3/12/2024	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesawaran	Bupati
21	21/PAN.MK/e-AP3/12/2024	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kuantan Singingi	Bupati
22	22/PAN.MK/e-AP3/12/2024	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Klaten	Bupati
23	23/PAN.MK/e-AP3/12/2024	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tomohon	Walikota

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
24	24/PAN.MK/e-AP3/12/2024	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Bupati
25	25/PAN.MK/e-AP3/12/2024	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banyuasin	Bupati
26	26/PAN.MK/e-AP3/12/2024	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Manado	Walikota
27	27/PAN.MK/e-AP3/12/2024	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bau Bau	Walikota
28	28/PAN.MK/e-AP3/12/2024	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Utara	Bupati
29	29/PAN.MK/e-AP3/12/2024	29/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kampar	Bupati
30	30/PAN.MK/e-AP3/12/2024	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Magetan	Bupati
31	31/PAN.MK/e-AP3/12/2024	31/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rokan Hilir	Bupati
32	32/PAN.MK/e-AP3/12/2024	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mandailing Natal	Bupati
33	33/PAN.MK/e-AP3/12/2024	33/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Bupati
34	34/PAN.MK/e-AP3/12/2024	34/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rokan Hulu	Bupati
35	35/PAN.MK/e-AP3/12/2024	35/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Toraja Utara	Bupati
36	36/PAN.MK/e-AP3/12/2024	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	Bupati
37	37/PAN.MK/e-AP3/12/2024	37/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pohuwato	Bupati
38	38/PAN.MK/e-AP3/12/2024	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesisir Barat	Bupati
39	39/PAN.MK/e-AP3/12/2024	39/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mesuji	Bupati
40	40/PAN.MK/e-AP3/12/2024	40/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Gorontalo	Walikota
41	41/PAN.MK/e-AP3/12/2024	41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bima	Walikota
42	42/PAN.MK/e-AP3/12/2024	42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Ternate	Walikota
43	43/PAN.MK/e-AP3/12/2024	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	Bupati
44	44/PAN.MK/e-AP3/12/2024	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Aceh Timur	Bupati
45	45/PAN.MK/e-AP3/12/2024	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ponorogo	Bupati
46	46/PAN.MK/e-AP3/12/2024	46/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
47	47/PAN.MK/e-AP3/12/2024	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sabang	Walikota
48	48/PAN.MK/e-AP3/12/2024	48/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tulang Bawang	Bupati
49	49/PAN.MK/e-AP3/12/2024	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Utara	Bupati
50	50/PAN.MK/e-AP3/12/2024	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sawahlunto	Walikota
51	51/PAN.MK/e-AP3/12/2024	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	Bupati
52	52/PAN.MK/e-AP3/12/2024	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Selatan	Bupati
53	53/PAN.MK/e-AP3/12/2024	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bulukumba	Bupati
54	54/PAN.MK/e-AP3/12/2024	54/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buol	Bupati
55	55/PAN.MK/e-AP3/12/2024	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Bupati
56	56/PAN.MK/e-AP3/12/2024	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Bupati
57	57/PAN.MK/e-AP3/12/2024	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Melawi	Bupati
58	58/PAN.MK/e-AP3/12/2024	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Selatan	Bupati
59	59/PAN.MK/e-AP3/12/2024	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Labuhanbatu	Bupati
60	60/PAN.MK/e-AP3/12/2024	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Payakumbuh	Walikota
61	61/PAN.MK/e-AP3/12/2024	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Wakatobi	Bupati
62	62/PAN.MK/e-AP3/12/2024	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Subang	Bupati
63	63/PAN.MK/e-AP3/12/2024	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangkalan	Bupati
64	64/PAN.MK/e-AP3/12/2024	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banjar	Bupati
65	65/PAN.MK/e-AP3/12/2024	65/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manggarai Barat	Bupati
66	66/PAN.MK/e-AP3/12/2024	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Solok	Walikota
67	67/PAN.MK/e-AP3/12/2024	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Aru	Bupati
68	68/PAN.MK/e-AP3/12/2024	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bupati
69	69/PAN.MK/e-AP3/12/2024	69/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Morotai	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
70	70/PAN.MK/e-AP3/12/2024	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Serang	Bupati
71	71/PAN.MK/e-AP3/12/2024	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sungai Penuh	Walikota
72	72/PAN.MK/e-AP3/12/2024	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasangkayu	Bupati
73	73/PAN.MK/e-AP3/12/2024	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Siak	Bupati
74	74/PAN.MK/e-AP3/12/2024	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pagar Alam	Walikota
75	75/PAN.MK/e-AP3/12/2024	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Parigi Moutong	Bupati
76	76/PAN.MK/e-AP3/12/2024	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Selatan	Bupati
77	77/PAN.MK/e-AP3/12/2024	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarolangun	Bupati
78	78/PAN.MK/e-AP3/12/2024	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton	Bupati
79	79/PAN.MK/e-AP3/12/2024	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Takalar	Bupati
80	80/PAN.MK/e-AP3/12/2024	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Selatan	Bupati
81	81/PAN.MK/e-AP3/12/2024	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Berau	Bupati
82	82/PAN.MK/e-AP3/12/2024	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Supiori	Bupati
83	83/PAN.MK/e-AP3/12/2024	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muara Enim	Bupati
84	84/PAN.MK/e-AP3/12/2024	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muna	Bupati
85	85/PAN.MK/e-AP3/12/2024	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bandung	Bupati
86	86/PAN.MK/e-AP3/12/2024	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Tenggara	Bupati
87	87/PAN.MK/e-AP3/12/2024	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Morowali Utara	Bupati
88	88/PAN.MK/e-AP3/12/2024	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pagar Alam	Walikota
89	89/PAN.MK/e-AP3/12/2024	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Dumai	Walikota
90	90/PAN.MK/e-AP3/12/2024	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palangkaraya	Walikota
91	91/PAN.MK/e-AP3/12/2024	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Utara	Bupati
92	92/PAN.MK/e-AP3/12/2024	92/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa	Bupati
93	93/PAN.MK/e-AP3/12/2024	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
94	94/PAN.MK/e-AP3/12/2024	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Toba	Bupati
95	95/PAN.MK/e-AP3/12/2024	95/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pekanbaru	Walikota
96	96/PAN.MK/e-AP3/12/2024	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamandau	Bupati
97	97/PAN.MK/e-AP3/12/2024	97/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Kendari	Walikota
98	98/PAN.MK/e-AP3/12/2024	98/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belitung Timur	Bupati
99	99/PAN.MK/e-AP3/12/2024	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangka Barat	Bupati
100	100/PAN.MK/e-AP3/12/2024	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belu	Bupati
101	101/PAN.MK/e-AP3/12/2024	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Teluk Bintuni	Bupati
102	102/PAN.MK/e-AP3/12/2024	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bengkulu	Walikota
103	103/PAN.MK/e-AP3/12/2024	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bone Bolango	Bupati
104	104/PAN.MK/e-AP3/12/2024	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Bupati
105	105/PAN.MK/e-AP3/12/2024	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Bupati
106	106/PAN.MK/e-AP3/12/2024	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Tengah	Bupati
107	107/PAN.MK/e-AP3/12/2024	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Utara	Bupati
108	108/PAN.MK/e-AP3/12/2024	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru Selatan	Bupati
109	109/PAN.MK/e-AP3/12/2024	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai Kepulauan	Bupati
110	110/PAN.MK/e-AP3/12/2024	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palembang	Walikota
111	111/PAN.MK/e-AP3/12/2024	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rote Ndao	Bupati
112	112/PAN.MK/e-AP3/12/2024	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Solok Selatan	Bupati
113	113/PAN.MK/e-AP3/12/2024	113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Depok	Walikota
114	114/PAN.MK/e-AP3/12/2024	114/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tapanuli Utara	Bupati
115	115/PAN.MK/e-AP3/12/2024	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pematang	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
116	116/PAN.MK/e-AP3/12/2024	116/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lingga	Bupati
117	117/PAN.MK/e-AP3/12/2024	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Bupati
118	118/PAN.MK/e-AP3/12/2024	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Selatan	Bupati
119	119/PAN.MK/e-AP3/12/2024	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banyuwangi	Bupati
120	120/PAN.MK/e-AP3/12/2024	120/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	Bupati
121	121/PAN.MK/e-AP3/12/2024	121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tidore Kepulauan	Walikota
122	122/PAN.MK/e-AP3/12/2024	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Bupati
123	123/PAN.MK/e-AP3/12/2024	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pinrang	Bupati
124	124/PAN.MK/e-AP3/12/2024	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumba Barat	Bupati
125	125/PAN.MK/e-AP3/12/2024	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	Bupati
126	127/PAN.MK/e-AP3/12/2024	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	Bupati
127	128/PAN.MK/e-AP3/12/2024	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Teluk Wondama	Bupati
128	129/PAN.MK/e-AP3/12/2024	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mappi	Bupati
129	130/PAN.MK/e-AP3/12/2024	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Ilir	Bupati
130	131/PAN.MK/e-AP3/12/2024	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Katingan	Bupati
131	132/PAN.MK/e-AP3/12/2024	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gresik	Bupati
132	133/PAN.MK/e-AP3/12/2024	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Bupati
133	134/PAN.MK/e-AP3/12/2024	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mappi	Bupati
134	135/PAN.MK/e-AP3/12/2024	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Selatan	Bupati
135	136/PAN.MK/e-AP3/12/2024	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Barat Daya	Bupati
136	137/PAN.MK/e-AP3/12/2024	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Bupati
137	138/PAN.MK/e-AP3/12/2024	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bupati
138	139/PAN.MK/e-AP3/12/2024	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Malang	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
139	140/PAN.MK/e-AP3/12/2024	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muaro Jambi	Bupati
140	141/PAN.MK/e-AP3/12/2024	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sorong Selatan	Bupati
141	142/PAN.MK/e-AP3/12/2024	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Blitar	Walikota
142	143/PAN.MK/e-AP3/12/2024	142/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Bupati
143	144/PAN.MK/e-AP3/12/2024	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Kepulauan	Bupati
144	145/PAN.MK/e-AP3/12/2024	144/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Fak Fak	Bupati
145	146/PAN.MK/e-AP3/12/2024	145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palu	Walikota
146	147/PAN.MK/e-AP3/12/2024	146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tarakan	Walikota
147	148/PAN.MK/e-AP3/12/2024	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pringsewu	Bupati
148	150/PAN.MK/e-AP3/12/2024	148/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	Bupati
149	151/PAN.MK/e-AP3/12/2024	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sigi	Bupati
150	152/PAN.MK/e-AP3/12/2024	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tanah Datar	Bupati
151	153/PAN.MK/e-AP3/12/2024	151/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tapanuli Tengah	Bupati
152	154/PAN.MK/e-AP3/12/2024	152/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deli Serdang	Bupati
153	155/PAN.MK/e-AP3/12/2024	153/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kolaka Utara	Bupati
154	156/PAN.MK/e-AP3/12/2024	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarmi	Bupati
155	157/PAN.MK/e-AP3/12/2024	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarmi	Bupati
156	158/PAN.MK/e-AP3/12/2024	156/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nunukan	Bupati
157	159/PAN.MK/e-AP3/12/2024	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bupati
158	160/PAN.MK/e-AP3/12/2024	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Biak Numfor	Bupati
159	161/PAN.MK/e-AP3/12/2024	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Morowali	Bupati
160	162/PAN.MK/e-AP3/12/2024	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pandeglang	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
161	163/PAN.MK/e-AP3/12/2024	161/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Bupati
162	164/PAN.MK/e-AP3/12/2024	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Donggala	Bupati
163	165/PAN.MK/e-AP3/12/2024	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	Bupati
164	166/PAN.MK/e-AP3/12/2024	164/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kapuas	Bupati
165	167/PAN.MK/e-AP3/12/2024	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manokwari Selatan	Bupati
166	168/PAN.MK/e-AP3/12/2024	166/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kotawaringin Timur	Bupati
167	169/PAN.MK/e-AP3/12/2024	167/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Binjai	Walikota
168	170/PAN.MK/e-AP3/12/2024	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palopo	Walikota
169	171/PAN.MK/e-AP3/12/2024	169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Batam	Walikota
170	172/PAN.MK/e-AP3/12/2024	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nganjuk	Bupati
171	173/PAN.MK/e-AP3/12/2024	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai	Bupati
172	174/PAN.MK/e-AP3/12/2024	172/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	Bupati
173	175/PAN.MK/e-AP3/12/2024	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bungo	Bupati
174	176/PAN.MK/e-AP3/12/2024	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Bupati
175	177/PAN.MK/e-AP3/12/2024	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	Bupati
176	178/PAN.MK/e-AP3/12/2024	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lahat	Bupati
177	179/PAN.MK/e-AP3/12/2024	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumba Barat Daya	Bupati
178	180/PAN.MK/e-AP3/12/2024	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	Bupati
179	181/PAN.MK/e-AP3/12/2024	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bogor	Bupati
180	182/PAN.MK/e-AP3/12/2024	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Merangin	Bupati
181	183/PAN.MK/e-AP3/12/2024	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deiyai	Bupati
182	184/PAN.MK/e-AP3/12/2024	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Poso	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
183	185/PAN.MK/e-AP3/12/2024	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pamekasan	Bupati
184	186/PAN.MK/e-AP3/12/2024	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bondowoso	Bupati
185	187/PAN.MK/e-AP3/12/2024	185/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	Gubernur
186	188/PAN.MK/e-AP3/12/2024	186/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kapuas	Bupati
187	189/PAN.MK/e-AP3/12/2024	187/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Cirebon	Bupati
188	190/PAN.MK/e-AP3/12/2024	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Fak Fak	Bupati
189	191/PAN.MK/e-AP3/12/2024	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Selayar	Bupati
190	192/PAN.MK/e-AP3/12/2024	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	Bupati
191	193/PAN.MK/e-AP3/12/2024	191/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Waropen	Bupati
192	194/PAN.MK/e-AP3/12/2024	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bandung Barat	Bupati
193	195/PAN.MK/e-AP3/12/2024	193/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Kendari	Walikota
194	196/PAN.MK/e-AP3/12/2024	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	Bupati
195	197/PAN.MK/e-AP3/12/2024	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	Bupati
196	198/PAN.MK/e-AP3/12/2024	196/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamongan	Bupati
197	199/PAN.MK/e-AP3/12/2024	197/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deiyai	Bupati
198	200/PAN.MK/e-AP3/12/2024	198/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Barat	Bupati
199	201/PAN.MK/e-AP3/12/2024	199/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Semarang	Walikota
200	202/PAN.MK/e-AP3/12/2024	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Cianjur	Bupati
201	203/PAN.MK/e-AP3/12/2024	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Yapen	Bupati
202	204/PAN.MK/e-AP3/12/2024	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tulungagung	Bupati
203	205/PAN.MK/e-AP3/12/2024	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Barat	Bupati
204	206/PAN.MK/e-AP3/12/2024	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Probolinggo	Walikota

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
205	207/PAN.MK/e-AP3/12/2024	205/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	Gubernur
206	208/PAN.MK/e-AP3/12/2024	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumenep	Bupati
207	209/PAN.MK/e-AP3/12/2024	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamuju	Bupati
208	210/PAN.MK/e-AP3/12/2024	208/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sorong Selatan	Bupati
209	211/PAN.MK/e-AP3/12/2024	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Seram Bagian Timur	Bupati
210	212/PAN.MK/e-AP3/12/2024	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tana Tidung	Bupati
211	213/PAN.MK/e-AP3/12/2024	211/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Flores Timur	Bupati
212	214/PAN.MK/e-AP3/12/2024	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Padang	Walikota
213	215/PAN.MK/e-AP3/12/2024	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manokwari	Bupati
214	216/PAN.MK/e-AP3/12/2024	214/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Samosir	Bupati
215	217/PAN.MK/e-AP3/12/2024	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Bupati
216	218/PAN.MK/e-AP3/12/2024	216/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Tengah	Bupati
217	219/PAN.MK/e-AP3/12/2024	217/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bintan	Bupati
218	220/PAN.MK/e-AP3/12/2024	218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Makassar	Walikota
219	221/PAN.MK/e-AP3/12/2024	219/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Selatan	Bupati
220	222/PAN.MK/e-AP3/12/2024	220/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Medan	Walikota
221	223/PAN.MK/e-AP3/12/2024	221/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Bupati
222	224/PAN.MK/e-AP3/12/2024	222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bekasi	Walikota
223	225/PAN.MK/e-AP3/12/2024	223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tangerang Selatan	Walikota
224	226/PAN.MK/e-AP3/12/2024	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Bupati
225	227/PAN.MK/e-AP3/12/2024	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nabire	Bupati
226	228/PAN.MK/e-AP3/12/2024	226/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Keerom	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
227	229/PAN.MK/e-AP3/12/2024	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Bupati
228	230/PAN.MK/e-AP3/12/2024	228/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pegunungan Bintang	Bupati
229	231/PAN.MK/e-AP3/12/2024	229/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Yahukimo	Bupati
230	232/PAN.MK/e-AP3/12/2024	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Bupati
231	233/PAN.MK/e-AP3/12/2024	231/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Bupati
232	234/PAN.MK/e-AP3/12/2024	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jeneponto	Bupati
233	235/PAN.MK/e-AP3/12/2024	233/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Sula	Bupati
234	236/PAN.MK/e-AP3/12/2024	234/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maybrat	Bupati
235	237/PAN.MK/e-AP3/12/2024	235/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sukabumi	Bupati
236	238/PAN.MK/e-AP3/12/2024	236/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Asmat	Bupati
237	239/PAN.MK/e-AP3/12/2024	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sampang	Bupati
238	240/PAN.MK/e-AP3/12/2024	238/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Merauke	Bupati
239	241/PAN.MK/e-AP3/12/2024	239/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Humbang Hasundutan	Bupati
240	242/PAN.MK/e-AP3/12/2024	240/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamuju Tengah	Bupati
241	243/PAN.MK/e-AP3/12/2024	241/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	Gubernur
242	245/PAN.MK/e-AP3/12/2024	242/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nduga	Bupati
243	246/PAN.MK/e-AP3/12/2024	243/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Bupati
244	247/PAN.MK/e-AP3/12/2024	244/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pegunungan Bintang	Bupati
245	248/PAN.MK/e-AP3/12/2024	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	Gubernur
246	249/PAN.MK/e-AP3/12/2024	246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Ambon	Walikota

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
247	250/PAN.MK/e-AP3/12/2024	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sumatera Utara	Gubernur
248	251/PAN.MK/e-AP3/12/2024	248/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Timur	Bupati
249	252/PAN.MK/e-AP3/12/2024	249/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Tenggara	Gubernur
250	253/PAN.MK/e-AP3/12/2024	250/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Tengah	Bupati
251	254/PAN.MK/e-AP3/12/2024	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	Gubernur
252	255/PAN.MK/e-AP3/12/2024	252/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nabire	Bupati
253	256/PAN.MK/e-AP3/12/2024	253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pematangsiantar	Walikota
254	257/PAN.MK/e-AP3/12/2024	254/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kaimana	Bupati
255	258/PAN.MK/e-AP3/12/2024	255/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Bupati
256	259/PAN.MK/e-AP3/12/2024	256/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	Bupati
257	260/PAN.MK/e-AP3/12/2024	257/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Selatan	Gubernur
258	261/PAN.MK/e-AP3/12/2024	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	Gubernur
259	262/PAN.MK/e-AP3/12/2024	259/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maybrat	Bupati
260	263/PAN.MK/e-AP3/12/2024	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Bupati
261	264/PAN.MK/e-AP3/12/2024	261/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Utara	Gubernur
262	265/PAN.MK/e-AP3/12/2024	262/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kalimantan Timur	Gubernur
263	266/PAN.MK/e-AP3/12/2024	263/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Jawa Tengah	Gubernur
264	267/PAN.MK/e-AP3/12/2024	264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sorong	Walikota
265	268/PAN.MK/e-AP3/12/2024	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Jawa Timur	Gubernur
266	269/PAN.MK/e-AP3/12/2024	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Gubernur
267	270/PAN.MK/e-AP3/12/2024	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
268	271/PAN.MK/e-AP3/12/2024	268/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Tenggara	Bupati
269	272/PAN.MK/e-AP3/12/2024	269/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kalimantan Tengah	Gubernur
270	273/PAN.MK/e-AP3/12/2024	270/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bupati
271	274/PAN.MK/e-AP3/12/2024	271/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Yapen	Bupati
272	276/PAN.MK/e-AP3/12/2024	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	Bupati
273	277/PAN.MK/e-AP3/12/2024	273/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Selatan	Bupati
274	278/PAN.MK/e-AP3/12/2024	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayapura	Bupati
275	279/PAN.MK/e-AP3/12/2024	275/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Yalimo	Bupati
276	280/PAN.MK/e-AP3/12/2024	276/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Barat Daya	Gubernur
277	281/PAN.MK/e-AP3/12/2024	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Malang	Walikota
278	282/PAN.MK/e-AP3/12/2024	278/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayawijaya	Bupati
279	283/PAN.MK/e-AP3/12/2024	279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Jayapura	Walikota
280	284/PAN.MK/e-AP3/12/2024	280/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Bupati
281	285/PAN.MK/e-AP3/12/2024	281/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Bupati
282	286/PAN.MK/e-AP3/12/2024	282/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Bupati
283	287/PAN.MK/e-AP3/12/2024	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Bupati
284	288/PAN.MK/e-AP3/12/2024	284/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Tengah	Gubernur
285	289/PAN.MK/e-AP3/12/2024	285/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lanny Jaya	Bupati
286	290/PAN.MK/e-AP3/12/2024	286/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Bupati
287	291/PAN.MK/e-AP3/12/2024	287/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
288	292/PAN.MK/e-AP3/12/2024	288/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Selatan	Bupati
289	293/PAN.MK/e-AP3/12/2024	289/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lanny Jaya	Bupati
290	294/PAN.MK/e-AP3/12/2024	290/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Alor	Bupati
291	295/PAN.MK/e-AP3/12/2024	291/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	Bupati
292	296/PAN.MK/e-AP3/12/2024	292/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati
293	297/PAN.MK/e-AP3/12/2024	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	Gubernur
294	298/PAN.MK/e-AP3/12/2024	294/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sikka	Bupati
295	299/PAN.MK/e-AP3/12/2024	295/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Tengah	Gubernur
296	300/PAN.MK/e-AP3/12/2024	296/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	Bupati
297	301/PAN.MK/e-AP3/12/2024	297/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
298	302/PAN.MK/e-AP3/12/2024	298/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	Bupati
299	303/PAN.MK/e-AP3/12/2024	299/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
300	304/PAN.MK/e-AP3/12/2024	300/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sabu Raijua	Bupati
301	305/PAN.MK/e-AP3/12/2024	301/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati
302	306/PAN.MK/e-AP3/12/2024	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	Gubernur
303	307/PAN.MK/e-AP3/12/2024	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
304	308/PAN.MK/e-AP3/12/2024	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua	Gubernur
305	309/PAN.MK/e-AP3/12/2024	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Bupati
306	310/PAN.MK/e-AP3/12/2024	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
307	311/PAN.MK/e-AP3/12/2024	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati
308	312/PAN.MK/e-AP3/12/2024	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Tengah	Gubernur
309	313/PAN.MK/e-AP3/12/2024	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Tengah	Gubernur
310	314/PAN.MK/e-AP3/12/2024	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 9 Perkara PHPUKADA yang Ditangani di Panel I

No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Murung Raya	Bupati
2	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	Bupati
3	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Bupati
4	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Tengah	Bupati
5	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pangandaran	Bupati
6	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Padang Panjang	Walikota
7	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Bupati
8	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	Bupati
9	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Morotai	Bupati
10	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Klaten	Bupati
11	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Bupati
12	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banyuasin	Bupati
13	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bau Bau	Walikota
14	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Utara	Bupati
15	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Magetan	Bupati
16	31/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rokan Hilir	Bupati
17	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mandailing Natal	Bupati
18	34/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rokan Hulu	Bupati
19	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	Bupati
20	42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Ternate	Walikota
21	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	Bupati
22	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Utara	Bupati
23	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sawahlunto	Walikota
24	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	Bupati
25	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Payakumbuh	Walikota
26	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Wakatobi	Bupati
27	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Subang	Bupati
28	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangkalan	Bupati
29	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Solok	Walikota
30	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Aru	Bupati
31	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bupati
32	69/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Morotai	Bupati
33	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Siak	Bupati
34	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Selatan	Bupati
35	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
36	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Supiori	Bupati
37	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muara Enim	Bupati
38	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muna	Bupati
39	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bandung	Bupati
40	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palangkaraya	Walikota
41	97/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Kendari	Walikota
42	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangka Barat	Bupati
43	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Tengah	Bupati
44	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Utara	Bupati
45	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Solok Selatan	Bupati
46	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pemalang	Bupati
47	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Selatan	Bupati
48	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Teluk Wondama	Bupati
49	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gresik	Bupati
50	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Bupati
51	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Barat Daya	Bupati
52	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tanah Datar	Bupati
53	153/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kolaka Utara	Bupati
54	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarmi	Bupati
55	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarmi	Bupati
56	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bupati
57	161/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Bupati
58	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	Bupati
59	164/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kapuas	Bupati
60	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manokwari Selatan	Bupati
61	166/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kotawaringin Timur	Bupati
62	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	Bupati
63	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lahat	Bupati
64	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	Bupati
65	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bogor	Bupati
66	186/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kapuas	Bupati
67	187/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Cirebon	Bupati
68	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bandung Barat	Bupati
69	193/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Kendari	Walikota
70	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	Bupati
71	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
72	199/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Semarang	Walikota
73	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Cianjur	Bupati
74	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Yapen	Bupati
75	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Probolinggo	Walikota
76	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Padang	Walikota
77	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manokwari	Bupati
78	221/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Bupati
79	222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bekasi	Walikota
80	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Bupati
81	233/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Sula	Bupati
82	234/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maybrat	Bupati
83	235/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sukabumi	Bupati
84	242/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nduga	Bupati
85	243/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Bupati
86	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sumatera Utara	Gubernur
87	250/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Tengah	Bupati
88	259/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maybrat	Bupati
89	261/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Utara	Gubernur
90	263/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Jawa Tengah	Gubernur
91	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Gubernur
92	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Bupati
93	268/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Tenggara	Bupati
94	271/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Yapen	Bupati
95	273/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Selatan	Bupati
96	276/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Barat Daya	Gubernur
97	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Malang	Walikota
98	281/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Bupati
99	282/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Bupati
100	286/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Bupati
101	295/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Tengah	Gubernur
102	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Tengah	Gubernur
103	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Tengah	Gubernur

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 10 Perkara PHPUKADA yang Ditangani di Panel II

No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	08/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Lhokseumawe	Walikota
2	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bireuen	Bupati
3	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Langsa	Walikota
4	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Langsa	Walikota
5	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesawaran	Bupati
6	29/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kampar	Bupati
7	33/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Bupati
8	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesisir Barat	Bupati
9	39/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mesuji	Bupati
10	41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bima	Walikota
11	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ponorogo	Bupati
12	48/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tulang Bawang	Bupati
13	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Selatan	Bupati
14	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Melawi	Bupati
15	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Selatan	Bupati
16	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Labuhanbatu	Bupati
17	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banjar	Bupati
18	65/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manggarai Barat	Bupati
19	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sungai Penuh	Walikota
20	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarolangun	Bupati
21	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Selatan	Bupati
22	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Berau	Bupati
23	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Tenggara	Bupati
24	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Dumai	Walikota
25	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Toba	Bupati
26	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamandau	Bupati
27	98/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belitung Timur	Bupati
28	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bengkulu	Walikota
29	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rote Ndao	Bupati
30	113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Depok	Walikota
31	114/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tapanuli Utara	Bupati
32	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banyuwangi	Bupati
33	120/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	Bupati
34	121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tidore Kepulauan	Walikota
35	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pinrang	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
36	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumba Barat	Bupati
37	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	Bupati
38	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	Bupati
39	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mappi	Bupati
40	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Katingan	Bupati
41	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mappi	Bupati
42	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Selatan	Bupati
43	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Bupati
44	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bupati
45	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Malang	Bupati
46	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muaro Jambi	Bupati
47	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sorong Selatan	Bupati
48	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Blitar	Walikota
49	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Kepulauan	Bupati
50	144/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Fak Fak	Bupati
51	146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tarakan	Walikota
52	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pringsewu	Bupati
53	148/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	Bupati
54	151/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tapanuli Tengah	Bupati
55	152/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deli Serdang	Bupati
56	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Biak Numfor	Bupati
57	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pandeglang	Bupati
58	167/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Binjai	Walikota
59	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palopo	Walikota
60	169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Batam	Walikota
61	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nganjuk	Bupati
62	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai	Bupati
63	172/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	Bupati
64	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bungo	Bupati
65	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Merangin	Bupati
66	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pamekasan	Bupati
67	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Fak Fak	Bupati
68	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	Bupati
69	191/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Waropen	Bupati
70	196/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamongan	Bupati
71	198/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Barat	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
72	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Barat	Bupati
73	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumenep	Bupati
74	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamuju	Bupati
75	208/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sorong Selatan	Bupati
76	214/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Samosir	Bupati
77	216/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Tengah	Bupati
78	217/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bintan	Bupati
79	220/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Medan	Walikota
80	223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tangerang Selatan	Walikota
81	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Bupati
82	228/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pegunungan Bintang	Bupati
83	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jenepono	Bupati
84	239/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Humbang Hasundutan	Bupati
85	244/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pegunungan Bintang	Bupati
86	246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Ambon	Walikota
87	249/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Tenggara	Gubernur
88	254/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kaimana	Bupati
89	255/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Bupati
90	256/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	Bupati
91	257/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Selatan	Gubernur
92	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Bupati
93	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Jawa Timur	Gubernur
94	270/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Bupati
95	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	Bupati
96	275/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Yalimo	Bupati
97	278/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayawijaya	Bupati
98	279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Jayapura	Walikota
99	291/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	Bupati
100	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	Gubernur
101	296/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	Bupati
102	298/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	Bupati
103	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	Gubernur
104	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua	Gubernur



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 11 Perkara PHPUKADA yang Ditangani di Panel III

No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
2	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
3	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
4	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
5	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bupati
6	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Parepare	Walikota
7	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kuantan Singingi	Bupati
8	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tomohon	Walikota
9	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Manado	Walikota
10	35/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Toraja Utara	Bupati
11	37/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pohuwato	Bupati
12	40/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Gorontalo	Walikota
13	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Aceh Timur	Bupati
14	46/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow	Bupati
15	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sabang	Walikota
16	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bulukumba	Bupati
17	54/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buol	Bupati
18	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Bupati
19	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Bupati
20	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Serang	Bupati
21	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasangkayu	Bupati
22	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pagar Alam	Walikota
23	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Parigi Moutong	Bupati
24	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Takalar	Bupati
25	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Morowali Utara	Bupati
26	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pagar Alam	Walikota
27	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Utara	Bupati
28	92/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa	Bupati
29	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Bupati
30	95/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pekanbaru	Walikota
31	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belu	Bupati
32	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Teluk Bintuni	Bupati
33	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bone Bolango	Bupati
34	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Bupati
35	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
36	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru Selatan	Bupati
37	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai Kepulauan	Bupati
38	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palembang	Walikota
39	116/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lingga	Bupati
40	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Bupati
41	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Bupati
42	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Ilir	Bupati
43	142/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Bupati
44	145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palu	Walikota
45	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sigi	Bupati
46	156/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nunukan	Bupati
47	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Morowali	Bupati
48	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Donggala	Bupati
49	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Bupati
50	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumba Barat Daya	Bupati
51	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deiyai	Bupati
52	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Poso	Bupati
53	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bondowoso	Bupati
54	185/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	Gubernur
55	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Selayar	Bupati
56	197/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deiyai	Bupati
57	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tulungagung	Bupati
58	205/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	Gubernur
59	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Seram Bagian Timur	Bupati
60	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tana Tidung	Bupati
61	211/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Flores Timur	Bupati
62	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Bupati
63	218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Makassar	Walikota
64	219/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Selatan	Bupati
65	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nabire	Bupati
66	226/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Keerom	Bupati
67	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Bupati
68	229/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Yahukimo	Bupati
69	231/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Bupati
70	236/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Asmat	Bupati
71	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sampang	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
72	238/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Merauke	Bupati
73	240/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamuju Tengah	Bupati
74	241/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	Gubernur
75	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	Gubernur
76	248/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Timur	Bupati
77	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	Gubernur
78	252/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nabire	Bupati
79	253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pematangsiantar	Walikota
80	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	Gubernur
81	262/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kalimantan Timur	Gubernur
82	264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sorong	Walikota
83	269/PHPU.GUB-XXIII/2025	Kalimantan Tengah	Gubernur
84	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayapura	Bupati
85	280/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Bupati
86	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Bupati
87	284/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Tengah	Gubernur
88	285/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lanny Jaya	Bupati
89	287/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Bupati
90	288/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Selatan	Bupati
91	289/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lanny Jaya	Bupati
92	290/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Alor	Bupati
93	292/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati
94	294/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sikka	Bupati
95	297/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
96	299/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
97	300/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sabu Raijua	Bupati
98	301/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati
99	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
100	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Bupati
101	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Bupati
102	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati
103	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 12 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pendahuluan Menurut Klasifikasi Para Pihak

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
1	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
2	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	2
3	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
4	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
5	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	2	1	1	0	1	2
6	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
7	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	2	2	1	1	0	1	2
8	08/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	1
9	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
10	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	1	1	0	0	2
11	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
12	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
13	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	2
14	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
15	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
16	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	2
17	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	2	0	0	2	1
18	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
19	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
20	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
21	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
22	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	2
23	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
24	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
25	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
26	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
27	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
28	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
29	29/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
30	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	0	0	2	2
31	31/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	2
32	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
33	33/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
34	34/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
35	35/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
36	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	3
37	37/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
38	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
39	39/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
40	40/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	4	2
41	41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
42	42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
43	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	3
44	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
45	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
46	46/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
47	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
48	48/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
49	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	0
50	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	2	0	1	4	2
51	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
52	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	0
53	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
54	54/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
55	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
56	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
57	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
58	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	0
59	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
60	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
61	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
62	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	1	1	0	2	2
63	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	0	0	2	2
64	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
65	65/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
66	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	1
67	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	1	0	2	2
68	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	0	0	2	2
69	69/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	1
70	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
71	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
72	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	0	2	2
73	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	2
74	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
75	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	2
76	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
77	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
78	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
79	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
80	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
81	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	2	0	2
82	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	1	1	1	0	2	2
83	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	2	0	2	2
84	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
85	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
86	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
87	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
88	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
89	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
90	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
91	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
92	92/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
93	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
94	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
95	95/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	3	2
96	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
97	97/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
98	98/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	0	0	2	2
99	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
100	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
101	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
102	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	2
103	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
104	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
105	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
106	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	0	0	2	2
107	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
108	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
109	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
110	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	3	2
111	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
112	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
113	113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	0	1	0	2	2
114	114/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
115	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	0	2
116	116/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	2
117	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
118	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
119	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
120	120/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	0
121	121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
122	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	0
123	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	2	0	0	0	0	0
124	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
125	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	2	1	1	0	0	1
126	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	1
127	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
128	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
129	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	2
130	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
131	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
132	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
133	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
134	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	0		0	0
135	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
136	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
137	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	1
138	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
139	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
140	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	2
141	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
142	142/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	2
143	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	0
144	144/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	2
145	145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
146	146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	2	1	1	0	2	1
147	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	2	0	2	1
148	148/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
149	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
150	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
151	151/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	1	1	1
152	152/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
153	153/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
154	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
155	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
156	156/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
157	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
158	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	0	0	0	0
159	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	3	2
160	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	1
161	161/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	3
162	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
163	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
164	164/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
165	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
166	166/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
167	167/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	3	2	0	0	1	2
168	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	1
169	169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
170	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
171	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	0
172	172/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
173	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
174	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	0	0	4	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
175	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
176	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
177	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
178	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	1
179	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
180	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
181	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
182	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
183	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
184	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
185	185/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	0	1	1	0	0	1
186	186/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
187	187/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
188	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
189	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
190	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
191	191/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
192	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
193	193/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
194	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
195	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
196	196/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
197	197/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	1	0	2	1
198	198/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
199	199/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	0	1	1	0	0	2
200	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
201	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	3	3	0	2	2
202	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
203	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
204	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	0	1	1	0	0	2
205	205/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	2
206	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
207	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
208	208/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
209	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
210	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
211	211/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	2	0	2	2
212	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
213	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
214	214/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
215	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
216	216/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
217	217/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
218	218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
219	219/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
220	220/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
221	221/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	2	2	0	2	3
222	222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
223	223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	2	0	1	1	0	2	2
224	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	2	0	2
225	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
226	226/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
227	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	1	3	2
228	228/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
229	229/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
230	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
231	231/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	2
232	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
233	233/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
234	234/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0	2	0
235	235/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
236	236/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
237	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
238	238/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
239	239/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
240	240/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
241	241/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
242	242/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	0
243	243/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0	1	3
244	244/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
245	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
246	246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	2
247	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
248	248/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
249	249/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
250	250/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	0
251	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
252	252/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	2
253	253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
254	254/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
255	255/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	2	2	2
256	256/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
257	257/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
258	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
259	259/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	2	0	0
260	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	2
261	261/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
262	262/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
263	263/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
264	264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
265	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
266	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	2	1	0	2	1
267	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0	2	3
268	268/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
269	269/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
270	270/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
271	271/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	3	3	0	2	2
272	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
273	273/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
274	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	4	2
275	275/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
276	276/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
277	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	2
278	278/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	0	2
279	279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
280	280/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	1	1	2
281	281/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	3	0	2	2
282	282/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	3	3	0	2	2
283	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	0
284	284/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
285	285/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
286	286/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	3	3	0	1	2
287	287/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	0
288	288/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	0	0	2	2
289	289/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	2	0	2	2
290	290/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
291	291/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
292	292/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
293	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
294	294/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
295	295/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
296	296/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
297	297/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	1
298	298/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
299	299/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	2	1	1	1
300	300/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
301	301/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	1	0	2	0
302	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
303	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
304	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
305	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	1
306	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
307	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	1
308	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
309	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
310	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	0



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 13 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
1	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
2	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
3	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
4	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	1	0	2
5	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	2	1	1	0	1	2
6	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
7	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	2	2	1	1	0	1	2
8	08/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
9	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
10	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
11	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
12	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
13	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	1	0	2
14	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
15	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
16	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
17	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	0	2	0	1	1
18	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
19	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
20	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	1	0	2	2
21	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
22	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
23	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
24	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
25	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
26	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
27	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	0	1	0	2	2
28	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
29	29/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
30	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
31	31/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
32	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
33	33/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
34	34/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
35	35/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
36	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
37	37/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
38	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
39	39/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	2
40	40/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	4	2
41	41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	2	1	0	2	2
42	42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
43	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
44	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
45	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
46	46/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2
47	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
48	48/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
49	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	2	0	2
50	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	2	1	0	2
51	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
52	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
53	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
54	54/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
55	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
56	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
57	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	2	0	2
58	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
59	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
60	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
61	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	0	1	1	2	0	2
62	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
63	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	1	1	2
64	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	0	2	0	0	2	2
65	65/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
66	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
67	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
68	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	2
69	69/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
70	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
71	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
72	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	0	2	2
73	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	2
74	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
75	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
76	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	0	1	1	2	0	2
77	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
78	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
79	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
80	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
81	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
82	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
83	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
84	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
85	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
86	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
87	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
88	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
89	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
90	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
91	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	0	2
92	92/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	3	2
93	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
94	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
95	95/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
96	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
97	97/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	3
98	98/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
99	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
100	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
101	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
102	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
103	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
104	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
105	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
106	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
107	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
108	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	2	0	2	2
109	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
110	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	4	2
111	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
112	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
113	113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
114	114/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
115	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
116	116/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
117	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
118	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
119	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
120	120/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
121	121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
122	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	0	0	2	2
123	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
124	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
125	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	1	0	5	3
126	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	1	0	5	3
127	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
128	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
129	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
130	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
131	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
132	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
133	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
134	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
135	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
136	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
137	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
138	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
139	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
140	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
141	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
142	142/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
143	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	2	2
144	144/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
145	145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
146	146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	2	1	0	2	2
147	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
148	148/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	3
149	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
150	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
151	151/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
152	152/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
153	153/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
154	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	2	0	2	2
155	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	2	0	2	2
156	156/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
157	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
158	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
159	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	4	2
160	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
161	161/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	2	0	2	4
162	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
163	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0	2	3
164	164/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
165	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
166	166/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
167	167/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
168	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
169	169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
170	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
171	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
172	172/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	3
173	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
174	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	0	1	1	0	4	2
175	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	2	3	0	2	1
176	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
177	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	2
178	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	3	0	2	1
179	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
180	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
181	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	2
182	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
183	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
184	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
185	185/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	2
186	186/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
187	187/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	2	0	2	2
188	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
189	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	0	2
190	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	3
191	191/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
192	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
193	193/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	3
194	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	3	0	2	1
195	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0	1	3
196	196/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
197	197/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
198	198/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
199	199/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	2
200	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
201	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
202	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
203	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
204	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	2
205	205/PHPU.GUB-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
206	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
207	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
208	208/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
209	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
210	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
211	211/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
212	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
213	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
214	214/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
215	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	2	1
216	216/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
217	217/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
218	218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
219	219/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
220	220/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
221	221/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	3	1	0	2	4
222	222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
223	223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	2	0	1	1	0	2	2
224	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	2	0	2
225	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	2	0	1	2
226	226/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
227	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	4	2
228	228/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
229	229/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
230	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
231	231/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
232	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
233	233/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
234	234/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	4
235	235/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	1	1	0	2	2
236	236/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
237	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	0	1	1	0	2	2
238	238/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
239	239/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
240	240/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
241	241/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
242	242/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
243	243/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0	2	4
244	244/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
245	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
246	246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	2
247	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
248	248/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
249	249/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
250	250/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	2
251	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
252	252/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	2
253	253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
254	254/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
255	255/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
256	256/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
257	257/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
258	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
259	259/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
260	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	2
261	261/PHPU.GUB-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
262	262/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
263	263/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
264	264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	0	0	0	0	0
265	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
266	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
267	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	1	1	1	4
268	268/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
269	269/PHPU.GUB-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
270	270/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
271	271/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
272	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
273	273/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	1	0	2	2
274	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
275	275/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	0	2	2
276	276/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
277	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	0	2
278	278/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	0	2
279	279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
280	280/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
281	281/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	3	0	2	3
282	282/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	3	0	2	3
283	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	2
284	284/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
285	285/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
286	286/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	3	3	0	2	3
287	287/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
288	288/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	2	0	1	2
289	289/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
290	290/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
291	291/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
292	292/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
293	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	2
294	294/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
295	295/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	3	3	0	2	6
296	296/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
297	297/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	1	1	1
298	298/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
299	299/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-
300	300/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
301	301/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
302	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
303	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
304	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	2
305	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	1	1	2
306	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
307	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	-	-	-	-	-	-	-

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
308	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	3	3	0	1	6
309	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	3	3	0	2	6
310	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 14 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
1	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	0	1
2	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
3	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
4	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
5	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
6	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	1
7	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
8	08/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
9	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
10	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	1
11	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
12	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
13	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
14	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
15	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
16	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	1
17	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
18	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
19	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
20	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
21	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
22	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
23	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
24	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
25	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
26	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
27	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
28	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
29	29/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
30	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
31	31/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
32	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
33	33/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	0	1	2
34	34/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
35	35/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
36	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
37	37/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
38	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	1	0	1	1
39	39/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
40	40/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
41	41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	2
42	42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
43	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
44	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
45	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
46	46/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
47	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
48	48/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	2
49	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
50	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	0	0	0	1	1
51	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
52	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
53	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
54	54/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	1
55	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
56	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
57	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
58	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
59	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
60	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
61	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
62	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
63	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
64	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	1	1	1
65	65/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
66	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	0	0	0	1	1
67	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
68	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
69	69/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
70	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
71	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	2	2
72	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
73	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
74	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
75	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
76	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
77	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	0	0	1	1
78	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
79	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
80	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2
81	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	1	1
82	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
83	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
84	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
85	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
86	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	2
87	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	1
88	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
89	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	1
90	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
91	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	1
92	92/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
93	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
94	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
95	95/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
96	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	1	1
97	97/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
98	98/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2
99	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
100	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
101	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
102	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
103	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
104	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
105	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
106	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
107	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	0	0	1	1
108	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	2	1
109	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
110	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	0	3	1
111	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	2	0	1	1
112	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	0	0	1	1
113	113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	1	0	2	1
114	114/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	2	0	1	1
115	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	0	0	0	1
116	116/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	1
117	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
118	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
119	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	1
120	120/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	1	0	1
121	121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	2	0	0	1	1
122	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
123	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	1	1
124	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	0	1	2
125	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	2	0	0	1	1
126	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
127	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
128	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
129	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	0	1	0	2
130	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	0	1
131	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1
132	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
133	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	0	1
134	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
135	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	0	1
136	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
137	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
138	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	0	0	1	1
139	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	0	0	1	1
140	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	2	0	0



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
141	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
142	142/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	0
143	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	2	0	1	1	1
144	144/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	0	1
145	145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
146	146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
147	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	0	0	2	2
148	148/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
149	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
150	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
151	151/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
152	152/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	1
153	153/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	0	1
154	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	0
155	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	1	0	1
156	156/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	0	1	1	2
157	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
158	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
159	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	0	0	2	1
160	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	0	2
161	161/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	1	0	1
162	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	1	0	2	2
163	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
164	164/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
165	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1
166	166/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
167	167/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2
168	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	2
169	169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	0	0	1	1
170	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	1
171	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
172	172/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	2

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
173	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
174	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	2	1
175	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
176	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
177	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	2
178	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
179	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	1	0	1
180	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	2	0	0	1	1
181	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	1	0	1	2
182	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	1	2
183	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	0	0	1	1
184	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
185	185/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	0	0	1	0	0	1
186	186/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
187	187/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
188	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
189	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	1	0	0	1
190	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	2
191	191/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
192	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
193	193/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
194	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
195	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	0	1
196	196/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	0	0	1	2
197	197/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
198	198/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
199	199/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	0	0	0	1
200	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
201	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	0	0	1	0
202	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	0	1
203	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
204	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	0	1	0	0	0	1
205	205/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	0	0	1	0	0	1
206	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	2



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
207	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	1	1
208	208/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	1	1
209	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
210	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
211	211/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
212	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
213	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
214	214/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
215	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
216	216/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2
217	217/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	0	1
218	218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
219	219/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
220	220/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	0	1	0	1
221	221/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
222	222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
223	223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
224	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
225	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	1	1
226	226/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	0	0	1	1
227	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	2	1
228	228/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	0
229	229/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	2
230	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
231	231/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	1
232	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
233	233/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	2	1
234	234/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	1	0	1
235	235/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
236	236/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	2	1	0	2	2
237	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	1
238	238/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	2
239	239/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
240	240/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
241	241/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	0	0	0	1	1
242	242/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	0
243	243/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
244	244/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
245	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
246	246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1
247	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
248	248/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	2
249	249/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	2	0	0	1	1
250	250/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
251	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	0	1
252	252/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	1	2
253	253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	0	0	2	2
254	254/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
255	255/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
256	256/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
257	257/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
258	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	1	0	0	1	1
259	259/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	1	0	0
260	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	2	1
261	261/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
262	262/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	2	0	0	1	1
263	263/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
264	264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	1	0	1
265	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
266	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
267	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
268	268/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
269	269/PHPU.GUB-XXIII/2025	1	1	0	1	1	1	1
270	270/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
271	271/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	0
272	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
273	273/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
274	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
275	275/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	1	0	1	1
276	276/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
277	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	0	1
278	278/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	0	1	1	2
279	279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
280	280/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	2
281	281/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
282	282/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	0
283	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	2
284	284/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
285	285/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
286	286/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
287	287/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	0	0	1	1
288	288/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
289	289/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
290	290/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	0	0	1	0	1	1
291	291/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	0	0	2	1
292	292/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	0	0	1	0
293	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
294	294/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
295	295/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
296	296/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	1	0	0	1
297	297/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	2	1	1	1
298	298/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	1	1	1	0	1
299	299/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	1	1	1
300	300/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	1	0	1
301	301/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	2	1
302	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	0	0	1	0	1	1
303	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
304	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	1	1	2
305	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	1	1	1	1
306	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	1	1	1
307	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	0	2	0	1	0
308	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
309	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	1
310	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	0



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 15 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak

No.	Nomor Perkara	Pemohon				Termohon	
		Prinsipal	Kuasa Hukum	Saksi/Ahli	KPU	Kuasa Hukum	Saksi/Ahli
1	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	2	4
2	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	2	1	4
3	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	4	4	1	2	2
4	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	1	3
5	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	0	2	4
6	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	2	4
7	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	1	2
8	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	3	1
9	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	1	3
10	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	2	1	4
11	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	4	4	2	1	4
12	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	1	4
13	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	2	1	2	4
14	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	1	1	4
15	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	2	2	3
16	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	1	4
17	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	3	1	2	4
18	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	5	4	1	1	4
19	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	4	2	2	4
20	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	5	4	3	2	4
21	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	1	1	4
22	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	1	2	1
23	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	2	1	1	1
24	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	2	1	1	2
25	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	2	4
26	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	3	2	3
27	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	2	2	3	1	1	3
28	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	2	3
29	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	1	2	2
30	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	7	1	2	3	1
31	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	1	4	3
32	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	3	2	0	2	3
33	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	6	2	1	6
34	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	1	3

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon				Termohon	
		Prinsipal	Kuasa Hukum	Saksi/Ahli	KPU	Kuasa Hukum	Saksi/Ahli
35	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	2	4
36	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	3	3	3	2	4
37	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	2	3	1	2	4
38	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	6	2	1	6
39	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	3	0	3	4	0
40	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	1	3	1	3



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 16 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak (Lanjutan)

No.	Nomor Perkara	Pihak Terkait			Pemberi Keterangan	
		Prinsipal	Kuasa Hukum	Saksi/Ahli	Bawaslu	Non Bawaslu
1	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	4	0
2	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	0
3	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	4	4	3	0
4	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	0
5	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	2	0
6	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	3	0
7	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	0
8	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	0
9	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	5	0
10	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	3	0
11	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1	3	4	3	0
12	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	4	0
13	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	3	0
14	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	2	2	0
15	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	3	0
16	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	4	0
17	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	2	3	0
18	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	2	0
19	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	4	0
20	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	3	0
21	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	0
22	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	2	3	0
23	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	3	2	0
24	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	2	2	0
25	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	4	0
26	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	2	0
27	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	7	6	3	4
28	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	3	0
29	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	3	0
30	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	5	1	2	0
31	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	5	4	2	0
32	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	2	3	4	0
33	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	3	5	3	0

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pihak Terkait			Pemberi Keterangan	
		Prinsipal	Kuasa Hukum	Saksi/Ahli	Bawaslu	Non Bawaslu
34	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	4	6	0
35	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	5	4	2	0
36	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	2	3	5	2
37	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	4	4	3	2
38	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	6	2	0
39	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	2	3	0	4	0
40	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	3	3	3	5



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 17 Perkara yang Dilanjutkan ke Sidang Pembuktian

No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon
1	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	Mara Ondak dan Desrizal
2	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Tengah	La Andi dan Abidin
3	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Muhamad Arifin (Selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan)
4	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesawaran	Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali
5	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Budi Antoni Aljufri
6	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Utara	Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya
7	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Magetan	Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa
8	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mandailing Natal	Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst
9	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	Daliyus K dan Heri Miheldi
10	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Aceh Timur	Sulaiman dan Abdul Hamid
11	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sabang	Ferdiansyah dan Muhammad Isa
12	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo
13	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf
14	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Rifai dan Yevri Sudianto
15	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Serang	Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna
16	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Siak	Alfedri dan Husni Merza
17	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Parigi Moutong	M. Nizar Rahmatu dan Ardi
18	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Berau	Madri Pani dan Agus Wahyudi
19	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos
20	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamandau	Hendra Lesmana dan Budiman
21	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangka Barat	Sukirman dan Bong Ming Ming
22	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belu	Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere
23	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi
24	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palopo	Farid Kasim dan Nurhaenih
25	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai	Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon
26	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bungo	Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat
27	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Amus Besan dan Hamsah Buton
28	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pamekasan	Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi
29	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	Dendi Suryadi dan Alif Turiadi
30	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin
31	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jeneponto	Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby
32	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob
33	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah
34	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi
35	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi
36	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayapura	Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak
37	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Peniel Waker dan Saulinus Murib
38	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	Befa Yigibalom dan Natan Pahabol
39	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua	Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen
40	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Yuni Wonda dan Mus Kogoya



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 18 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak

No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
1	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
2	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
3	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
4	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
5	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
6	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
7	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	2
8	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
9	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
10	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	2	1
11	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
12	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
13	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
14	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
15	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
16	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
17	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
18	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1
19	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
20	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	2	1
21	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
22	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
23	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
24	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
25	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
26	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
27	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	0	1	0	3	1
28	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
29	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1
30	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
31	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	0	1	1	0	1	1
32	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	1	1	1	0	1	1
33	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	0	0	1	1

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Pemohon		Termohon		Pihak Terkait		Bawaslu
		Prinsipal	Kuasa Hukum	KPU	Kuasa Hukum	Prinsipal	Kuasa Hukum	
34	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1
35	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	1	1	0	1	1
36	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	2	0	1	0	1	0
37	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	1	0	0	1	0	1	1
38	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	2	1	1	0	2	1
39	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	0	1	1	1	0	1	1
40	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	0	1	0	1	0	1	1



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 19 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Melewati Tenggang Waktu Pengajuan

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
1	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	I
2	82/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Supiori	I
3	83/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muara Enim	I
4	90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palangkaraya	I
5	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pematang	I
6	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gresik	I
7	243/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	I
8	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Malang	I
9	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Blitar	II
10	167/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Binjai	II
11	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumenep	II
12	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pringsewu	II
13	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Katingan	II
14	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumba Barat Daya	II
15	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Kepulauan	II
16	246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Ambon	II
17	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Selatan	II
18	77/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarolangun	II
19	86/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Tenggara	II
20	270/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Timor Tengah Selatan	II
21	65/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manggarai Barat	II
22	300/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Saburajua	III
23	306/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	III
24	253/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pematangsiantar	III
25	288/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Selatan	III
26	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bondowoso	III
27	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tulungagung	III
28	248/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Timur	III
29	294/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sikka	III
30	310/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	III

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 20 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Diajukan oleh Pemantau atau Bukan Pasangan Calon

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
1	03/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	I
2	179/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bogor	I
3	302/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	II
4	06/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjar Baru	III
5	07/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjar Baru	III
6	09/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjar Baru	III
7	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	III
8	72/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasangkayu	III
9	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nabire	III



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 21 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Permohonan Kabur

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
1	01/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Murung Raya	I
2	14/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu	I
3	34/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rokan Hulu	I
4	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	I
5	42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Ternate	I
6	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Utara	I
7	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton	I
8	97/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Kendari	I
9	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Tengah	I
10	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tanah Datar	I
11	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	I
12	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	I
13	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	I
14	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Yapen	I
15	233/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Sula	I
16	281/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	I
17	256/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	II
18	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten FakFak	II
19	41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bima	II
20	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Melawi	II
21	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	II
22	216/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Tengah	II
23	278/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayawijaya	II
24	214/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Samosir	II
25	33/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	II
26	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pandeglang	II
27	291/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	II
28	71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sungai Penuh	II
29	120/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	II
30	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Labuhan Batu	II
31	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Toba	II
32	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Merangin	II
33	239/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Humbang Hasundutan	II

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
34	169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Batam	II
35	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	II
36	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamuju	II
37	125/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	II
38	126/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kerinci	II
39	146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tarakan	II
40	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Barat	II
41	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Selatan	II
42	217/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bintan	II
43	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Selatan	II
44	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banjar	II
45	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Selatan	II
46	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Biak Numfor	II
47	279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Jayapura	II
48	254/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kaimana	II
49	275/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Yalimo	II
50	121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tidore Kepulauan	II
51	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mappi	II
52	228/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pegunungan Bintang	II
53	244/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pegunungan Bintang	II
54	284/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Tengah	III
55	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	III
56	251/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	III
57	231/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	III
58	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	III
59	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru Selatan	III
60	11/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	III
61	105/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	III
62	285/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lanny Jaya	III
63	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	III
64	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Seram Bagian Timur	III
65	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Selayar	III
66	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Donggala	III
67	37/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pohuwato	III
68	26/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Manado	III



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
69	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Teluk Bintuni	III
70	301/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	III
71	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Poso	III
72	238/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Merauke	III
73	297/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	III
74	53/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bulukumba	III
75	303/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	III
76	252/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nabire	III
77	87/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Morowali Utara	III
78	229/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Yahukimo	III
79	54/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buol	III

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 22 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Tidak Dapat Diterima karena Permohonan Tidak Memenuhi Ambang Batas Pasal 158

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
1	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Padang Panjang	I
2	19/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Morotai	I
3	25/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banyuasin	I
4	27/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bau Bau	I
5	31/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rokan Hilir	I
6	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Payakumbuh	I
7	61/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Wakatobi	I
8	62/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Subang	I
9	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangkalan	I
10	67/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Aru	I
11	69/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Morotai	I
12	76/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Konawe Selatan	I
13	84/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muna	I
14	85/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bandung	I
15	107/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Utara	I
16	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Solok Selatan	I
17	118/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa Selatan	I
18	127/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Teluk Wondama	I
19	135/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Barat Daya	I
20	153/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kolaka Utara	I
21	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarmi	I
22	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sarmi	I
23	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lima Puluh Kota	I
24	161/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	I
25	164/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kapuas	I
26	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manokwari Selatan	I
27	166/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kotawaringin Timur	I
28	176/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lahat	I
29	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bandung Barat	I
30	193/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Kendari	I
31	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Dogiyai	I
32	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Cianjur	I



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
33	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Padang	I
34	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Manokwari	I
35	221/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	I
36	222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bekasi	I
37	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Mentawai	I
38	234/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maybrat	I
39	235/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sukabumi	I
40	242/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nduga	I
41	247/PHPU.GUB-XXIII/2025	Prov. Sumatera Utara	I
42	250/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Tengah	I
43	259/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maybrat	I
44	268/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Maluku Tenggara	I
45	273/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Selatan	I
46	276/PHPU.GUB-XXIII/2025	Prov. Papua Barat Daya	I
47	282/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	I
48	295/PHPU.GUB-XXIII/2025	Prov. Papua Tengah	I
49	308/PHPU.GUB-XXIII/2025	Prov. Papua Tengah	I
50	309/PHPU.GUB-XXIII/2025	Prov. Papua Tengah	I
51	114/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tapanuli Utara	II
52	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banyuwangi	II
53	39/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mesuji	II
54	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Jawa Timur	II
55	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ponorogo	II
56	139/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Muaro Jambi	II
57	148/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	II
58	98/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belitung Timur	II
59	151/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tapanuli Tengah	II
60	223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tangerang Selatan	II
61	48/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tulang Bawang	II
62	89/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Dumai	II
63	296/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	II
64	15/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Langsa	II
65	208/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sorong Selatan	II
66	249/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Tenggara	II
67	172/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Raja Ampat	II

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
68	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nganjuk	II
69	298/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Paniai	II
70	220/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Medan	II
71	152/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deli Serdang	II
72	257/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Selatan	II
73	8/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Lhoksumawe	II
74	29/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kampar	II
75	12/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bireun	II
76	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pinrang	II
77	245/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	III
78	258/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Maluku Utara	III
79	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrau	III
80	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sumba Barat Daya	III
81	79/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Takalar	III
82	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Ogan Ilir	III
83	236/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Asmat	III
84	35/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Toraja Utara	III
85	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Morowali	III
86	110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palembang	III
87	40/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Gorontalo	III
88	292/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	III
89	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tana Tidung	III
90	145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palu	III
91	23/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Tomohon	III
92	262/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kalimantan Timur	III
93	103/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bone Bolango	III
94	74/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pagar Alam	III
95	88/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pagar Alam	III
96	91/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Utara	III
97	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sampang	III
98	219/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nias Selatan	III
99	264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sorong	III
100	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deiyai	III
101	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sigi	III
102	241/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	III



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

No	Nomor Perkara	Daerah	Panel
103	218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Makassar	III
104	109/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai Kepulauan	III
105	211/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Flores Timur	III
106	46/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bolaang Mongondow	III
107	21/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kuantan Singingi	III
108	92/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Minahasa	III
109	95/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Pekanbaru	III

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 23 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Obyek Permohonannya Bukan Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon	Panel
1	17/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Langsa	Fazlun Hasan dan Meutia Apriani	II
2	38/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesisir Barat	Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim	II
3	111/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Rote Ndao	Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggalae	II
4	187/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Cirebon	Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana	I
5	191/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Waropen	Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi	II
6	198/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Barat	Dany Missy dan Iksan Husain	II



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 24 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Ditarik Kembali oleh Pemohon

No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon	Panel
1	10/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pangandaran	Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat	I
2	18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Parepare	Erna Rasyid Taufan dan M. Rahmat Sjamsu Alam	III
3	22/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Klaten	W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan	I
4	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sawahlunto	Deri Asta dan Desni Seswinari	I
5	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Ridwan Yasin dan Muksin Badar	III
6	102/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Bengkulu	Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari	II
7	113/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Depok	Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq	II
8	133/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mappi	Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling	II
9	137/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Tengah	Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra	II
10	138/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Malang	Gunawan Hs dan Umar Usman	II
11	140/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Sorong Selatan	Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)	II
12	144/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Fak Fak	Saparuddin	II
13	156/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Nunukan	Andi M Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus	III
14	185/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Selatan	M. Andrean Saefudin dan Salsabila	III
15	186/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kapuas	Muhammad Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin	I
16	196/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamongan	Abdul Ghofur dan Firosoy Shalati	II
17	197/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Deiyai	Yan Ukago dan Stefanus Mote	III
18	199/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Semarang	Saparuddin	I
19	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Probolinggo	Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)	I
20	226/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Keerom	Petrus Solossa dan Mustakim Hr.	III
21	255/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Yakob Weremba dan Suharto	II
22	261/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Sulawesi Utara	Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw	I
23	263/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Jawa Tengah	Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi	I

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon	Panel
24	269/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kalimantan Tengah	Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail Bin Yahya	III
25	271/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Yapen	Welliam R Manderi dan Yohanes G Raubaba	I
26	286/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamberamo Raya	Alfons Sesa dan Yakobus Britai	I
27	289/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lanny Jaya	Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya	III
28	290/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Alor	Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy	III
29	299/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tolikara	Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi	III



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 25 Perkara PHPUKADA Tahap 1 yang Dinyatakan Gugur

No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon	Panel
1	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Solok	Nofi Candra dan Leo Murphy	I
2	116/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lingga	Alias Wello dan Muhammad Ishak	III
3	142/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tambrauw	Ir. Saparuddin	III
4	205/PHPU.GUB-XXIII/2025	Papua Selatan	Perhimpunan Pemilih Indonesia	III
5	240/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mamuju Tengah	Sarul Sukardi dan Alamsyah Arifin	III
6	280/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Sarekat Demokrasi Indonesia	III
7	287/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Saparuddin	III
8	307/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Intan Jaya	Sarekat Demokrasi Indonesia	III

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 26 Perkara PHPUKADA Tahap 2 yang Dikabulkan

No.	Nomor Perkara	Daerah	Keterangan	Panel
1	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman	Diskualifikasi dan PSU	I
2	05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjar Baru	PSU	III
3	20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesawaran	Diskualifikasi, PSU di seluruh TPS	II
4	24/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	PSU	I
5	28/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Utara	PSU di 2 TPS	I
6	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Magetan	PSU di 4 TPS	I
7	47/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Sabang	PSU (1 TPS)	III
8	51/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	PSU di seluruh TPS kecamatan Essang	I
9	55/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Diskualifikasi dan PSU	III
10	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Diskualifikasi dan PSU	I
11	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Serang	PSU	III
12	73/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Siak	PSU di 2 TPS dan TPS RS	I
13	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Parigi Moutong	Diskualifikasi dan PSU	III
14	99/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bangka Barat	PSU di 4 TPS	I
15	132/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Diskualifikasi dan PSU	I
16	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palopo	Diskualifikasi, PSU diseluruh TPS	II
17	171/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai	PSU di beberapa TPS	II
18	173/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bungo	PSU di beberapa TPS	II
19	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	PSU (1 TPS) dan PUSS (1 TPS)	III
20	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kutai Kartanegara	Diskualifikasi dan PSU	I
21	224/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Diskualifikasi, PSU diseluruh TPS	II
22	260/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Boven Digoel	Diskualifikasi, PSU di seluruh TPS	II
23	267/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	PSU di 9 TPS	I
24	274/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jayapura	Perbaikan Diktum SK KPU	III
25	304/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua	Diskualifikasi, PSU di seluruh TPS	II
26	305/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Rekapitulasi Suara Ulang (Tanpa 4 Distrik)	III

Catatan:

PSU : Pemungutan Suara Ulang

PUSS : Penghitungan Ulang Surat Suara



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 27 Perkara PHPUKADA Tahap 2 yang Ditolak

No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon	Panel
1	266/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah	I
2	44/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Aceh Timur	Sulaiman dan Abdul Hamid	III
3	81/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Berau	Madri Pani dan Agus Wahyudi	II
4	04/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buton Tengah	La Andi dan Abidin	I
5	232/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Jeneponto	Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby	II
6	96/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Lamandau	Hendra Lesmana dan Budiman	II
7	32/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mandailing Natal	Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst	I
8	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pasaman Barat	Daliyus K dan Heri Miheldi	I
9	283/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak	Peniel Waker dan Saulinus Murib	III

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 28 Perkara PHPUKADA Tahap 2 yang Tidak Dapat Diterima

No.	Nomor Perkara	Daerah	Pemohon	Panel
1	293/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua Pegunungan	Befa Yigibalom dan Natan Pahabol	II
2	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Belu	Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere	III
3	93/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Halmahera Utara	Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos	III
4	272/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mimika	Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi	II
5	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pamekasan	Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi	II



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 29 Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

No.	Nomor Permohonan	Daerah	Klasifikasi Pemohon	Prosedur Pengajuan
1	1/PAN.MK/e-AP3/03/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Pasangan Calon Bupati	Online
2	2/PAN.MK/e-AP3/03/2025	Kabupaten Siak	Calon Wakil Bupati	Online
3	3/PAN.MK/e-AP3/03/2025	Kabupaten Barito Utara	Pasangan Calon Bupati	Offline
4	4/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Buru	Pasangan Calon Bupati	Offline
5	5/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Pasangan Calon Bupati	Online
6	6/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Banggai	Pasangan Calon Bupati	Offline
7	7/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	Pasangan Calon Bupati	Offline
8	8/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kota Banjarbaru	Pengamat	Offline
9	9/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kota Banjarbaru	Lain-Lain	Offline
10	10/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Pasangan Calon Bupati	Offline
11	11/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Pasangan Calon Bupati	Online
12	12/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pasangan Calon Bupati	Offline
13	13/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Empat Lawang	Pasangan Calon Bupati	Online
14	14/PAN.MK/e-AP3/04/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Pasangan Calon Bupati	Offline
15	15/PAN.MK/e-AP3/06/2025	Kabupaten Pesawaran	Pasangan Calon Bupati	Online
16	16/PAN.MK/e-AP3/06/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Pasangan Calon Bupati	Offline
17	17/PAN.MK/e-AP3/06/2025	Kota Palopo	Pasangan Calon Walikota	Offline

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 30 Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi dalam e-BRPK pada 21 April 2025

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	1/PAN.MK/e-AP3/03/2025	311/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Bupati
2	2/PAN.MK/e-AP3/03/2025	312/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Siak	Bupati
3	3/PAN.MK/e-AP3/03/2025	313/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Utara	Bupati
4	4/PAN.MK/e-AP3/04/2025	314/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Bupati
5	5/PAN.MK/e-AP3/04/2025	315/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Bupati
6	6/PAN.MK/e-AP3/04/2025	316/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai	Bupati
7	7/PAN.MK/e-AP3/04/2025	317/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	Bupati



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 31 Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi dalam e-BRPK pada 7 Mei 2025

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	8/PAN.MK/e-AP3/04/2025	318/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
2	9/PAN.MK/e-AP3/04/2025	319/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Walikota
3	10/PAN.MK/e-AP3/04/2025	320/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Bupati
4	11/PAN.MK/e-AP3/04/2025	321/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Bupati
5	12/PAN.MK/e-AP3/04/2025	322/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bupati
6	13/PAN.MK/e-AP3/04/2025	323/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Bupati
7	14/PAN.MK/e-AP3/04/2025	324/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Bupati

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024



Lampiran 32 Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi dalam e-BRPK pada 11 Juni 2025

No.	Nomor Permohonan	Nomor Perkara	Daerah	Klasifikasi Kepala Daerah
1	15/PAN.MK/e-AP3/06/2025	325/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesawaran	Bupati
2	16/PAN.MK/e-AP3/06/2025	327/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Bupati
3	17/PAN.MK/e-AP3/06/2025	326/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palopo	Walikota



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Angka 2024

Lampiran 33 Amar Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU

No.	Nomor Perkara	Daerah	Amar Putusan	Panel
1	311/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Puncak Jaya	Tidak Dapat Diterima	III
2	312/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Siak	Tidak Dapat Diterima	I
3	313/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Barito Utara	Dikabulkan	I
4	314/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Buru	Tidak Dapat Diterima	III
5	315/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pulau Taliabu	Tidak Dapat Diterima	I
6	316/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Banggai	Tidak Dapat Diterima	II
7	317/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Kepulauan Talaud	Ditolak	I
8	318/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Tidak Dapat Diterima	III
9	319/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Banjarbaru	Tidak Dapat Diterima	III
10	320/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Gorontalo Utara	Tidak Dapat Diterima	III
11	321/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Tidak Dapat Diterima	I
12	322/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Bengkulu Selatan	Tidak Dapat Diterima	I
13	323/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Empat Lawang	Tidak Dapat Diterima	I
14	324/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Tasikmalaya	Tidak Dapat Diterima	I
15	325/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Pesawaran	Tidak Dapat Diterima	II
16	326/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Kota Palopo	Tidak Dapat Diterima	II
17	327/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kabupaten Mahakam Ulu	Tidak Dapat Diterima	II





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA